



# Sistem Intrusif & Kedaulatan

ARTHUR JEVERSON MAYA

# **SISTEM INTRUSIF & KEDAULATAN**

Penulis:

**Arthuur Jeverson Maya**



**UKI PRESS**

Pusat Penerbitan dan Pencetakan  
Buku Perguruan Tinggi

**Universitas Kristen Indonesia**

**Jakarta**

**2023**

# **SISTEM INTRUSIF & KEDAULATAN**

Penulis:

**Arthuur Jeverson Maya**

Editor:

**Dr. Indri Jatmoko, S.Si., MM**

**ISBN: 978-623-8012-82-4**

Penerbit: UKI Press

Anggota APPTI

Anggota IKAPI

Redaksi: Jl. Mayjen Sutoyo No.2 Cawang Jakarta 13630

Telp. (021) 8092425

Cetakan I Jakarta: UKI Press, 2023

Hak cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

## PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas perkenanNya, maka penyusunan buku berjudul *Sistem Intrusif dan Kedaulatan* bisa berjalan dengan baik. Buku ini merupakan pengembangan atas dua topik penelitian yang sudah dilakukan.

Penyusunan buku ini berawal dari kegalauan penulis atas kajian Hubungan Internasional (HI) yang selalu mendasarkan referensi pada pemikiran-pemikiran arus utama dalam menganalisis interaksi politik kawasan sebagai suatu interaksi akibat pengaturan-pengaturan negara kuat luar kawasan. Dinamika tersebut berlaku pada setiap regional di dunia, di mana negara-negara kuat luar kawasan selalu terlibat dalam perpolitikan kawasan. Secara teoritis, Cantori dan Spiegel menyebutnya sebagai *Intrusive System*. Selanjutnya, penulis menyebutnya sebagai Sistem Intrusif. Secara terminologi, sistem intrusif tidak lahir pasca PD 2, melainkan sudah ada sebelum perjanjian Westphalia 1648. Misalnya, dalam cangkang Asia Tenggara, pada masa pra-sejarah, India dan Cina sudah melakukan ekspansi di Semenanjung Melayu.

Sistem intrusif merupakan bentuk kekuasaan kedaulatan yang menekankan pada keterlibatan aktor negara di suatu kawasan. Aktor negara yang dimaksud adalah negara-negara



kuat luar kawasan yang memiliki nilai tawar tinggi dalam politik internasional. Cantori dan Spiegel menggolongkan negara-negara tersebut ke dalam beberapa kelompok intrusif. Namun, penulis hanya menuliskan kelompok negara yang signifikan mempengaruhi perilaku aktor negara dalam satu kawasan. Sistem ini mendukung interaksi negara-negara luar dan dalam kawasan. Pada kenyataannya, sistem intrusif masih menjadi pendekatan kontemporer dalam interaksi antaraktor negara.

Objek penelitian yang diambil sebagai pembuktian atas berjalannya sistem intrusif adalah keamanan di Asia Tenggara. Kawasan ini menjadi menarik untuk dijadikan sebagai instrumen pembuktian karena memiliki berbagai isu keamanan dan konflik sangat tinggi. Terdapat konflik bilateral, trilateral, bahkan konflik multilateral di Asia Tenggara. Namun, anomalnya tidak terjadi perang besar dalam tendensi konflik sangat tinggi. Akhirnya dalam penelitian tesis penulis berjudul “Anomali Keamanan di Asia Tenggara Pasca Perang Dingin,” mempertanyakan mengapa tidak terjadi perang dalam tendensi konflik yang tinggi. Hasil riset tesis inilah yang dijadikan sebagai awal pembuatan buku sistem intrusif dan kedaulatan.

Konflik, keamanan, perang, dan perdamaian masih menjadi isu sensitif dalam politik internasional. Karena

memiliki dampak yang sangat besar bagi peradaban umat manusia. Sehingga, disiplin ilmu HI menghadirkan berbagai kajian untuk mencegah terjadinya perang besar. Tinjauan dan kritikan serta perdebatan besar dalam HI berusaha memproduksi model-model kekuasaan global sebagai rezim pengetahuan. Salah satu yang menjadi perhatian besar adalah politik regional yang melibatkan negara-negara luar regional. Ini menimbulkan banyak pertanyaan apakah kehadiran tersebut menimbulkan perdamaian atau ketegangan politik kawasan. Seperti yang sudah didefinisikan oleh pemikir-pemikir HI sebelumnya, bahwa politik antarbangsa atau politik internasional dapat diidentifikasi sebagai arena perebutan kekuasaan. Mengacu definisi tersebut, maka sistem intrusif adalah pengaturan-pengaturan untuk memenuhi hasrat kekuasaan global.

Buku ini hadir untuk menunjukkan pengaturan-pengaturan tersebut, di mana aktor HI yang ditetapkan sebagai sistem intrusif adalah Amerika Serikat, Cina, dan Australia. Ketiganya dipilih penulis untuk menjelaskan berbagai pengaturan intrusif di kawasan Asia Tenggara. Misalnya, terdapat pengaturan multilateral, bilateral, ekonomi & perdagangan, dan intervensi militer. Melalui pengaturan-pengaturan tersebut sistem intrusif berjalan di kawasan Asia Tenggara. Konstelasi politik muncul saat diperhadapkan pada

konflik bilateral antara Indonesia dan Malaysia terkait hilangnya pulau Sipadan dan Ligitan, ditambah tidak adanya solusi terkait klaim atas kepulauan Ambalat. Selain itu, terdapat konflik trilateral di Selat Malaka antara Indonesia, Singapura, dan Malaysia. Selanjutnya, Asia Tenggara diperhadapkan pada konflik multilateral di Laut Cina Selatan. Bukan itu saja, masih terdapat berbagai konflik lainnya di Asia Tenggara Daratan. Tentu saja semua akademisi HI sepakat bahwa terjadi perang antarnegara berawal dari konflik yang tidak terselesaikan.

Secara teoritis, Cantori dan Spiegel meyakini bahwa sistem intrusif mampu memberikan keseimbangan kekuatan di kawasan. Keseimbangan tersebut berdampak pada dua level analisis yaitu negara-negara intrusif dan negara-negara yang diintrusif. Ini yang kemudian diklaim oleh teori arus utama sebagai keamanan. Pada kenyataannya, tidak terjadi perang terbuka antarnegara berkonflik di Asia Tenggara. Namun, solusi perdamaian selalu buntu sampai terbitnya buku ini. Justru implikasi tersebut mengonfirmasi teori sistem intrusif, sehingga eksistensi sistem intrusif masih dianggap relevan sebagai panduan politik regional di era kontemporer. Mengutip pemikiran Foucault, bahwa kekuasaan kedaulatan selalu bermakna negatif. Sehingga dalam pengembangannya, buku ini menghadirkan pendekatan genealogi untuk

mengungkap kuasa kedaulatan, dengan menetapkan objek penelitian pada konflik Laut Cina Selatan. Pengembangan ini didasarkan pada riset penulis berjudul “Kuasa Teks Kedaulatan Dalam Konflik Laut Cina Selatan.”

Kedaulatan bukanlah sesuatu yang lahir sejak perjanjian Westphalia 1648, namun sudah ada sejak imperium. Misalnya kedaulatan Sedari Solon (600an SM), kedaulatan Iskandar Agung (300 SM), dan kedaulatan Julius Caesar (100 SM). Ini mengartikan bahwa kedaulatan menjadi hal penting dalam tubuh negara. Konflik di Laut Cina Selatan merupakan permasalahan diskursus kedaulatan yang melibatkan negara-negara kawasan Asia Tenggara dan negara-negara luar kawasan seperti Cina. Permasalahan konflik yang berkepanjangan dimulai dari pemaknaan tentang kedaulatan. Buku ini menunjukkan adanya *grand narrative* dalam konflik Laut Cina Selatan. Sehingga dibutuhkan berbagai pengaturan yang mengakomodasi nilai-nilai lokal yang ada di negara-negara Asia Tenggara maupun Cina. Di sini penulis menekankan bahwa kontribusi lain selain sistem intrusif dalam menghadirkan perdamaian, adalah pendefinisian kedaulatan berlandaskan pada nilai-nilai lokal.

Produk kedaulatan Westphalia dalam disiplin ilmu HI harus utama selalu dianggap sebagai logosentrisme, sehingga terdisiplinkan sebagai rezim pengetahuan antarbangsa. Tak

heran jika hubungan internasional yang berdasarkan logosentrisme selalu mengakibatkan konflik dan perang. Sedangkan kekuasaan yang didasarkan nilai-nilai budaya lokal akan berimplikasi pada pilihan-pilihan proteksionisme bukan rasionalisme. Penulis hanya menunjukkan sedikit terkait skema pemikiran konfusianisme dan nilai-nilai yang terkandung di dalam ajaran tersebut. Bahwa beberapa aktor negara yang berkonflik di Laut Cina Selatan memiliki kesamaan konfusianisme berdasarkan aspek historis. Hal tersebut bisa dijadikan sebagai “kapital” untuk wacana tandingan kedaulatan. Di mana diplomasi dapat dilakukan melalui nilai-nilai lokal, Der Derian menyebutnya sebagai “mediasi keterasingan.” Selain nilai-nilai konfusianisme, masih banyak lagi nilai-nilai lokal yang perlu dikembangkan sebagai sarana diplomasi menuju kawasan tanpa konflik.

Jakarta, 2 April 2023

Arthuur Jeverson Maya



## DAFTAR ISI

<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>i</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDEKATAN KEKUASAAN DAN SISTEM INTRUSIF .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Keamanan di Asia Tenggara .....	13
C. Sistem Intrusif .....	27
D. Kekuasaan Foucault dan Bourdieu .....	35
<b>BAB II DINAMIKA KONFLIK DAN KETEGANGAN POLITIK .....</b>	<b>45</b>
A. Konflik di Laut Cina Selatan.....	45
B. Konflik Bilateral atau Trilateral di Asia Tenggara .....	52
C. Postur Kekuatan Militer Negara-Negara Asia Tenggara .....	67
<b>BAB III SISTEM INTRUSIF DI KAWASAN ASIA TENGGARA.....</b>	<b>73</b>
A. Sistem intrusif Amerika Serikat .....	73
B. Sistem Intrusif Cina .....	88
C. Sistem Intrusif Australia .....	104
<b>BAB IV IMPLIKASI SISTEM INTRUSIF.....</b>	<b>117</b>
A. Anomali di Laut Cina Selatan .....	117

B. Anomali di Asia Tenggara Maritim.....	126
C. Anomali di Asia Tenggara Daratan .....	150
<b>BAB V KEKUASAAN KEDAULATAN .....</b>	<b>161</b>
A. Rezim Kebenaran .....	161
B. Negara Idola .....	163
C. Paradoks Kedaulatan .....	168
D. Implikasi Kekuasaan Kedaulatan Terhadap Konflik Laut Cina Selatan.....	176
<b>BAB VI KEKUASAAN BUDAYA .....</b>	<b>185</b>
A. Minor Narrative .....	185
B. Habitus Konfusianisme.....	188
C. Kapital Konfusianisme .....	192
D. Arena Pertarungan Konfusianisme.....	195
E. Implikasi Teks Konfusianisme di Laut Cina Selatan.....	203
<b>BAB VII KESIMPULAN.....</b>	<b>225</b>
<b>Daftar Pustaka .....</b>	<b>238</b>
<b>Profil Penulis .....</b>	<b>259</b>

# **BAB I**

## **PENDEKATAN KEKUASAAN DAN SISTEM INTRUSIF**

### **A. Latar Belakang**

Ide besar buku ini berangkat dari skema pemikiran sistem intrusif dan logosentrisme kedaulatan yang menjadi teks agung modernisme dalam kaitan politik kawasan. Teks agung tersebut merupakan akar konflik, sehingga penting untuk ditunjukkan asal usul teks tersebut. Teks agung atau *Grand narrative* berfokus pada bangunan wacana dominasi budaya modern yang membentuk perilaku negara-negara untuk bertindak dalam konstelasi konflik dan ketegangan. Teks agung adalah kognitif struktural yang dianggap sebagai kebenaran absolut yang menyejarah. Foucault menyebutnya "rezim kebenaran." Rezim tersebut merupakan "perangkat lunak" dalam institusi negara yang dianggap *given* sehingga mampu mewujudkan kemistikan negara dalam sebuah realitas. Hal ini hadir berbentuk wacana atau teks yang diyakini budaya modern sebagai prinsip yang terlegitimasi untuk mengatur perilaku negara modern bertindak konflik.

Perilaku konflik berkaitan erat dengan konsep negara modern bentukan Westphalia. Ia diyakini mengonstruksikan berbagai teks kebenaran sebagai syarat berdirinya negara berdaulat. Hal ini berimplikasi pada kemiripan perilaku

negara dalam kawasan untuk mempertahankan eksistensinya dalam politik kawasan. Tindakan negara tersebut dimotori oleh kekuasaan dominan. Kekuasaan tersebut adalah teks kedaulatan. Teks yang tidak bertubuh ini berusaha menempati tubuh negara, dan berhasil pada perjanjian Westphalia 1648. Ia disebut Bourdieu “kuasa wacana.” Hal ini yang menjadikan negara-negara di sekitar kawasan Asia Tenggara dan Laut Cina Selatan (LCS) berkonflik tanpa akhir sehingga berpotensi menciptakan perang terbuka antarnegara di kawasan.

Perilaku berkonflik negara-negara yang bersinggungan di kawasan Asia Tenggara dan LCS didasarkan pada karakter politik dan sosial budaya yang dibangun oleh fragmentasi identitas nasional yang berbeda. Ia menguatkan argumentasi bahwa perbedaan identitas nasional berpotensi memicu pecahnya perang terbuka di kawasan yang memiliki ketegangan politik tinggi terkait batas wilayah laut maupun darat. Namun, pada kenyataannya, tidak menimbulkan perang terbuka dalam eskalasi konflik yang panjang dan sensitif. Hal ini merupakan fenomena anomali karena paradoks kedaulatan dan pemaknaan kedaulatan harusnya berdampak pada perang terbuka antarnegara.

Kedaulatan territorial tercermin dalam imajinasi batas laut yang ditetapkan UNCLOS 1982. Imajinasi ini berdampak

pada klaim negara-negara di LCS. Cina mengklaim Spratly, kepulauan Parcel, dan perairan sekitarnya serta memprovokasi pengklaim lainnya, sementara Vietnam, Filipina, dan Malaysia juga mengklaim perairan serupa sebagai bagian dari wilayah mereka. Saling klaim ini berdampak signifikan pada konflik.<sup>1</sup> Ketegangan di LCS merupakan sesuatu yang sulit diselesaikan hingga saat ini karena setiap negara terfragmentasi dalam identitas nasionalnya menyangkut teritorial. Para ahli militer berargumen dapat menimbulkan perang terbuka.

Laksamana Scott Swift, Pimpinan Armada Pasifik Amerika Serikat (AS), berargumen bahwa sengketa LCS berpotensi perang terbuka. Oleh karena, beberapa negara berkonflik semakin tergoda untuk menggunakan kekuatan militer dalam menyelesaikan sengketa teritorial laut.<sup>2</sup> Argumentasi Swift adalah signifikasi rasa khawatir dari para ahli militer karena situasi LCS berpotensi untuk menyelesaikan konflik dengan cara perang terbuka. Desakan Swift tersebut mengacu pada resolusi yang dilakukan oleh Filipina melalui

---

<sup>1</sup> L. Buszynski, 'Rising Tensions in the South China Sea: Prospects for a Resolution of the Issue,' *Security Challenges*, vol. 6, no. 2, 2010, hal. 85

<sup>2</sup> J. Dwidayasa, 'Sengketa Laut China Selatan dinilai Picu Perlombaan Senjata,' *Okezone.com*, 15 Desember 2015, <<http://news.okezone.com/read/2015/12/15/18/1268309/sengketa-laut-china-selatan-dinilai-picu-perlombaan-senjata>>, diakses pada 24 Desember 2015.



pengadilan arbitrase. Filipina mendesak pengadilan arbitrase untuk menyelesaikan sengketa batas lautnya berdasarkan konvensi PBB mengenai UNCLOS 1982.

Selain itu, Kepala Angkatan Bersenjata Malaysia menyebut reklamasi pulau buatan yang dilakukan Cina di LCS adalah “upaya provokasi.” Ia merusak hubungan Cina, Filipina, dan Vietnam. Reklamasi pulau buatan di kepulauan Spratly merupakan sumber sengketa didasarkan provokasi untuk mencegah pengklaim lain. Agresivitas tersebut menimbulkan tendensi politik yang tinggi sehingga menuai respon dari organisasi regional ASEAN. Respon tersebut diaplikasikan dalam bentuk negosiasi antara ASEAN dan Cina. Ia bertujuan menghasilkan kesepakatan untuk mengurangi ketegangan politik di LCS. Salah satu contoh kasus yang memicu ketegangan, saat kapal-kapal nelayan Cina diusir oleh Angkatan Laut AS yang sedang melakukan latihan bersama dengan militer Filipina di sekitar LCS.<sup>3</sup>

Forum Regional ASEAN (ARF) telah melakukan upaya perdamaian untuk mencegah terjadinya perang militer konvensional. Oleh karena konflik tersebut sangat sensitif, maka ASEAN pada bulan Juli 1994, melakukan negosiasi dengan Cina agar berkomitmen untuk menyelesaikan

---

<sup>3</sup> N.H. Thao, ‘Vietnam and the Code of Conduct for the South China Sea,’ *Ocean Development & International Law*, vol. 32, no. 2, 2001, hal. 105.

sengketa kepulauan Spratly dengan Vietnam atas dasar perundingan damai atau diplomasi. Pada tahun 1995, Cina setuju membahas sengketa Spratly dengan negara-negara ASEAN. Mengalami perkembangan sejak Cina menjadi tuan rumah dalam pembahasan sengketa Spratly pada tahun 1997.

Pada tahun 1999, Cina dan ASEAN setuju mempertimbangkan prinsip-prinsip kode etik untuk LCS. Selain itu, pendekatan dengan memakai hukum internasional telah dilakukan, termasuk konvensi PBB tahun 1982 tentang hukum laut *Law of Sea* (LOS), yang telah diakui oleh Cina, Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Brunei. Pendekatan lain seperti menggunakan pengadilan atau Mahkamah Internasional (ICJ) telah ditempuh oleh negara-negara Asia Tenggara.<sup>4</sup> Pada bulan April 2004, wakil dari Divisi Asia Timur dan Pasifik Kementerian Luar Negeri Taiwan Lin Sung-Huan pada dua kesempatan bertemu dengan Huang Ru Li, Direktur Kantor Ekonomi dan Kebudayaan Vietnam di Taipei, menyampaikan permintaan agar pemerintah Vietnam dapat menahan diri untuk menghindari ketegangan di wilayah tersebut.<sup>5</sup> Penempatan militer Vietnam di kepulauan Nansha telah menambah ketegangan dengan Cina, Huang berusaha meredakan ketegangan tersebut dengan melarang militer

---

<sup>4</sup> Thao, hal. 108-109.

<sup>5</sup> J.I. Chong, 'The South China Sea Disputes: Documents and Context,' *Chinese Law & Government*, vol. 46, no. 3, 2013, hal. 25-26.

Vietnam dan warga Vietnam untuk bepergian ke tempat tersebut. Namun, upaya diplomasi ini tidaklah efektif untuk menghadirkan perdamaian kedua negara.

Politik identitas yang terfragmentasi secara nasional di elit-elit negara telah mewarnai sengketa LCS. Dampak yang ditimbulkan oleh hal ini sangat serius karena menyangkut keamanan manusia negara-negara berkonflik. Ancaman tersebut dibuktikan, sekalipun telah dilakukan berbagai upaya diplomasi, namun penyelesaian sengketa tersebut tidak mengalami kemajuan yang signifikan. Sengketa LCS terus berjalan walaupun ada upaya diplomatik dan hukum laut internasional. Cina, Vietnam, Filipina, Brunei, dan Malaysia akan tetap melakukan patroli militer dengan bantuan pihak-pihak luar kawasan untuk mempertahankan eksistensi kekuasaan di LCS.

Kekuasaan yang diidentifikasi sebagai kepentingan nasional selalu menjadi landasan analisis pada konflik LCS. Aktor negara yang berkonflik di LCS sulit diajak diplomasi untuk perdamaian karena memiliki kepentingan yang berbeda. Benturan kepentingan tersebut membawa mereka pada perjuangan keamanan tradisional yang menekankan pada eksistensi negara mengesampingkan keamanan yang lebih difokuskan pada manusia. Negara menjadi penting saat memperjuangkan eksistensi, sedangkan keamanan manusia

harus bebas dari ancaman konflik, kemiskinan, kebodohan, dan lain-lain. Hal ini mengindikasikan LCS sebagai medan pertempuran negara-negara berdaulat yang mengutamakan ego kebangsaannya, sehingga pintu perang besar terbuka lebar.

Kawasan Asia Tenggara adalah kawasan yang memiliki ukuran ketegangan politik dan keamanan sangat tinggi. Namun menariknya, wilayah ini cenderung menciptakan keamanan, yang dibuktikan dengan tidak pernah terjadi perang militer antarnegara dalam beberapa dekade ini. Dinamika ketegangan dan postur kekuatan militer negara-negara Asia Tenggara tidak berimplikasi pada perang besar; mereka justru membentuk bangunan keamanan di kawasan Asia Tenggara. Fenomena hadirnya keamanan dan tidak adanya perang militer yang menjadikan Asia Tenggara sebagai kawasan yang unik.

Asia Tenggara mencakup Indochina dan Semenanjung Malaya serta kepulauan di sekitarnya. Pasca Perang Dunia II, di kawasan Asia Tenggara berdiri sepuluh negara berdaulat yang terbagi dalam dua kelompok besar, yaitu Asia Tenggara Daratan (ATD), yang terdiri dari Kamboja, Laos, Myanmar, Thailand dan Vietnam, serta Asia Tenggara Maritim (ATM) yang meliputi Brunei Darussalam, Filipina, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Pada perkembangannya, dalam

berbagai forum kawasan Asia Tenggara menunjukkan kesan aman dan damai. Kesan ini hadir, misalnya, melalui beragam bentuk harmonisasi antarnegara kawasan dalam berbagai level kerja sama secara masif, mulai dari regional seperti ASEAN dan turunan-turunannya, multilateral dalam bentuk hubungan antarnegara, hingga level bilateral. Tetapi, sebenarnya terdapat banyak sekali potensi konflik di kawasan Asia Tenggara yang diklaim oleh para pakar dapat memicu perang terbuka.<sup>6</sup>

Kawasan Asia Tenggara secara faktual memiliki beragam konflik dan ketegangan antara satu negara dengan negara lainnya. Malaysia, Brunei, Filipina, dan Vietnam dihadapkan pada banyak ketegangan berkaitan dengan klaim wilayah di Laut Cina Selatan. Begitu pula Indonesia, Malaysia, dan Singapura yang secara trilateral juga masih dihadapkan pada penentuan tapal perbatasan di Selat Malaka. Di samping ketegangan multilateral, negara-negara di kawasan Asia Tenggara juga dihadapkan pada banyak ketegangan secara bilateral. Misalnya, Indonesia dan Malaysia memiliki hubungan pasang surut sejak dahulu hingga saat ini, termasuk luka lama berkaitan dengan konfrontasi kedua negara, perubahan status kepemilikan

---

<sup>6</sup> I.D. Haryono, *Konflik dan Perbatasan Negara di Kawasan Asia Pasific*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, p. 27.



Pulau Sipadan dan Ligitan, masalah perbatasan di perairan Laut Sulawesi dan Pulau Kalimantan (blok Ambalat), saling mengklaim budaya, hingga persoalan yang menyangkut Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Singapura juga memiliki berbagai ketegangan dengan negara sekawasan lainnya, terutama dengan Indonesia dan Malaysia, mulai dari tragedi *Orchard Road*, permasalahan reklamasi daratan dan ekspor pasir, kabut asap kebakaran di Riau, masalah klaim Singapura atas Pulau Batu Putih (*Pedra Branca*) di Selat Johor, protes Singapura atas penamaan *Kapal Republik Indonesia (KRI Usman Harun)*, hingga tuduhan Malaysia bahwa Singapura adalah mata-mata Amerika Serikat di Asia Tenggara.

Sementara itu, Filipina pernah dihadapkan pada berbagai ketegangan dengan Malaysia mengenai klaim Filipina atas wilayah Kesultanan Sabah di Malaysia Timur. Begitu pula, Brunei masih memiliki perbedaan pendapat dengan Malaysia mengenai batas wilayah tak bertanda di daratan Sarawak, Malaysia Timur, dan batas wilayah perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Masalah perbatasan juga mengganggu hubungan Thailand dengan Malaysia, Thailand dengan Myanmar, Thailand dengan Laos, dan Vietnam dengan Kamboja. Selain itu, Kamboja dan Thailand dihadapkan pada konflik dan ketegangan yang berkaitan dengan perebutan kuil Hindu Preah Vihear hingga sempat

terjadi baku tembak sesaat antara tentara kedua negara di wilayah perbatasan.<sup>7</sup>

Stabilitas keamanan di kawasan Asia Tenggara penuh dengan friksi, konflik dan ketegangan sehingga sangat berbahaya dan terkesan sensitif. Hal ini juga ditopang oleh postur kekuatan militer masing-masing negara kawasan. Banyak negara di kawasan Asia Tenggara yang setiap tahunnya terus-menerus meningkatkan anggaran pertahanan dan memodernisasi angkatan perangnya.<sup>8</sup> Selain itu, penting juga untuk dicatat bahwa karakter doktrin militer setiap negara di kawasan Asia Tenggara pada umumnya tidak hanya diarahkan pada strategi *defensive* total seperti yang diadopsi Jepang atau Swiss, tetapi juga strategi *defensive reactive*. Hal ini didukung oleh sebagian besar jenis alat utama sistem persenjataan (alutsista) setiap negara di kawasan Asia Tenggara yang memiliki karakter ofensif dengan penekanan pada peningkatan alutsista di setiap matra kekuatan, baik darat, udara maupun laut, yang mempunyai sifat mobilitas

---

<sup>7</sup> Haryono, pp. 27-28.

<sup>8</sup> 'The SIPRI Military Expenditure Database,' *SIPRI* (daring), <<http://milexdata.sipri.org/result.php4>> dan 'Comparisons of World Military Strengths,' *Global Fire Power* (daring), <<http://www.globalfirepower.com/countries-comparison.asp>>, diakses pada 7 Juni 2015.

tinggi dan dapat digunakan untuk proyeksi kekuatan di luar batas nasional masing-masing negara.<sup>9</sup>

Secara literal, perang adalah istilah khusus yang masih bersifat problematis, tidak ada satu pun persetujuan tunggal yang diterima tentang definisi dari istilah ini. John Mueller mengartikan perang sebagai “*an armed conflict between governments in the case of international wars or between a government and an at least somewhat organized domestic armed group for civil wars.*”<sup>10</sup> Sedangkan U.S Marine Corps War-fighting secara spesifik memahami perang sebagai “*a violent clash of interests between or among organized groups characterized by the use of military force. These groups have traditionally been established nation-states.*”<sup>11</sup> Dari dua definisi ini, terminologi “perang besar” dapat ditafsirkan sebagai fenomena terdapatnya benturan kepentingan yang disertai kekerasan dengan penggunaan kapabilitas kekuatan militer terorganisir dalam skala cukup besar antara dua negara atau lebih untuk menghasilkan konsekuensi-konsekuensi politik.

---

<sup>9</sup> *Defence Procurement in Southeast Asia*, 2008, <[http://ipf-ssg.sea.net/5th\\_WS/defenceprocurement\\_overview\\_Tim+Huxley.pdf](http://ipf-ssg.sea.net/5th_WS/defenceprocurement_overview_Tim+Huxley.pdf)>, diakses pada 8 Juni 2015.

<sup>10</sup> J. Mueller, ‘War Has Almost Ceased to Exist: An Assessment,’ *Political Science Quarterly*, vol. 124, no. 2, 2009, p. 298.

<sup>11</sup> *U.S. Marine Corps Warfighting*, Cosimo, New York, 2007, p. 3, <<https://books.google.co.id/books?isbn=1602060592>>, diakses pada 8 Juni 2015.

Asia Tenggara adalah salah satu contoh kawasan yang menunjukkan konstelasi ketegangan politik berdeterminasi tinggi. Postur kekuatan militer sebagai elemen pelaksanaan perang yang dimiliki masing-masing negara di kawasan juga terus-menerus ditingkatkan untuk modernisasi serta memiliki karakter untuk mempertahankan diri dan ofensif. Dua variabel ini diyakini sangat sensitif dan berbahaya sehingga mungkin saja dapat menjadi pemicu utama bagi perang terbuka antarnegara kawasan. Yang menarik, sekalipun Asia Tenggara tidak dapat dikatakan berada pada level aman sepenuhnya, perjalanan selama tiga dekade terakhir menunjukkan bahwa ia merupakan salah satu kawasan yang cenderung bebas perang, khususnya dalam konteks perang yang terorganisir dalam skala besar. Tidak ada satu pun benturan kekerasan terorganisir oleh militer profesional antarnegara kawasan. Oleh karena itu, dapat diargumentasikan bahwa Asia Tenggara merupakan kawasan yang memiliki keamanan yang terkontrol.

Namun, perlu dicatat bahwa tatanan keamanan di kawasan Asia Tenggara masih dipahami sebagai berada dalam lingkup “sempit,” yang hanya sekedar menekankan pada aspek-aspek penghindaran perang secara terbuka. Hal ini terlihat dari masih tingginya intensitas rasa saling curiga pada isu-isu tertentu, misalnya perbatasan, yang terjadi di antara

negara-negara kawasan Asia Tenggara.<sup>12</sup> Dengan keadaan rivalitas yang tinggi ini, sungguh menarik untuk melihat mengapa perang besar justru tidak pernah terjadi di Kawasan ini selama dua dekade ini.

## **B. Keamanan di Asia Tenggara**

Dari berbagai tulisan mengenai konflik perbatasan di Asia Tenggara, salah satunya adalah artikel Leszek Buszynski yang berjudul *Rising Tensions in the South China Sea: Prospects for a Resolution of the Issue*. Buszynski menjelaskan bahwa konflik Laut Cina Selatan yang disebabkan tumpang tindih klaim antara negara-negara Asia Tenggara dan Cina sejauh ini mengalami kebuntuan. Cina mengklaim Spratly dan kepulauan Paracel serta perairan sekitarnya dan telah berusaha untuk mencegah pengklaim lainnya. Sedangkan Vietnam, Filipina, dan Malaysia juga mengklaim perairan Laut Cina Selatan sebagai bagian dari wilayah masing-masing. Buszynski menjelaskan bahwa kebuntuan solusi tersebut berakibat pada konflik yang berkepanjangan dan dapat menimbulkan isu keamanan yang didasarkan pada kepentingan nasional.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> ASEAN *Selayang Pandang*, Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN, Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta, 2012, p. 6.

<sup>13</sup> L. Buszynski, 'Rising Tensions in the South China Sea: Prospects for a Resolution of the Issue,' *Security Challenges*, vol. 6, no. 2, 2010, pp. 85-104.

Berfokus pada unit analisa yang sama, tulisan Nicole Jenne yang berjudul *State formation and territorial conflict: A framework for analysis* menjelaskan bahwa pasca kolonialisme, kawasan Asia Tenggara memiliki permasalahan perbatasan yang kompleks. Jenne berargumen bahwa konflik perbatasan tersebut berbeda dengan konflik-konflik lain; bahwa Asia Tenggara adalah salah satu kawasan yang dapat menyebabkan permasalahan dalam skala yang lebih besar. Jenne juga percaya bahwa walaupun dampak konflik belum menonjol pada skala yang lebih besar di kancah politik, namun jika didasarkan pada premis pembentukan negara di Asia Tenggara, termasuk konsolidasi kenegaraan modern, hal tersebut bisa mempengaruhi tingkat kerawanan perang negara-negara kawasan. Jenne berpendapat bahwa kurangnya kapasitas domestik dan tidak menjadikan masalah ini sebagai masalah utama dapat menimbulkan konflik dalam skala besar, yaitu perang antarnegara-negara tetangga sekawasan.<sup>14</sup>

Literatur selanjutnya yang juga memiliki kedekatan area topik dengan penelitian ini adalah tulisan-tulisan mengenai isu keamanan di Asia Tenggara. Reviu atas literatur ini menunjukkan bahwa kawasan Asia Tenggara selalu diwarnai

---

<sup>14</sup> N. Jenne, *State formation and territorial conflict: A framework for analysis*, Second Oceanic Conference on International Studies, University of Melbourne, 9-11 July 2014, <<http://www.ocis.org.au/files/pdf/full-papers/ocis14final00248.pdf>>, diakses pada 20 Oktober 2015.

dengan isu-isu keamanan. Sam Bateman, misalnya, menjelaskan isu-isu keamanan di Asia Tenggara dalam risalahnya yang berjudul *Regional maritime security: threats and risk assessments*. Bateman menjelaskan tentang keamanan regional yang dibutuhkan oleh kawasan Asia Tenggara, yang memiliki tingkat sengketa perbatasan yang tinggi, khususnya mengenai tapal batas maritim. Selain itu, Bateman menemukan bahwa perairan Asia Tenggara merupakan perairan yang penting bagi negara-negara di dunia. Sengketa-sengketa perbatasan muncul antarnegara kawasan karena perairan di kawasan Asia Tenggara merupakan jalur internasional. Bateman juga menyarankan agar negara-negara di kawasan Asia Tenggara dapat meningkatkan anggaran pertahanan mereka agar dapat menjadi *deterrence* bagi negara lain.<sup>15</sup>

Di samping Bateman yang meneliti keamanan tradisional di Asia Tenggara, ada Carolin Liss yang mengambil fokus pada keamanan non-tradisional. Dalam artikel Liss yang berjudul *The privatisation of maritime security in Southeast Asia: the impact on regional security cooperation*, dijelaskan isu keamanan di kawasan Asia Tenggara dengan berfokus pada proses kerja sama dalam

---

<sup>15</sup> S. Bateman, *Regional maritime security: threats and risk assessments*, Faculty of Law, University of Wollongong, 2010, <<http://ro.uow.edu.au/lawpapers/411/>>, diakses pada 19 Oktober 2015.

bentuk baru, yaitu *Private Military and Security Companies* (PMSCs). Menurut Liss, di era kontemporer dewasa ini definisi keamanan menjadi lebih luas, dari keamanan yang tradisional ke keamanan non-tradisional. Namun, isu keamanan selalu mewarnai perairan Asia Tenggara, baik tradisional maupun non-tradisional. Isu keamanan maritim non-tradisional di Asia Tenggara sering menimbulkan konflik sengketa perbatasan.<sup>16</sup>

Reviu berikutnya sebagai karya pembanding adalah literatur mengenai penyebab tidak terjadinya perang di kawasan Asia Tenggara yang memiliki tingkat ketegangan keamanan dan konflik sangat tinggi. Salah satunya adalah artikel Sheldon Simon yang berjudul *Security prospects in Southeast Asia: Collaborative efforts and ASEAN regional forum*. Artikel Simon merupakan sebuah interpretasi konstruktivis yang membentuk gagasan bahwa ASEAN telah membawa Asia Tenggara kepada suatu identitas kolektif, di mana keamanan internasional Asia Tenggara lebih difokuskan kepada organisasi regional tersebut. Simon berargumen bahwa menjunjung tinggi prinsip-prinsip ASEAN, seperti *non-interference in internal affair, non-use of force, peaceful settlement of disputes, and regional solution for regional*

---

<sup>16</sup> C. Liss, 'The privatisation of maritime security in Southeast Asia: the impact on regional security cooperation,' *Australian Journal of International Affairs*, vol. 68, no. 2, 2013, pp. 194-209.



*problem*, menjadikan negara-negara di Asia Tenggara tidak saling menyerang. Menurut Simon, keamanan regional Asia Tenggara dapat tercipta karena efektifitas ASEAN dan kerja sama keamanan seperti *Asean Regional Forum* (ARF) yang berimplikasi pada tidak terjadinya perang antarnegara.<sup>17</sup>

Berfokus pada unit analisis yang sama adalah tulisan See Seng Tang yang berjudul *ASEAN, the United Nations and the Security of Southeast Asia: Problem, Prospect and Paradox*. Tang menemukan sesuatu yang sama dengan Simon, namun penekanannya lebih kepada hubungan antara Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan ASEAN dalam berkolaborasi untuk menciptakan keamanan. Kolaborasi antara ASEAN dan PBB dengan agenda keamanan di kawasan Asia Tenggara telah menghindarkan Asia Tenggara dari perang. Kolaborasi tersebut merupakan intervensi organisasi internasional ekstra-regional yang mengubah situasi antara pemerintahan regional dan pemerintahan organisasi ekstra-regional. Tang memberikan contoh pada kasus perebutan kuil Preah Vihear yang terletak di perbatasan antara Kamboja dan Thailand. Sengketa yang sempat diwarnai oleh kontak senjata militer kedua negara akhirnya dikembalikan ke ASEAN dan diselesaikan secara multilateral. Sekalipun Tang melihat

---

<sup>17</sup> S.W. Simon, 'Security prospects in Southeast Asia: Collaborative efforts and ASEAN regional forum,' *The Pacific Review*, vol. 11, no. 2, 2007, pp. 195-212.

bahwa kerja sama ASEAN dan PBB kurang sukses dalam mengembangkan agenda perdamaian, tetapi Asia Tenggara tidak berperang.<sup>18</sup>

Literatur selanjutnya dengan unit analisa yang serupa adalah artikel Kai He, *Institutional Balancing and International Relations Theory: Economic Interdependence and Balance of Power Strategies in Southeast Asia*. Kai He menemukan bahwa interdependensi ekonomi memengaruhi perilaku negara-negara anggota ASEAN dalam bertindak. Kerugian dan keuntungan menjadi pertimbangan setiap negara dalam membuat suatu “kebijakan keras” seperti perang. Kai He juga menemukan bahwa neorealisme dan neoliberalisme, atau kolaborasi antara kekuatan dan saling ketergantungan ekonomi, telah menciptakan keamanan di Asia Tenggara.<sup>19</sup>

Tulisan Buszynski dan Jenne telah menunjukkan bahwa Asia Tenggara memiliki konflik perbatasan yang mempunyai alasan yang vital, yaitu menyangkut kedaulatan teritorial. Sementara itu, Bateman dan Liss berargumen bahwa Asia

---

<sup>18</sup> S.S. Tang, ‘ASEAN, the United Nations and the Security of Southeast Asia: Problem, Prospect and Paradox,’ dalam P.D. Lombaerde, F. Baer & T. Felicio (eds.), *The United Nations and The Regions*, Springer, London, 2012, pp. 157-163.

<sup>19</sup> K. He, ‘Institutional Balancing and International Relations Theory: Economic Interdependence and Balance of Power Strategies in Southeast Asia,’ *European Journal of International Relations*, vol. 14, no. 3, 2013, pp. 489-518.

Tenggara memiliki isu keamanan yang tidak dapat diabaikan, namun harus dijadikan sebagai isu utama. Hasil penelitian yang paling mendekati objek riset, yaitu dari Simon, menemukan bahwa efektifitas ASEAN adalah penyebab terciptanya keamanan di Asia Tenggara. Pada unit eksplanasi yang sama, Tang meyakini bahwa keamanan di Asia Tenggara dimungkinkan oleh kolaborasi rezim internasional dan rezim regional, sedangkan Kai He menemukan bahwa perang tidak terjadi di Asia Tenggara karena interdependensi ekonomi dan kekuatan militer setiap negara-negara kawasan.

Pada unit analisis yang serupa peneliti berusaha menjelaskan “anomali keamanan di Asia Tenggara”: konflik perbatasan, politik keamanan dan ketegangan di kawasan tidak menimbulkan perang karena keberadaan “*intrusive system.*” Menurut Louis Cantori dan Steven Spiegel, “*an intrusive system consist of the politically significant participation of external power in the international relations of the subordinate system.*”<sup>20</sup> Cantori dan Spiegel menjelaskan bahwa negara-negara intrusif eksternal kawasan memiliki partisipasi politik yang signifikan dalam hubungan internasional di negara-negara kawasan. Intervensi negara-negara *great power* eksternal kawasan sebagai sistem intrusif

---

<sup>20</sup> L.J. Cantori & S.L. Spiegel, *The International Politics of Regions*, Prentice-Hall, New Jersey, 1970, p. 15.

akan sangat memengaruhi perilaku negara-negara kawasan Asia Tenggara. Negara-negara berkekuatan besar tersebut menciptakan sistem intrusif yang berakibat pada *deterrence*, mencegah terjadinya perang antarnegara kawasan Asia Tenggara. Inilah yang kemudian menjadi kerangka fokus penulis untuk meneliti anomali keamanan tersebut dalam tulisan ini.

Dari berbagai tulisan sengketa wilayah laut di LCS, salah satunya adalah Ramses Amer yang berjudul '*China, Vietnam, and the South China Sea: Disputes and Dispute Management*'. Amer menjelaskan bahwa hubungan Cina – Vietnam dalam kasus LCS menarik perhatian khusus. Konflik wilayah laut yang diklaim oleh kedua negara membuat konflik yang berkepanjangan. Amer menemukan bahwa kedua negara telah melakukan kesepakatan sesuai DOC 2002, namun sengketa perbatasan Sino-Vietnam terus terjadi pada tahun 2009-2011. Upaya penyelesaian telah dilakukan pada bulan oktober 2011 dengan sebuah perjanjian yang didasarkan pada prinsip-prinsip dasar, namun hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penyelesaian konflik tersebut akan mengalami kebuntuan karena kedaulatan teritorial.

Pada unit analisis yang sama mengenai konflik wilayah laut di LCS, Leszek Buszynski dalam artikel yang berjudul '*Rising Tensions in the South China Sea: Prospects for a*

*Resolution of the Issue.*' Buszynski menjelaskan bahwa konflik LCS yang disebabkan klaim tumpang tindih antara Malaysia, Filipina, Vietnam, dan Cina sering mengalami kebuntuan dalam resolusi konflik. Sehingga negara-negara berkonflik akan terus-menerus dalam kondisi tegang. Cina mengklaim Spratly dan kepulauan Paracel serta perairan sekitarnya dan telah menghadirkan militernya di LCS sebagai upaya mencegah pengklaim lainnya. Sedangkan Malaysia, Vietnam, dan Filipina juga mengklaim wilayah LCS sebagai bagian teritorial masing-masing. Dalam kasus tersebut, Buszynski menemukan bahwa resolusi konflik yang mengalami kebuntuan tersebut berdampak serius pada sengketa berkepanjangan yang didasarkan pada 'fragmentasi kepentingan nasional.'<sup>21</sup>

Berfokus pada unit analisis yang sama, tulisan Ang Cheng Guan, dengan judul '*The South China Sea Dispute Revisited*', menjelaskan wilayah LCS sudah diidentifikasi sebagai potensi masalah, namun hal tersebut bukanlah masalah keamanan yang serius di tahun 1970-1980-an, misalnya klaim Cina dan Vietnam terhadap wilayah Paracel tidak cukup mengancam. Situasi mulai berubah saat okupasi Vietnam di Kamboja dan kehadiran Uni Soviet di kawasan

---

<sup>21</sup> L. Buszynski, 'Rising Tensions in the South China Sea: Prospects for a Resolution of the Issue,' *Security Challenges*, vol. 6, no. 2, 2010, hal. 85-104.

Asia Tenggara Daratan (ATD). Guan, menemukan bahwa situasi tersebut berbeda dengan 'hari ini 'karena pengaruh posisi tawar Cina di kawasan tinggi, sehingga Cina dianggap sebagai ancaman *status quo*, perdamaian, dan stabilitas wilayah LCS<sup>22</sup>.

Selain itu, tulisan Choon-ho Park, yang berjudul '*The South China Sea Disputes: Who Owns the Islands and the Natural Resources?*', 'menjelaskan sejak 1974, Cina sudah agresif di LCS untuk mengklaim kepulauan Spratly dan Paracel. Hal tersebut menuai klaim dari Vietnam yang berdampak pada ketegangan politik tingkat tinggi. Park, menemukan bahwa UNCLOS 1982 memberikan dampak negatif pada klaim batas wilayah laut sehingga klaim kepemilikan wilayah LCS akan tetap bermasalah.<sup>23</sup>

Literatur selanjutnya yang memiliki keterkaitan topik dengan penelitian ini adalah tulisan-tulisan menyangkut isu perdamaian di LCS. Reviu ini menunjukkan bahwa kawasan Laut Cina Selatan diwarnai isu-isu menyangkut perdamaian. Zhiguo Gao, misalnya, menjelaskan pilihan di LCS; konflik atau kerja sama dalam artikelnya yang berjudul '*The South*

---

<sup>22</sup> A. C. Guan, 'The South China Sea Dispute Revisited,' *Australian Journal of International Affairs*, vol. 54, no. 2, 2000, hal. 201-215

<sup>23</sup> C. H. Park, 'The South China Sea Disputes: Who Owns the Islands and the Natural Resources?', *Ocean Development & International Law*, vol. 5, no. 1, 2009, hal. 27-59

*China Sea: From Conflict to Cooperation?*. 'Ia menemukan bahwa konflik klaim wilayah laut di kepulauan Spratly merupakan lanjutan konflik dari 'perang dingin. 'Negara-negara yang berkonflik dalam perebutan kepulauan Spratly melakukan aksi-aksi untuk menciptakan 'ketakutan dalam pikiran. 'Gao, merekomendasikan bahwa resolusi konflik paling efektif yaitu melakukan kerja sama bilateral atau multilateral.<sup>24</sup>

Di samping artikel Gao, yang merekomendasikan kerja sama untuk perdamaian, Sam Bateman dalam fokus analisis yang sama menjelaskan isu perdamaian di LCS dengan artikel yang berjudul '*Regional Maritime Security: Threats and Risk Assessments*. 'Ia menunjukkan temuannya bahwa wilayah LCS yang termasuk dalam konflik negara-negara Asia Tenggara memiliki tingkat sengketa perbatasan yang tinggi, khususnya mengenai tapal batas maritim. Selain itu, Ia menemukan bahwa perairan Asia Tenggara khususnya LCS merupakan perairan yang penting bagi negara-negara di dunia karena merupakan jalur laut perdagangan global. Dalam isu perdamaian negatif di LCS, Bateman merekomendasikan agar

---

<sup>24</sup> Z. Gao, 'The South China Sea: From Conflict to Cooperation?', '*Ocean Development & International Law*, vol. 25, no. 3, 1994, hal. 345-359

negara-negara berkonflik meningkatkan alutsista militer agar dapat menjadi *deterrence* bagi negara lain.<sup>25</sup>

Pada isu perdamaian negatif yang sama, Stein Tonnesson, dalam artikel yang berjudul '*China and the South China Sea: A Peace Proposal*, 'menjelaskan konflik di LCS harus mendapat perhatian khusus karena setiap konflik dapat diselesaikan. Ia mengemukakan bahwa konflik wilayah Spratly antara Cina dan negara-negara Asia Tenggara (Brunei, Malaysia, Filipina), dan konflik kepulauan Paracel antara Cina dan Vietnam akan tetap terjadi karena kebijakan luar negeri Cina tidak terlalu berfokus pada negosiasi untuk tujuan resolusi konflik. Dalam temuannya, Cina lebih berfokus; memblokir atau menunda upaya ASEAN untuk memulai pembicaraan multilateral; memperingatkan campur tangan asing dalam perselisihan di LCS; dan untuk waktu ke waktu melambatkan bendera pembangunan bersama. Ia merekomendasikan untuk mengalihkan isu konflik ke 'pendekatan lingkungan. 'Meskipun, pendekatan ini tidak memberikan kontribusi besar pada perdamaian di LCS, namun

---

<sup>25</sup> S. Bateman, *Regional maritime security: threats and risk assessments*, Faculty of Law, University of Wollongong, 2010, <<http://ro.uow.edu.au/lawpapers/411/>>, diakses pada 19 Oktober 2015.



pendekatan ini dapat membangun kepercayaan pada negara-negara berkonflik untuk menciptakan zona perdamaian.<sup>26</sup>

Literatur berikutnya yang merupakan karya pembanding menyangkut tidak terjadinya perang di LCS dan hadirnya perdamaian negatif dalam situasi konflik dan ketegangan yang tinggi. Salah satunya adalah artikel Zhao Hong, berjudul '*The South China Sea Dispute and China – ASEAN Relation*'. Hong menemukan bahwa ketegangan dan konflik di LCS tidak berdampak pada perang terbuka karena adanya interdependensi antara Cina dan ASEAN. Negara-negara berkonflik seperti Filipina, Vietnam, dan Malaysia memiliki hubungan dengan Cina melalui kerangka ASEAN China FTA. Dengan demikian, hadirnya perdamaian tanpa perang di LCS karena adanya interdependensi aktor non negara ASEAN dan Cina.<sup>27</sup>

Untuk menguatkan temuan Hong, literatur yang mendukung pernyataan Hong adalah artikel Kai He, yang berjudul '*Institutional Balancing and International Relations Theory: Economic Interdependence and Balance of Power Strategies in Southeast Asia*'. Ia menemukan bahwa interdependensi ekonomi berpengaruh pada perilaku negara-

---

<sup>26</sup> S. Tonnesson, 'China and the South China Sea: A Peace Proposal,' *Security dialogue*, vol. 31, no. 3, 2000, hal. 307-326

<sup>27</sup> Z. Hong, 'The South China Sea Dispute and China – ASEAN Relation' *Asian Affairs*, vol. 44, no.1, 2013, hal. 27-43

negara anggota ASEAN (Malaysia, Brunei, Filipina, dan Vietnam) dalam bertindak di LCS. Perang berdampak signifikan pada Kerugian ekonomi yang sudah dibangun sehingga perang bukanlah menjadi pilihan di LCS. Kai He juga menemukan bahwa neorealisme dan neoliberalisme, atau kolaborasi antara kekuatan dan saling ketergantungan ekonomi, telah menciptakan perdamaian di LCS.<sup>28</sup>

Berfokus pada unit analisis yang sama berkaitan dengan tidak terjadinya perang di LCS, Suisheng Zhao dalam artikel yang berjudul '*A New Model of Big Power Relations? China–US strategic rivalry and balance of power in the Asia–Pacific*, 'menjelaskan kehadiran Amerika Serikat sebagai 'polisi dunia 'telah memberikan dampak pada keseimbangan kekuatan dengan rivalnya Cina. Keseimbangan kekuatan tersebut berdampak pada tidak terjadi perang di LCS. Zhao menemukan bahwa hasil kompetisi antara Amerika Serikat dan Cina membuat kawasan Asia Pasifik, khususnya LCS memiliki stabilitas politik.<sup>29</sup> Pada unit analisis yang sama penulis berusaha menjelaskan 'Logosentrisme di Laut Cina

---

<sup>28</sup> K. He, 'Institutional Balancing and International Relations Theory: Economic Interdependence and Balance of Power Strategies in Southeast Asia,' *European Journal of International Relations*, vol. 14, no. 3, 2013, hal. 489-518.

<sup>29</sup> S. Zhao, 'A New Model of Big Power Relations? China–US strategic rivalry and balance of power in the Asia–Pacific,' *Journal of Contemporary China*, vol. 24, no. 93, 2015, hal. 377-397

Selatan. 'Bertujuan menemukan 'rezim kebenaran 'yang mempengaruhi perilaku negara-negara berkonflik di LCS. Metafisika kehadiran dan pemaknaan wacana modern yang stabil merupakan akar konflik di LCS sehingga penting untuk didekonstruksi secara ilmiah.

### **C. Sistem Intrusif**

Teori "sistem intrusif" yang dicetuskan oleh Louis Cantori dan Steven Spiegel merupakan kerangka regional untuk menjelaskan tidak pernah pecah perang di Asia Tenggara. Sistem intrusif merupakan salah satu sektor dari sistem subordinat suatu kawasan yang memiliki andil besar dalam menjawab permasalahan-permasalahan kawasan. Intervensi negara-negara eksternal berkekuatan besar pada suatu kawasan akan mempengaruhi perilaku maupun kebijakan negara-negara kawasan dalam bertindak keras. Pada pandangan realisme, hal ini akan menimbulkan *deterrence* dan keseimbangan kekuatan antarnegara kawasan sehingga dapat menciptakan keamanan. Cantori dan Spiegel berargumen bahwa partisipasi politik negara-negara ekstra kawasan sebagai sistem intrusif dapat menghasilkan dampak baik yang positif (stabilitas) maupun negatif (instabilitas).<sup>30</sup> Sistem intrusif yang berdampak pada hal yang negatif atau

---

<sup>30</sup> Cantori & Spiegel, p. 30.

perang antarnegara dalam suatu kawasan dapat ditelusuri, misalnya, di kawasan Timur Tengah. Sebab-sebab yang ditimbulkan oleh sistem intrusif di kawasan Timur Tengah dapat dijadikan referensi pembandingan untuk penelitian berikutnya. Sedangkan sistem intrusif yang memberikan dampak positif dalam suatu kawasan dapat ditelusuri pada fenomena keamanan di kawasan Asia Tenggara.

Menurut Cantori dan Spiegel, dalam suatu sistem kawasan bukan hanya terdapat sektor inti dan periferial, namun juga sistem intrusif yang merupakan wujud keterlibatan negara-negara besar ekstra kawasan. Terdapat dua bentuk partisipasi dari negara-negara ekstra kawasan, yaitu "*politically significant involvement and politically insignificant involvement.*"<sup>31</sup> Keterlibatan politik yang tidak signifikan biasanya tidak menghasilkan partisipasi politik yang berdampak pada keseimbangan kekuatan, sementara keterlibatan politik yang signifikan dapat menghasilkan partisipasi yang berdampak pada keseimbangan kekuatan dari sistem subordinat dan dapat mempengaruhi keseimbangan sistem dominan dalam suatu kawasan. Keterlibatan politik yang tidak signifikan dari negara ekstra kawasan biasanya ditandai dengan kerja sama dalam bentuk bantuan materi, perdagangan, investasi ekonomi, serta budaya dan

---

<sup>31</sup> Cantori & Spiegel, p. 25.

pendidikan. Hal-hal tersebut menurut Cantori dan Spiegel tidak mengandung unsur yang signifikan dan tidak berdampak pada keseimbangan kekuatan dalam suatu kawasan. Sementara itu, keterlibatan politik yang signifikan dari negara ekstra kawasan biasanya ditandai dengan kerja sama dalam bidang ekonomi dan militer, faktor kolonial, aliansi, komitmen pasukan militer, dan beberapa perjanjian antara negara intrusif dan regional. Partisipasi politik yang signifikan dari negara-negara ekstra kawasan yang membentuk sistem intrusif memberikan dampak pada keseimbangan kekuatan dan mempengaruhi perilaku negara-negara dalam suatu kawasan.

Cantori dan Spiegel juga menulis bahwa terdapat sembilan karakteristik atau indikator bagi negara-negara ekstra kawasan yang melakukan partisipasi politik dalam sebuah kawasan. Digunakan untuk menelusuri sistem intrusif yang signifikan dan tidak signifikan pada sebuah kawasan, kesembilan karakteristik atau indikator tersebut adalah “*multilateral arrangement; bilateral arrangement; trade and economic investment; possession of a colony; military intervention; subversion; the United Nations; cultural and education activities; and propaganda.*”<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Cantori & Spiegel, p. 26.

Partisipasi dalam bentuk pengaturan multilateral akan terjadi bila terdapat satu atau lebih negara kekuatan eksternal mengawasi suatu perjanjian atau sebuah organisasi untuk tujuan pertahanan atau usaha ekonomi di mana terdapat partisipasi negara non-kawasan dan negara kawasan. Sedangkan partisipasi kekuatan eksternal dalam bentuk pengaturan bilateral dapat dibagi menjadi partisipasi ekonomi, bantuan, bantuan militer, dan perjanjian kerja sama keamanan, yang kadang-kadang disertai pembentukan aliansi militer.

Indikator perdagangan dan investasi ekonomi merupakan salah satu instrumen yang paling signifikan dari dominasi kekuatan instrusif terhadap sistem subordinat. Selanjutnya, pada indikator kolonialisme, hingga berakhirnya Perang Dunia II, negara-negara besar masih melakukan sistem intrusif di kawasan yang dijajahnya. Cantori dan Spiegel menjelaskan bahwa faktor sejarah dapat menjadikan alasan negara-negara adikuasa untuk melakukan sistem intrusif pada sebuah kawasan. Indikator berikutnya, intervensi militer, berarti bahwa sebuah intervensi militer pada sebuah kawasan dapat dilihat sebagai bentuk sistem intrusif. Hal ini ditandai dengan keberadaan pangkalan-pangkalan militer negara-negara intrusif pada sebuah kawasan. Pada indikator ini terdapat tiga motivasi sebuah negara melakukan intervensi militer, yaitu memperluas wilayah kontrol, pemeliharaan

*status quo*, dan pemulihan kondisi sebelumnya akibat konflik atau perang.

Indikator subversi, yang terdiri dari penggunaan kekuatan rahasia oleh agen dari kekuatan eksternal, biasanya berupa bantuan pasukan salah satu negara kawasan untuk mengubah kondisi politik dalam suatu negara. Untuk indikator PBB, Cantori dan Spiegel mengatakan bahwa PBB sebagai lembaga internasional dianggap penting bagi negara-negara instrusif. Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah sebuah sarana negara-negara kuat untuk melakukan sistem intrusif di suatu kawasan. Kemudian, pada indikator budaya dan aktivitas pendidikan, Cantori dan Spiegel berpendapat bahwa kultur dan pendidikan merupakan cara yang halus bagi negara-negara berkekuatan besar untuk terlibat dalam sistem intrusif di sebuah kawasan. Negara-negara ekstra kawasan akan memberikan efek pada perubahan kultur dan pendidikan pada satu kawasan. Untuk indikator terakhir, disebutkan bahwa propaganda merupakan sebuah aktifitas negara ekstra kawasan untuk mencari pengaruh pada suatu kawasan.<sup>33</sup>

Kesembilan indikator di atas merupakan metode untuk menelusuri keterlibatan negara-negara kuat sebagai sistem intrusif di sebuah kawasan. Dari indikator-indikator tersebut, ada yang signifikan bagi sebuah kawasan, ada pula yang tidak.

---

<sup>33</sup> Cantori & Spiegel, pp. 26-30.

Variabel-variabel atau indikator-indikator yang signifikan dalam sebuah sistem intrusif akan sangat memengaruhi perilaku negara-negara kawasan dalam bertindak. Pola keterlibatan yang signifikan akan berdampak *deterrence* bagi negara-negara kawasan. Dalam konteks ini, Cantori dan Spiegel menulis bahwa keterlibatan negara-negara yang memiliki kekuatan besar sebagai sistem intrusif mempengaruhi hubungan internasional di sistem subordinat. Keterlibatan suatu negara ekstra kawasan secara signifikan dalam sistem subordinat akan menimbulkan keseimbangan kekuatan dalam sub-kawasan.

Berdasarkan argumen Cantori dan Spiegel, maka penulis mengelompokkan langkah-langkah sistem intrusif ke dalam tiga tujuan penting, yaitu (1) menentukan aktor-aktor ekstra kawasan sebagai sistem intrusif di kawasan Asia Tenggara, (2) menemukan proses keterlibatan partisipasi politik sistem intrusif di kawasan Asia Tenggara, dan (3) menganalisis dampak sistem intrusif tersebut terhadap tidak terjadinya perang di Asia Tenggara (lihat Tabel 1).



Tabel 1. Mekanisme sistem intrusif

Negara-negara Asia Tenggara	Sistem intrusif	Variabel/indikator signifikan	Dampak/implikasi
Indonesia Malaysia Singapura Filipina Brunei Darussalam Thailand Kamboja Vietnam Laos Myanmar	Amerika Serikat Cina Australia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengaturan multilateral</li> <li>• Pengaturan bilateral</li> <li>• Intervensi militer</li> <li>• Perdagangan dan investasi ekonomi</li> </ul>	Negatif Positif

Operasionalisasi sistem intrusif akan dijalankan dalam tiga langkah. Pertama, menentukan aktor-aktor ekstra kawasan sebagai sistem intrusif. Menurut Cantori dan Spiegel, negara-negara yang dapat melakukan sistem intrusif adalah negara-negara ekstra kawasan yang memiliki salah satu karakter dari kategori berikut: adidaya atau adikuasa (*super power, dominant powers*), kekuatan besar (*major powers*), kekuatan menengah (*middle powers*), atau kekuatan regional (*regional powers*). Pada kawasan Asia Tenggara dapat ditentukan bahwa negara-negara ekstra kawasan yang melakukan sistem intrusif dalam pola keterlibatan yang signifikan adalah Amerika Serikat, Cina dan Australia. Khusus Australia, walaupun sebenarnya tidak dapat

dikategorikan sebagai bagian dari sistem intrusif yang signifikan, namun dengan alasan aliansi *Five Power Defense Arrangement* (FPDA) dan geopolitik, dapat ditentukan di sini bahwa Australia merupakan bagian dari sistem intrusif di kawasan Asia Tenggara.

Kedua, menemukan proses keterlibatan partisipasi politik sistem intrusif di kawasan Asia Tenggara dengan berdasarkan pada metode-metode dan indikator-indikator sistem intrusif. Operasionalisasi kedua ini akan didasarkan pada indikator-indikator yang dianggap relevan untuk menelusuri keterlibatan negara ekstra kawasan di Asia Tenggara. Di sini, akan ditelusuri keterlibatan partisipasi Amerika Serikat, Cina, dan Australia dengan berdasar pada variabel atau indikator yang signifikan, yakni pengaturan multilateral atau aliansi pertahanan, pengaturan bilateral, indikator intervensi militer serta kerja sama dalam bidang perdagangan dan investasi ekonomi. Indikator-indikator di atas akan menuntun penelitian ini untuk menemukan proses interaksi antara sistem intrusif dan kawasan Asia Tenggara.

Ketiga, menganalisis dampak sistem intrusif tersebut terhadap tidak terjadinya perang di kawasan Asia Tenggara. Dampak positif dan atau negatif dari sistem intrusif akan dipakai sebagai alat analisis untuk menjawab pertanyaan penelitian dan membuktikan hipotesis penelitian. Selain itu,

dampak yang ditimbulkan oleh sistem intrusif akan dijadikan sebagai pijakan untuk menelusuri partisipasi negara-negara ekstra kawasan di kawasan Asia Tenggara. Implikasi positif yang ditimbulkan oleh sistem intrusif di kawasan Asia Tenggara adalah stabilitas, sementara dampak negatifnya berupa instabilitas, yang dapat terjadi jika sistem intrusif menimbulkan perang atau konflik antarnegara secara besar-besaran di Asia Tenggara. Peranan Amerika Serikat, Cina, dan Australia di kawasan akan diukur berdasarkan indikator-indikator yang signifikan, kemudian dianalisis dampak yang mereka timbulkan terhadap Asia Tenggara.

#### **D. Kekuasaan Foucault dan Bourdieu**

Kerangka pemikiran dasar untuk mengungkap diskursus 'metafisika kehadiran 'yang memiliki makna yang stabil adalah pendekatan "genealogi" yang dicetuskan oleh Michel Foucault. Genealogi merupakan analisis tentang peristiwa-peristiwa historis yang terjadi pada asal-usul suatu wacana, atau Foucault menyebut genealogi akan mengembangkan secara spesifik peristiwa yang menyertai setiap permulaan.<sup>34</sup> Secara sederhana, genealogi adalah suatu jenis pemikiran historis yang mengungkap dan mencatat signifikansi

---

<sup>34</sup> H.Y.Polimpung, *Asal Usul Kedaulatan*, Kepik, Depok, 2014, p. 75

hubungan antara kekuasaan dan pengetahuan. Genealogi berhubungan dengan suatu bentuk sejarah yang mengartikan sejarah atas hal-hal yang dianggap berada di luar sejarah, termasuk peristiwa-peristiwa yang terkubur, tertutup, atau menghilang dalam tekstualitas dan reproduksi sejarah.<sup>35</sup> Dengan bahasa lain, genealogi merupakan sejarah masa sekarang.

Dalam perspektif genealogi, sejarah tidak menunjukkan sebuah penyingkapan bertahap atas makna dan kebenaran. Sebaliknya, sejarah merupakan cerminan sebuah 'pengulangan dominasi tanpa akhir.' Sejarah adalah pengetahuan dominan yang secara terus menerus memiliki makna yang stabil dan dibungkus oleh kekuasaan, sehingga pengulangan dominasi adalah semata-mata hadir dari relasi kekuasaan dan pengetahuan. Foucault mengatakan bahwa tidak adanya sejarah besar tunggal, melainkan banyak jalinan sejarah yang bervariasi dalam relasi pengetahuan dan kekuasaan. Genealogi menunjukkan variasi alur sejarah yang masih bertahan dan telah ditutup dalam mempengaruhi perilaku subjek, objek, tindakan, dan ranah pengetahuan.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> S. Burchil & A. Linklater, *Teori-Teori Hubungan Internasional*, Nusa Media, Bandung, 2015, p. 247

<sup>36</sup> Burchil & Linklater, hal. 248

Pendekatan positivisme berupaya menjelaskan dengan mencari hukum-hukum umum untuk menjelaskan pengulangan sepanjang waktu dengan harapan dapat menemukan makna yang tertekan oleh ideologi dan struktur di balik sejarah. Genealogi berbeda posisi dengan positivisme dengan membantah bahwa sejarah dapat diidentifikasi maknanya berdasarkan hukum objektif. Teori genealogi merupakan pendekatan anti-esensialis, ia menekankan bahwa sebuah pengetahuan terjadi pada tempat dan waktu tertentu serta didominasi oleh sebuah perspektif. Ilmu pengetahuan selalu memiliki syarat sebagai konsekuensi mempertahankan eksistensinya dalam ranah pertarungan, sehingga tidak ada satu “kebenaran tunggal,” yang ada hanyalah perspektif dan “rezim kebenaran” yang saling bersaing.

Menurut Foucault, rezim kebenaran menunjukkan ketika pengetahuan dan kekuasaan sama-sama bertahan. Istilah tersebut merujuk pada diskursus yang diyakini sebagai kebenaran, sesuai dengan aturan dan kriteria yang menentukan proposisi yang benar dari yang salah, sehingga mempengaruhi pembentukan praktik.<sup>37</sup> Dalam oposisi biner, positivisme berusaha menunjukkan hitam – putih, salah – benar, dan sebagainya. Rezim kebenaran tidak mencari kebenaran tersebut, namun menunjukkan pertarungan

---

<sup>37</sup> Burchil & Linklater, hal. 248

kebenaran dalam sebuah ranah, dan menaklukan kebenaran lain. Diskursus yang menang akan mempengaruhi praktik aktor dalam bertindak. Terdapat pertempuran antara dan di dalam rezim kebenaran, di mana ada bangunan hierarki sehingga kekuasaan mempengaruhi klaim pengetahuan.

Postmodernisme membahas persoalan bagaimana sebuah perspektif menghasilkan representasi yang mencapai legitimasi dominan dan monopolis dengan memarjinalkan perspektif lain.<sup>38</sup> Hal ini menjelaskan bahwa wacana yang menang akan mendapatkan legitimasi sehingga menguburkan wacana lain. Oleh karena itu, bagi Foucault, sejarah adalah proses normalisasi; yang normal akan menjalani suatu proses untuk dijadikan “normal” – tidak ada sesuatu yang normal dengan sendirinya. Dengan demikian, genealogi Foucault berusaha melacak suksesi suatu diskursus yang dianggap normal dalam relasinya dengan kekuasaan. Atau dalam bahasa Polimpung, sejarah merupakan pertarungan wacana merebut tahta “kebenaran” yang hegemonik; sejarah penguburan wacana-wacana yang kalah; sejarah stigmatisasi rendah wacana-wacana minor.<sup>39</sup> Ia menjelaskan bahwa ilmu

---

<sup>38</sup> A.Y. Lubis, *Postmodernisme: Teori dan Metode*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, p. 74

<sup>39</sup> Polimpung, p.76

pengetahuan dapat dijadikan sebagai instrumen pendisiplinan dan pelatihan untuk menaklukkan dan membuat kepatuhan.

Penelitian genealogi Foucault terdapat beberapa variabel yang saling terkait; kekuasaan – pengetahuan dan asal usul. Dalam buku *Discipline and Punish*, Foucault mengemukakan bahwa kekuasaan (*power*) terspesialisasi melalui ilmu pengetahuan. Ia menyebutnya hukum imanensi (*rule of immanence*). Dengan demikian kekuasaan terdesentralisasi dan terpluralisasi.<sup>40</sup> Agar individu-individu didisiplinkan dan dinormalkan. Bagian ini bertujuan mendapatkan informasi kekuasaan yang heterogen.<sup>41</sup> Asal usul menunjukkan pencarian secara historis mengenai asal usul pengetahuan dominan, filsafat, ilmu-ilmu sosial, konsep, nilai, dan moralitas. Ini bukanlah bertujuan menemukan rahasia atau esensi yang abadi (metafisika) tetapi satu esensi yang membuktikan bahwa sejarah tidak memiliki esensi. Pencarian asal usul merupakan variabel penting untuk menemukan dengan pasti pengetahuan apa yang mengikuti suatu peristiwa berkepanjangan dan memiliki makna yang stabil.

Di samping itu, Foucault menjelaskan bahwa ‘bahasa’ sebagai sistem-sistem pemikiran dan/atau sistem gagasan

---

<sup>40</sup> Burchil & Linklater, p.248

<sup>41</sup> Lubis, p.80

yang berkaitan satu dan lain, memberikan kita pengetahuan atau pemaknaan atau interpretasi tentang dunia. Bahasa menurut Foucault adalah tatanan wacana yang merupakan jalan kita untuk menjelaskan realitas. Bahasa yang dimaksudkan Foucault bukanlah bahasa yang dimengerti strukturalis; bahasa Prancis, Inggris, Indonesia, Jerman, dan bahasa lain.<sup>42</sup> Melainkan terdapat diskursus sebagai bentuk pengetahuan yang khas dalam cara berpikir dan berperilaku setiap hari. Bentuk pengetahuan/diskursus tersebut seperti wacana (bahasa) liberalisme, wacana realisme, wacana marxisme, wacana kulit putih, dan lain-lain. Dengan demikian, kuasa wacana adalah faktor pembentuk perilaku kita. Terdapat beragam wacana/diskursus yang membentuk para aktor untuk berkonflik, sehingga penting untuk menelusuri wacana dan kuasa wacana yang membentuk perilaku aktor untuk berkonflik.

Pemikiran lain yang menarik dan mampu menjelaskan terjadinya konflik adalah pemikiran kekuasaan yang dicetuskan oleh Pierre Felix Bourdieu. Ia menjelaskan kekuasaan bukanlah sesuatu yang dipahami oleh pemikir strukturalis, namun, kekuasaan adalah sebuah dominasi wacana yang terlegitimasi dan melalui proses dalam arena

---

<sup>42</sup> Lubis, p.83-86



pertarungan.<sup>43</sup> Dengan kata lain, 'wacana' adalah kekuasaan yang sebenarnya. Bourdieu menguraikan kekuasaan dalam tiga hal penting; habitus, kapital, dan arena. Ketiga variabel ini akan digunakan untuk menemukan 'kuasa budaya lokal' yang mempengaruhi perilaku aktor negara untuk tidak mendeklarasikan perang terbuka.

Dalam buku berjudul *Choses Dites*, Bourdieu menjelaskan konsep habitus adalah upaya untuk mensintesis dualisme antara agen/aktor dan struktur. Di mana, keduanya adalah sama-sama penting dan tidak ada analisis oposisi biner untuk mencari kebenaran di satu pihak. Habitus adalah pembiasaan nilai-nilai sosial budaya yang dimainkan terus-menerus mengikuti permainan yang dilakukan. Hal ini dilakukan untuk mengatasi kekeliruan yang mempertentangkan agen dan struktur. Habitus mencakup segala jenis aktivitas budaya; produksi; persepsi; dan evaluasi terhadap praktik hidup sehari-sehari. Habitus adalah nilai yang meresap dalam pikiran, perasaan, dan estetika seseorang, sehingga berdampak pada perilaku untuk mencapai hasrat. Bourdieu mengungkapkan bahwa habitus terjadi dalam ruang sosial melalui pengalaman yang terjadi dalam waktu yang lama. Pengalaman-pengalaman sosial tersebut membentuk *doxa* yang kemudian mengontrol agen. *Doxa* adalah skema-

---

<sup>43</sup> Lubis, hal. 94

skema pemikiran dan persepsi yang dihasilkan oleh struktur-struktur sosial. Dengan demikian, agen/aktor bersifat memproduksi wacana yang dipengaruhi oleh lingkungan budaya, sebaliknya menjadi *doxa* untuk mengontrolnya.

Kapital atau modal adalah aset yang penting digunakan sekelompok orang atau agen untuk mencapai dominasinya. Terdapat beberapa kapital menurut Bourdieu; kapital ekonomi, sosial, dan kultural atau simbolik. Kapital ekonomi berkaitan dengan kepemilikan harta benda yang dimiliki oleh seseorang. Kapital sosial adalah seseorang yang memiliki modal ekonomi dan budaya. Kapital budaya atau kekuasaan simbolik adalah kemampuan verbal, ketrampilan, pendidikan, dan pengetahuan yang dimiliki seseorang. Bourdieu menjelaskan bahwa satu jenis kapital dapat membaur dengan kapital lain. Misalnya seseorang yang memiliki semua kapital; ekonomi, sosial, dan kultural. Untuk mencapai kekuasaan adalah pertarungan dan perebutan dalam arena tertentu yang terdapat *doxa* (struktur mapan) dalam arena tersebut.<sup>44</sup> Bangunan konstruksi bahasa di dalam arena yang akan membedakan dengan struktur dominan yang sudah terlegitimasi.

Arena/ranah/*field* adalah ruang pertarungan wacana-wacana dominan dan wacana lain yang di dalamnya memiliki

---

<sup>44</sup> Lubis, p.117

beberapa indikator khusus; strategi konservasi adalah upaya untuk mempertahankan wacana dominan atau *doxa*; suksesi merupakan upaya untuk mencapai kekuasaan dengan menggunakan kapital; sedangkan subversi adalah salah satu upaya untuk meruntuhkan struktur yang sudah matang atau dengan menawarkan reproduksi wacana. Ia diyakini sebagai ortodoxa atau sebuah keyakinan tentang sesuatu yang benar.<sup>45</sup> Di dalam arena selalu terjadi pertempuran wacana karena terdapat heterodoxa atau banyaknya skema-skema pemikiran dan persepsi yang dihasilkan oleh struktur-struktur sosial objektif.

Dengan demikian, tergabungnya habitus dan kapital di dalam arena akan menghasilkan wacana dominan yang mencapai legitimasi. Pemikiran Foucault dan Bourdieu memberikan pemahaman kepada 3 tujuan penting yaitu (1) menjelaskan rezim kebenaran atau diskursus modern dominan yang berkuasa, (2) menjelaskan diskursus lokal sebagai narasi minor yang memiliki skema pemikiran habitus, (3) menjelaskan adanya pertarungan wacana budaya modern dan lokal di arena pertarungan sehingga menghasilkan kuasa budaya (wacana).

Berdasarkan pengelompokan tersebut maka penulis berargumen bahwa terdapat beberapa hal penting yang

---

<sup>45</sup> Lubis, p.122

disampaikan Foucault dan Bourdieu. Pertama, Foucault mengatakan bahwa genealogi mengungkap metafisika kehadiran yang menjadi 'rezim kebenaran' bermakna stabil merupakan relasi kekuasaan dan pengetahuan. Bagian ini, akan mengungkap wacana dominan yang membentuk konflik berkepanjangan tanpa solusi dengan menjalankan variabel-variabel seperti kekuasaan dan asal usul. Ia berdasarkan data-data akurat yang berhubungan dengan relasi kekuasaan dan pengetahuan, juga akan mengungkap aspek historis teks-teks dominan tersebut. Langkah ini merupakan langkah dekonstruksi metafisika kehadiran, logosentrisme, dan makna yang stabil. Kedua, kajian postmodernisme dalam kedua teori ini merupakan kajian historis kultural, karena itu, tahap kedua adalah mengungkap teks lokal sebagai instrumen pembentuk perilaku negara atau individu. Pembuktian melalui indikator kekuasaan yang ditawarkan oleh Bourdieu yaitu habitus, kapital, dan arena.

## **BAB II**

### **DINAMIKA KONFLIK DAN KETEGANGAN POLITIK**

Asia Tenggara merupakan kawasan yang memiliki konflik dan ketegangan sangat tinggi. Hampir semua konflik yang terjadi di kawasan dianggap sukar untuk diselesaikan karena menyangkut teritorial negara. Kedaulatan menyangkut batas negara adalah sesuatu yang tetap dianggap penting. Oleh karena itu, konflik mengenai perbatasan negara diargumentasikan dapat menimbulkan perang untuk mencapai tujuan-tujuan atau menghasilkan konsekuensi-konsekuensi politik. Di samping itu, persaingan alat perang di setiap matra mewarnai fenomena kekuatan negara-negara di Asia Tenggara, sehingga menimbulkan ketegangan politik dan keamanan. Bab ini menunjukkan bahwa kawasan Asia Tenggara memiliki konflik yang melibatkan banyak negara maupun konflik yang melibatkan hanya dua-tiga negara.

#### **A. Konflik di Laut Cina Selatan**

Negara-negara Asia Tenggara seperti Malaysia, Brunei, Filipina, dan Vietnam dihadapkan pada ketegangan-ketegangan berkaitan masalah klaim wilayah di Laut Cina Selatan (LCS), khususnya sekitar Kepulauan Spratly. Konflik

Laut Cina Selatan disebabkan klaim tumpang tindih antara negara-negara Asia Tenggara dan Cina. Cina mengklaim kepulauan Spratly, kepulauan Paracel, dan perairan sekitarnya serta telah berusaha untuk mencegah pengklaim lainnya, sementara Vietnam, Filipina, dan Malaysia juga mengklaim perairan Laut Cina Selatan sebagai bagian dari wilayah mereka (lihat Gambar 1). Saling klaim ini berakibat pada konflik yang berkepanjangan dan dapat menimbulkan isu keamanan kedaulatan teritorial yang didasarkan pada kepentingan nasional yang strategis terkait batas negara.<sup>46</sup> Konflik dan ketegangan di Laut Cina Selatan merupakan sesuatu yang sukar diselesaikan hingga saat ini karena menyangkut kedaulatan teritorial dan kepentingan negara-negara yang berkonflik.

Kepentingan politik atau *power*, sebagaimana diasumsikan oleh realisme, menjadi nyata pada konflik Laut Cina Selatan. Setiap negara berusaha untuk mempertahankan dirinya dengan mengandalkan kekuatan masing-masing demi mempertahankan kedaulatan teritorial. Kepentingan politik setiap negara Asia Tenggara yang terlibat dalam mempertahankan klaim membuat konflik menjadi berkepanjangan. Sengketa Laut Cina Selatan memiliki potensi konflik yang lebih besar di kemudian hari, apalagi jika

---

<sup>46</sup> Buszynski, pp. 85-104.

dikaitkan dengan kepentingan ekonomi politik Cina di kawasan. Perang mungkin tidak dapat dihindarkan dari sengketa tersebut karena diplomasi dianggap gagal untuk mewujudkan perdamaian. Upaya-upaya penyelesaian melalui perundingan mulai melemah; perundingan dalam kerangka organisasi regional ASEAN tidak menghasilkan solusi ataupun kemajuan dalam forum-forum diplomasi. Misalnya, pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) 2012 di Phnom Penh, Kamboja, ASEAN tidak berhasil menyatukan pandangan soal perundingan dengan Cina menyangkut tata perilaku di wilayah sengketa Laut China Selatan.<sup>47</sup> Kondisi tersebut menimbulkan ketegangan di antara negara-negara yang bersengketa.

---

<sup>47</sup> 'KTT ASEAN Dibuka di Tengah Krisis Laut China Selatan,' *Wn.com* (daring), 2012, <<http://www.antaraneews.com/print/344033/ktt-asean-di-tengah-krisis-laut-china-selatan>>, diakses pada 24 Desember 2016.



Gambar 1. Peta konflik di Laut Cina Selatan<sup>48</sup>

Komandan Armada Pasifik Amerika Serikat (AS), Laksamana Scott Swift, mendesak Cina untuk menyelesaikan sengketa dengan beberapa negara Asia Tenggara terkait Laut Cina Selatan melalui pengadilan arbitrase. Pasalnya, beberapa negara semakin tergoda untuk menggunakan kekuatan militer dalam menyelesaikan sengketa teritorial laut tersebut dibandingkan melalui hukum internasional.<sup>49</sup> Pernyataan Swift merefleksikan kekhawatiran dari para ahli militer karena keadaan di Laut Cina Selatan dapat memicu perlombaan senjata untuk kepentingan penyelesaian sengketa

---

<sup>48</sup> 'Armed Class in the South China sea,' *Vietnam: Socio Economics Historys* (daring), 2012, <<https://socioecohistory.wordpress.com/tag/vietnam/>>, diakses pada 1 April 2016.

<sup>49</sup> J. Dwidyasa, 'Sengketa Laut China Selatan dinilai Picu Perlombaan Senjata,' *Okezone.com*, 15 Desember 2015, <<http://news.okezone.com/read/2015/12/15/18/1268309/sengketa-laut-china-selatan-dinilai-picu-perlombaan-senjata>>, diakses pada 24 Desember 2015.



dengan cara perang. Kemungkinan tersebut sangat mungkin karena masalah saling klaim yang tumpang tindih di Laut Cina Selatan (LCS) hingga kini belum ada solusinya. Swift merujuk pada langkah pemerintah Filipina yang telah mengajukan gugatan ke pengadilan arbitrase di Belanda terkait dengan program pembangunan pulau-pulau buatan di LCS oleh Cina. Filipina meminta pengadilan arbitrase untuk menegaskan haknya terhadap wilayah 200 mil dari garis pantai sesuai dengan ketentuan konvensi PBB.

Kepala Angkatan Bersenjata Malaysia menyebut pembangunan yang dilakukan Cina di wilayah sengketa Laut Cina Selatan sebagai “provokasi tak beralasan.”<sup>50</sup> Hubungan Cina dengan beberapa negara di Asia Tenggara, khususnya Filipina dan Vietnam, memburuk setelah Beijing menunjukkan agresivitas dalam membangun pulau buatan di wilayah perairan Kepulauan Spratly yang jadi sumber sengketa. Hal ini telah menimbulkan ketegangan antara pihak-pihak yang berkonflik hingga mendapat respon dari ASEAN. Akhirnya, diadakan negosiasi antara ASEAN dan Cina yang dilakukan dalam situasi yang sangat tegang. Cina dan Filipina saling menuduh pelanggaran terhadap kedaulatan teritorial

---

<sup>50</sup> ‘Malaysia Kritik ‘Provokasi’ China di Laut China Selatan,’ *CNN Indonesia* (daring), 18 Oktober 2015, <<http://www.cnnindonesia.com/internasional/20151018161659-106-85633/malaysia-kritik-provokasi-china-di-laut-china-selatan/>>, diakses pada 24 Desember 2015.

saat kapal ikan Cina diusir oleh Angkatan Laut AS yang sedang melakukan latihan bersama dengan militer Filipina di sekitar Laut Cina Selatan. Hal ini menuai peringatan dari Cina agar negara-negara lain tidak melakukan latihan militer dan patroli di sekitar area LCS.<sup>51</sup>

Sesungguhnya, upaya perdamaian untuk menghindari perang terbuka telah dilakukan beberapa kali oleh ASEAN dalam kerangka Forum Regional ASEAN (ARF). Pada bulan Juli 1994, Cina telah berkomitmen untuk menyelesaikan sengketa kepulauan Spratly dengan Vietnam atas dasar perundingan damai atau diplomasi. Pada tahun 1995, Cina setuju membahas sengketa Spratly dengan negara-negara ASEAN. Hal ini mengalami perkembangan sejak Cina menjadi tuan rumah dalam pembahasan sengketa Spratly pada tahun 1997. Pada tahun 1999, Cina dan ASEAN setuju mempertimbangkan prinsip-prinsip kode etik untuk LCS. Selain itu, pendekatan dengan memakai hukum internasional telah dilakukan, termasuk konvensi PBB tahun 1982 tentang hukum laut *Law of Sea* (LOS), yang telah diakui oleh Cina, Vietnam, Filipina, Malaysia, Indonesia, Singapura, dan Laos. Pendekatan lain seperti menggunakan pengadilan atau Mahkamah Internasional (ICJ) telah ditempuh oleh negara-

---

<sup>51</sup> N.H. Thao, 'Vietnam and the Code of Conduct for the South China Sea,' *Ocean Development & International Law*, vol. 32, no. 2, 2001, p. 105.

negara Asia Tenggara. Contohnya, persoalan Pulau Batu Putih antara Malaysia dan Singapura serta sengketa Sipadan-Ligitan antara Indonesia dan Malaysia yang dibawa ke Mahkamah Internasional.<sup>52</sup>

Pada bulan April 2004, wakil dari Divisi Asia Timur dan Pasifik Kementerian Luar Negeri Taiwan Lin Sung-Huan pada dua kesempatan bertemu dengan Huang Ru Li, Direktur Kantor Ekonomi dan Kebudayaan Vietnam di Taipei, menyampaikan permintaan agar pemerintah Vietnam dapat menahan diri untuk menghindari ketegangan di wilayah tersebut.<sup>53</sup> Vietnam adalah salah satu negara yang mengklaim wilayah sekitar Laut Cina Selatan, khususnya kepulauan Nansha. Ketegangan-ketegangan di Kepulauan Nansha sejak Vietnam menempatkan militernya di pulau tersebut semakin tinggi. Huang berusaha meredam ketegangan dengan melarang warga Vietnam untuk bepergian ke tempat tersebut. Namun, upaya ini tidak menjadi strategi perdamaian yang efektif; sengketa sulit untuk diselesaikan dengan cara-cara diplomasi.

Persoalan-persoalan politik maupun keamanan yang mewarnai sengketa LCS harus ditanggapi dengan serius karena menyangkut persoalan kedaulatan teritorial yang

---

<sup>52</sup> Thao, pp. 108-109.

<sup>53</sup> J.I. Chong, 'The South China Sea Disputes: Documents and Context,' *Chinese Law & Government*, vol. 46, no. 3, 2013, pp. 25-26.

merupakan bagian terpenting setiap negara. Sekalipun telah dilakukan berbagai upaya diplomasi, namun penyelesaian sengketa tersebut tidak mengalami kemajuan yang signifikan. Sengketa LCS terus berjalan walaupun ada upaya diplomatik dan hukum. Cina yang memiliki kepentingan ekonomi politik sangat besar akan tetap mempertahankan eksistensinya di area Laut Cina Selatan. Demikian juga Vietnam, Filipina, Brunei, dan Malaysia akan tetap melakukan patroli militer dengan bantuan pihak-pihak luar kawasan. Ketegangan politik dan keamanan di Laut Cina Selatan akan terus menjadi isu yang “panas” di kawasan Asia Tenggara, yang kelak mungkin akan memicu perang terbuka.

## **B. Konflik Bilateral atau Trilateral di Asia Tenggara**

Negara-negara di kawasan Asia Tenggara juga dihadapkan banyak ketegangan secara bilateral maupun trilateral. Indonesia dan Malaysia, misalnya, memiliki hubungan yang penuh dengan konflik sejak dahulu hingga saat ini. Kedua negara masih memiliki beragam ketegangan, mulai dari luka lama berkaitan dengan “Konfrontasi” di tahun 1960-an, perubahan status kepemilikan Pulau Sipadan dan Ligitan, masalah perbatasan di perairan Laut Sulawesi dan Kalimantan – termasuk blok Ambalat, saling mengklaim budaya, hingga persoalan yang menyangkut Tenaga Kerja

Indonesia (TKI). Persoalan kedua negara yang sering mengalami ketegangan tingkat tinggi adalah menyangkut sengketa teritorial maritim. Indonesia yang dikenal sebagai negara kepulauan akan mempertahankan identitas tersebut. Klaim Malaysia terhadap beberapa kepulauan di perbatasan menjadikan kedua negara bersitegang dalam menyelesaikan sengketa wilayah.

Ketegangan akibat sengketa wilayah pernah menghasilkan luka bagi bangsa Indonesia sejak perubahan status kepemilikan Pulau Sipadan dan Ligitan oleh keputusan Mahkamah Internasional. Sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan mencuat dalam pertemuan teknis hukum laut kedua negara tahun 1967, di mana masing-masing negara memasukan Pulau Sipadan dan Ligitan sebagai bagian teritorial mereka. Pada akhirnya kedua negara sepakat untuk memberikan *status quo* terhadap Pulau Sipadan dan Ligitan. Namun, Malaysia kemudian mendirikan tempat pariwisata di kedua pulau itu, yang dikelola oleh pihak swasta. Sementara itu, Indonesia berpandangan bahwa kedua negara tidak berhak membangun apa pun di kedua pulau. Peristiwa inilah yang mendasari sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan. Konflik dan ketegangan pun terjadi terus-menerus hingga dibawa ke Mahkamah Internasional pada tahun 1997. Dalam persidangan tanggal 17 Desember 2002, Malaysia menang dengan keberpihakan 16

hakim, sedangkan hanya satu hakim yang mendukung Indonesia.<sup>54</sup>

Pada konteks kawasan, Indonesia merupakan negara inti di Asia Tenggara. Menurut Cantori dan Spiegel, negara inti adalah “*a state or a group of state which form a central focus of the international politics within a given region.*”<sup>55</sup> Sektor inti biasanya terdiri dari satu negara atau kelompok negara dan ketika itu mereka merasa memiliki kebersamaan sosial, politik, ekonomi dan budaya atau kegiatan organisasi lainnya. Dalam satu kawasan biasanya terdapat lebih dari satu negara inti. Hal ini dapat dilihat dari peranan Indonesia di ASEAN maupun forum-forum turunannya. Namun demikian, Indonesia menjadi sangat reaktif sejak persoalan perbatasan dengan Malaysia tahun 2011. Bahkan, ketegangan Indonesia dengan Malaysia menyangkut sengketa teritorial masih mewarnai perdebatan hingga dalam forum ASEAN.<sup>56</sup> Indonesia saat ini memiliki beberapa potensi konflik dan di masa yang akan datang bisa saja meletus menjadi perang terbuka (lihat Gambar 2). Kasus Kepulauan Ambalat,

---

<sup>54</sup> ‘Sovereignty over Pulau Ligitan and Pulau Sipadan (Indonesia/Malaysia),’ *International Court of Justice* (daring), 2002, <<http://www.icj-cij.org/docket/files/102/7714.pdf>>, diakses pada 16 Maret 2016.

<sup>55</sup> Cantori & Spiegel, p. 20.

<sup>56</sup> M.J. Montesano & L.P. Onn (eds.), *Regional Outlook Southeast Asia*, ISEAS, Singapore, 2012, pp. 55-58.

misalnya, hampir saja membawa Indonesia dan Malaysia ke dalam konflik yang berkepanjangan.



Gambar 2. Potensi konflik Indonesia<sup>57</sup>

Persoalan perbatasan masih menduduki posisi teratas dalam penetapan kepentingan politik suatu negara, karena wilayah adalah salah unsur eksistensi sebuah negara. Pencaplokan wilayah adalah hal yang biasa terjadi di saat sebuah negara dianggap lemah dalam bidang militer maupun ekonomi. Konflik Ambalat antara Indonesia dan Malaysia adalah hal paling nyata yang dapat menimbulkan konflik besar atau perang kedua negara. Sengketa Ambalat terjadi pada tahun 2005 sampai 2009, di mana posisi Indonesia saat itu

---

<sup>57</sup> 'Provokasi Perbatasan Indonesia, By Design?,' *Kompasiana* (daring), 10 Februari 2014, <[http://www.kompasiana.com/ridwan78/provokasi-perbatasan-indonesia-by-design\\_5529b3b66ea834b961552cff](http://www.kompasiana.com/ridwan78/provokasi-perbatasan-indonesia-by-design_5529b3b66ea834b961552cff)>, diakses pada 24 Desember 2015.

dapat dianggap lemah karena masih menerima sanksi berupa embargo militer oleh Amerika Serikat dan sekutunya. Selain dengan Malaysia, Indonesia dihadapkan pada sengketa dengan Singapura, baik masalah batas teritorial maupun penamaan kapal perang. Pada tataran konflik multilateral, Indonesia memiliki potensi untuk terlibat secara aktif dalam konflik Laut Cina Selatan, khususnya menyangkut kepulauan Natuna yang bersinggungan dengan klaim wilayah laut oleh Cina.

Dalam kasus lain, Singapura juga memiliki berbagai konflik dengan negara-negara tetangganya, yaitu Indonesia dan Malaysia, seperti tragedi Orchard Road,<sup>58</sup> masalah reklamasi daratan dan ekspor pasir, kabut asap dari kebakaran hutan di Riau, klaim Singapura atas Pulau Batu Puteh (*Pedra Branca*) di Selat Johor, dan protes Singapura atas penamaan *Kapal Republik Indonesia (KRI) Usman Harun*.<sup>59</sup> Eksistensi Singapura di Asia Tenggara dihadapkan pada ancaman dan ketegangan dengan negara lain. Negara yang berpenduduk

---

<sup>58</sup> Tragedi Orchard Road adalah peristiwa pengeboman gedung Hongkong and Shanghai Bank yang disebut MacDonal House pada tanggal 10 Maret 1965. Gedung ini terletak di Orchard Road, Singapura. Sebuah bom waktu dipasang oleh dua orang anggota Korps Komando Operasi, Harun Said dan Usman Hj Mohd Ali, pada saat berlangsungnya Konfrontasi dengan Malaysia. Tiga orang meninggal dunia dan sedikitnya 33 orang luka-luka. Baca <http://archive.kaskus.co.id/thread/13463035/0/10-maret-menurut-sejarah-dunia-dan-indonesia>, diakses pada 1 April 2016.

<sup>59</sup> Haryono, p. 28.



tidak lebih dari 6 juta orang itu masih menyimpan beberapa potensi konflik dengan Indonesia dan Malaysia, termasuk persoalan tapal batas di Selat Malaka.

Inti sengketa di Selat Malaka mirip dengan sengketa Laut Cina Selatan, yaitu klaim kekuasaan teritorial yang tumpang tindih. Indonesia memiliki kepentingan geopolitik utama untuk menjaga keutuhan dan kesatuan negara dari semua sektor, yakni politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan, yang termanifestasi dalam Wawasan Nusantara. Dalam konteks ini, Selat Malaka merupakan kepentingan geopolitik Indonesia yang sangat vital. Secara geopolitik, Malaysia berusaha mempertahankan keutuhan wilayahnya yang dipisahkan Laut Natuna. Wilayah Semenanjung serta Sabah dan Serawak menjadi salah satu tantangan geopolitik yang harus dihadapi Malaysia di masa depan.

Selat Malaka adalah lautan yang terbentang antara Pulau Sumatera dan Semenanjung Malaya, serta terhubung dengan Laut Andaman di Samudera Hindia dan Selat Singapura hingga Laut Cina Selatan di Samudera Pasifik. Selat ini tergolong sangat panjang, sekitar 600 mil yang diukur dari Tanjung Jambuaye di Aceh sampai Tanjung Pergam, Pulau Bintan, atau dari Pulau Perak hingga Taman Datok, dengan lebar beragam, mulai dari titik terluas 126 mil sampai titik tersempit yang hanya 3,6 mil (lihat Gambar 3). Secara

geografis Selat Malaka adalah perairan yang dibatasi langsung oleh tiga negara berdaulat: Indonesia, Malaysia dan Singapura sebagai negara pesisir atau negara pantainya. Selain berbatasan langsung dengan wilayah daratan Indonesia, Malaysia dan Singapura, Selat Malaka juga merupakan wilayah perairan yang keseluruhannya berada di bawah status kontrol penuh yurisdiksi laut sekaligus menjadi perbatasan laut dari ketiga negara pantai tersebut. Selat Malaka memiliki nilai strategis ekonomi politik karena merupakan jalur transportasi internasional. Nilai-nilai strategis inilah yang menjadikan ketiga negara saling berebut kekuasaan di Selat Malaka.



Gambar 3. Selat Malaka<sup>60</sup>

Letak Selat Malaka menimbulkan berbagai macam permasalahan yang menyangkut pembagian keuntungan terkait pengawasan terhadap selat tersebut. Ketiga aktor yang bersama-sama mengawasi Selat Malaka tentu memiliki kepentingan politik maupun ekonomi yang hendak dicapai. Hans Morgenthau mengartikan kepentingan ini sebagai suatu perebutan kekuasaan. Ia mengatakan bahwa petunjuk utama yang membantu aktor negara menemukan jalannya melintasi alam politik internasional adalah konsep kepentingan yang diartikan dalam istilah “kekuasaan.”<sup>61</sup>

---

<sup>60</sup> J.A. Roach, ‘Enhancing Maritime Security in the Straits of Malacca and Singapore,’ *Journal of International Affairs*, vol. 59, no. 1, 2005, p. 98.

<sup>61</sup> H.J. Morgenthau (ed.), *Politik AntarBangsa*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2010, p. 5.

Perairan Selat Malaka sangat strategis karena merupakan satu dari beberapa rute alur laut utama dunia. Selat Malaka menopang beragam kepentingan dalam dunia kemaritiman; ia selalu ramai akan hiruk-pikuk banyak kapal dalam melakukan berbagai macam aktivitas kemaritiman. Menurut laporan dari pelabuhan Klang, pada tahun 1999 terdapat 43.965 kapal yang berlayar maupun transit di Selat Malaka. Jumlah ini meningkat menjadi 55.957 kapal (tahun 2000), 59.314 kapal (2001), 60.034 kapal (2002), 62.334 kapal (2003), dan 63.636 kapal (2004). Jumlah ini turun menjadi 62.621 kapal (2005) untuk kembali meningkat menjadi 65.649 kapal (2006) dan 70.718 kapal (2007). Jumlah kapal yang melintasi Selat Malaka diperkirakan akan terus mengalami peningkatan hingga mencapai angka 316.700 kapal di tahun 2024 dan 1.300.000 kapal pada tahun 2083.<sup>62</sup>

Nilai-nilai strategis Selat Malaka menjadikan ketiga negara pantai sering mengalami kebuntuan dalam menetapkan batas masing-masing negara di Selat Malaka. Misalnya, pada tanggal 11 April 2011 aparat Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Badan Koordinasi Keamanan Laut menangkap dua kapal ikan asal Malaysia di wilayah perairan Indonesia. Kapal pertama adalah KM KF 5325 tanpa bendera

---

<sup>62</sup> N. Khalid, *To Serve And To Be Protected: A Comprehensive Perspective on Security in The Strait of Malacca*, Maritime Institute of Malaysia, Kuala Lumpur, 2008, p. 6.

dengan bobot 75,8 ton, sedangkan kapal kedua, yaitu KF 5195, berbobot 63,8 ton. Namun, penangkapan itu langsung direspon oleh Malaysia. Aparat Indonesia dikejar oleh dua helikopter Maritim Malaysia dan satu helikopter tempur Tentara Laut Diraja Malaysia dengan persenjataan lengkap. Alasannya, kapal ikan yang ditangkap pemerintah Indonesia beroperasi di wilayah Malaysia.<sup>63</sup> Batas-batas negara yang jelas akan menguntungkan negara-negara tersebut secara politik maupun ekonomi. Ini antara lain tercermin pada upaya Indonesia mengusung konsep pengaturan multilateral, yaitu *Mallaca Strait Security Initiative* (MSSI), sebagai tindakan untuk mewujudkan kepentingan Indonesia di Selat Malaka. Sebuah permasalahan yang kompleks, potensi konflik perbatasan di Selat Malaka dapat menyebabkan konflik dalam skala yang lebih besar lagi.

Pada bagian lain, Filipina pernah dihadapkan pada berbagai konflik dan ketegangan dengan Malaysia menyangkut klaim Filipina atas wilayah Kesultanan Sabah di Malaysia Timur. Pada tahun 2013, konflik dan ketegangan yang melibatkan para pengikut Kesultanan Sulu yang selama ini berdomisili di Filipina menggemparkan wilayah Lahad

---

<sup>63</sup> 'Penangkapan Kapal Malaysia, Percepat Penyelesaian Tapal Batas,' *Wilayah Perbatasan*, 2011, <<http://www.wilayahperbatasan.com/penangkapan-kapal-malaysia-percepat-penyelesaian-tapal-batas/>>, diakses pada 1 April 2016.

Datu, Sabah, Malaysia. Para pengikut Kesultanan Sulu ini berniat merebut kembali wilayah Sabah yang dianggap sebagai merupakan tanah leluhur mereka. Kesultanan Sulu menganggap Sabah adalah tanah kesultanan yang disewakan kepada Malaysia. Kesultanan ingin memutuskan kontrak, sedangkan Malaysia tidak mau karena wilayah tersebut telah menjadi bagian teritorialnya sejak lama.<sup>64</sup>

Wilayah Sabah masuk menjadi kekuasaan Kesultanan Sulu pada tahun 1658 atas pemberian Sultan Brunei sebagai tanda terima kasih atas bantuan para pejuang Tausug asal Sulu dalam melawan pemberontakan antara tahun 1660 hingga awal 1700-an di Brunei. Pada tahun 1878, di masa penjajahan Inggris, wilayah Sabah disewa oleh *British North Borneo Company* dengan membayarkan uang sewa senilai \$1.600 per tahun. Uang sewa harus dibayarkan terus-menerus selama Sabah masih dikuasai perusahaan tersebut. Tetapi, terdapat kesalahan interpretasi dari pihak Inggris, yang menganggap uang yang telah dibayarkan adalah untuk mengubah status kepemilikan. Hal ini berbeda dengan klaim Sultan Sulu yang berlandaskan sejarah. Ketegangan meningkat setelah pecahnya kontak senjata antara tentara Kesultanan Sulu

---

<sup>64</sup> E.S. Fernandez, 'Philipine/Malaysia dispute offer Sabah: a bibliographic survey,' *Asia Pasific Social Science*, vol. 7, no. 2, 2007, p. 55.

dengan Polis Diraja Malaysia yang mengakibatkan tewasnya delapan personel polisi Malaysia.<sup>65</sup> Peristiwa inilah yang memicu konflik yang besar antara kesultanan Sulu dan pemerintah Malaysia. Respon pemerintah Malaysia yang menggunakan kekuatan militer telah menimbulkan banyak korban jiwa. Sengketa Sabah adalah konflik yang berdasarkan pada sejarah, namun ia telah membawa Filipina dan Malaysia pada posisi saling klaim. Kebijakan Kesultanan Sulu untuk merebut kembali wilayah Sabah telah menimbulkan konflik berdarah dan menempatkan hubungan diplomatik Filipina dan Malaysia pada posisi yang tegang dalam beberapa tahun. Pertikaian ini telah mengganggu stabilitas kawasan Asia Tenggara.

Konflik menyangkut tapal batas negara juga terjadi antara Brunei dan Malaysia. Kedua negara masih memiliki perbedaan pendapat mengenai batas wilayah tak bertanda di daratan Sarawak, Malaysia Timur, dan batas wilayah perairan ZEE. Sengketa serupa juga terjadi antara Thailand dan Malaysia. Konflik perbatasan juga berlangsung antara Myanmar dengan Thailand, Laos dengan Thailand, serta Vietnam dengan Kamboja di wilayah perbatasan masing-

---

<sup>65</sup> R. Roza, 'Konflik Sulu-Malaysia: Ancaman Terhadap Keamanan Kawasan?', *P3DI*, vol. 5, no. 5, 2013, p. 6.

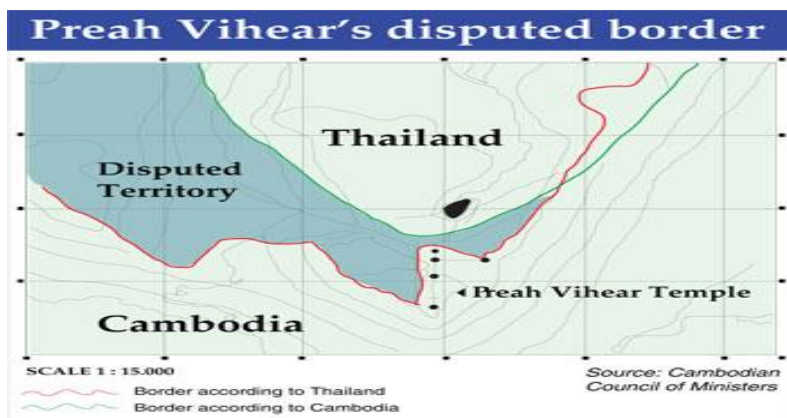
masing negara.<sup>66</sup> Kamboja dan Thailand dihadapkan pada konflik dan ketegangan yang berkaitan dengan perebutan kuil Hindu di Preah Vihear hingga sempat terjadi baku tembak sesaat di perbatasan kedua negara yang menimbulkan beberapa korban. Namun, kontak senjata yang terjadi bukanlah sebuah perintah yang terorganisir. Konflik perebutan wilayah Preah Vihear ini bisa menimbulkan pecahnya perang kedua negara. Pada tahun 2008, dalam usaha mempromosikan tempat wisata bagi para wisatawan lokal maupun manca negara, Preah Vihear dijadikan sebagai Tapak Warisan Dunia oleh *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization* (UNESCO). Hal ini diberikan kepada Kamboja menyusul keputusan ICJ, yang awalnya enggan untuk membuat keputusan mengenai siapa yang mempunyai kedaulatan atas kawasan seluas 4,6 km<sup>2</sup> tersebut.<sup>67</sup> “Kemenangan” Kamboja mendorong situasi yang rawan, dalam waktu singkat kedua negara terlibat konflik seputar kepemilikan wilayah Preah Vihear (lihat Gambar 4).

---

<sup>66</sup> Haryono, p. 28.

<sup>67</sup> C.A. Thayer, *The Cambodian People's Party Consolidates Power*, ISEAS, Singapore, 2009, p. 91.





Gambar 4. Peta konflik Preah Vihear<sup>68</sup>

Kuil Hindu terletak di provinsi Preah Vihear, Kamboja dan dekat distrik Kantharalak, Thailand. Saling klaim yang tumpang tindih dari kedua negara berujung pada konflik perbatasan. Klaim kamboja terhadap wilayah di sekitar kuil berdasarkan peta tahun 1907 yang dibuat oleh Perancis, sementara klaim Thailand didasarkan pada peta tahun 1904.<sup>69</sup> Konflik memanans sejak tahun 2008 karena Thailand dan Kamboja menempatkan militer masing-masing di wilayah kuil Preah Vihear, yang segera disusul dengan baku tembak. Pada Agustus 2010, kedua negara bersepakat untuk melakukan gencatan senjata, namun kontak senjata antara

<sup>68</sup> 'Preah Vihear Dispute Border,' *Preah-Vihear* (daring), <<http://preah-vihear.com/home/mapsphotos/>>, diakses pada 27 Desember 2015.

<sup>69</sup> B. Borrel, 'The Battle Over Preah Vihear,' *Archaeological Institute of America*, vol. 66, no. 2, 2013, p. 56.

militer kedua negara terjadi lagi pada tanggal 4-6 Februari 2011. Dalam insiden ini terdapat 18 orang korban, yaitu 8 tentara Thailand, 9 tentara Kamboja, dan satu warga Thailand.<sup>70</sup>

Upaya ASEAN dan organisasi internasional telah meredam konflik di Preah Vihear untuk sementara, namun upaya tersebut tidak mengikat pihak-pihak yang berkonflik. ASEAN sebagai organisasi regional Asia Tenggara yang menganut prinsip non-intervensi telah membantu menyelesaikan konflik, namun potensi laten untuk kembali munculnya konflik masih tetap ada. Namun demikian, ASEAN tidak dapat sepenuhnya menjamin keamanan di sekitar wilayah konflik. Keputusan dan usaha ASEAN tidak mampu mengikat negara-negara anggotanya, khususnya Kamboja dan Thailand. Kasus Preah Vihear bukanlah sebatas prinsip saling menghormati kedaulatan negara lain, namun lebih kepada kepentingan politik atau kekuasaan. Ini merupakan kritik: negara-negara anggota ASEAN berhasil membangun suatu wilayah keamanan di kawasan Asia Tenggara, namun masih banyak persoalan perbatasan dan klaim wilayah antara mereka yang belum dapat diselesaikan. ASEAN sebenarnya hanya dapat meredam konflik-konflik antarnegara anggota, ia tidak berhasil menyelesaikannya.

---

<sup>70</sup> Borrel, p. 58.

Dalam situasi ini, potensi untuk perang sudah di depan mata. Dapatlah diargumenkan bahwa ASEAN tidak dapat menjamin tidak pecahnya perang terbuka di Asia Tenggara.

### **C. Postur Kekuatan Militer Negara-Negara Asia Tenggara**

Ketegangan-ketegangan dan konflik perbatasan yang terjadi di kawasan Asia Tenggara (lihat Gambar 5) memunculkan sikap reaktif dari masing-masing negara kawasan. Sikap tersebut terlihat, antara lain, pada peningkatan alutsista negara-negara Asia Tenggara. Setiap negara berlomba untuk meningkatkan persenjataan modernnya. Perlombaan tersebut dapat memicu konflik yang lebih besar di Asia Tenggara dalam kaitannya dengan klaim kedaulatan teritorial yang tumpang tindih. Upaya menjaga keseimbangan militer di kawasan adalah didasarkan untuk mempertahankan eksistensi sebuah negara. Namun, tidak semua negara di kawasan melakukan peningkatan anggaran dan alutsista, hanya negara-negara yang berpotensi konflik di kemudian hari.



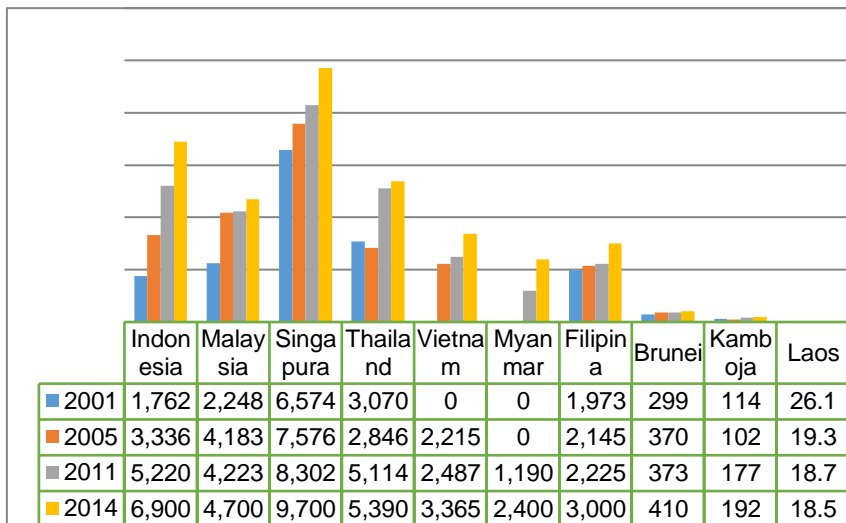
Gambar 5. Peta konflik dan ketegangan di Asia Tenggara<sup>71</sup>

Stabilitas keamanan di kawasan Asia Tenggara penuh dengan friksi, konflik, dan ketegangan yang mewarnai hubungan antarnegara kawasan sehingga sangat berbahaya dan sensitif. Untuk merespon situasi tersebut, negara-negara Asia Tenggara berusaha meningkatkan postur kekuatan militer mereka dengan anggaran pertahanan yang besar dari tahun 2001 sampai 2014 (lihat Grafik 1) dan keadaan alutsista pada tahun 2014 (Tabel 2). Peningkatan anggaran pertahanan dan alutsista masing-masing negara, kecuali Laos, dapat

---

<sup>71</sup> 'Konflik Kawasan Asia Tenggara', <<http://m.maritimemagz.com/2014/11/15/konflik-maritim-asia-indonesia-harus-siaga/>>, diakses pada 2 April 2016.

dikatakan sebagai pertunjukan kekuatan (*show of force*) di kawasan.



Grafik 1. Anggaran pertahanan negara-negara Asia Tenggara  
(dalam milyar dolar)<sup>72</sup>

<sup>72</sup> ‘The SIPRI Military Expenditure Database,’ *SIPRI* (daring) dan ‘Comparisons of World Military Strengths,’ *Global Fire Power* (daring).

Tabel 2. Alutsista negara-negara Asia Tenggara (2014)<sup>73</sup>

No	Negara	Jumlah Personil (Personil Aktif)	Angkatan Darat	Angkatan Udara	Angkatan Laut
1	Indonesia	129.075.188 (476.000)	1760 unit	405 unit	171 unit
2	Malaysia	14.817.517 (110.000)	1630 unit	217 unit	61 unit
3	Singapura	1.255.902 (71.600)	2732 unit	262 unit	40 unit
4	Thailand	35.444.716 (306.00)	4070 unit	573 unit	81 unit
5	Vietnam	50.645.430 (412.000)	8444 unit	404 unit	65 unit
6	Brunei Darussalam	230.224 (9.250)	138 unit	70 unit	17 unit
7	Kamboja	7.887.309 (125.000)	1425 unit	21 unit	27 unit
8	Laos	3.182.218 (30.000)	389 unit	14 unit	36 unit
9	Myanmar	29.458.716 (406.000)	3027 unit	235 unit	155 unit
10	Filipina	50.649.196 (220.000)	1093 unit	126 unit	120 unit

<sup>73</sup> 'The SIPRI Military Expenditure Database,' *SIPRI* (daring) dan 'Comparisons of World Military Strengths,' *Global Fire Power* (daring).

Melihat persoalan keamanan di kawasan Asia Tenggara, mulai dari sengketa perbatasan, ketegangan antarnegara, hingga respon peningkatan postur kekuatan militer, dapat diargumentasikan bahwa kawasan ini memiliki realitas keamanan yang unik. Tidak pernah terjadi perang di Asia Tenggara dalam beberapa dekade ini, namun bukan berarti kawasan tersebut bebas dari potensi perang. Peningkatan alutsista dan anggaran belanja pertahanan dari setiap negara kawasan manandakan bahwa Asia Tenggara bersiap untuk menghadapi kemungkinan perang terbuka, khususnya yang muncul dari konflik-konflik perbatasan dan saling klaim wilayah.

Konstelasi konflik dan ketegangan kawasan Asia Tenggara merupakan isu keamanan yang penting karena menyangkut eksistensi negara dan kehidupan warganya. Isu keamanan tradisional masih mewarnai politik internasional kawasan ini, di mana konflik yang berkepanjangan di kawasan dapat memicu perang antarnegara. Hampir keseluruhan konflik di kawasan ini memiliki isu yang sama, yaitu batas teritorial negara. Potensi perang diperkuat dengan pertunjukan kekuatan antarnegara sebagaimana ditampakkan oleh peningkatan anggaran pertahanan maupun alutsista. Negara-negara ini juga telah melakukan penyeimbangan kekuatan dengan cara menjalin hubungan militer dengan negara-negara

kuat luar kawasan (sistem intrusif), yang akan dibahas lebih lanjut pada bab berikutnya.



### **BAB III**

## **SISTEM INTRUSIF DI KAWASAN ASIA TENGGARA**

Sistem intrusif merupakan salah satu faktor penting dalam mempelajari suatu kawasan. Di kawasan Asia Tenggara, keterlibatan negara-negara kuat luar kawasan akan menimbulkan keseimbangan kekuatan dan *deterrence*. Terdapat tiga negara berkekuatan besar eksternal kawasan yang melakukan sistem intrusif di Asia Tenggara, yaitu Amerika Serikat, Cina, dan Australia. Ketiga negara tersebut terlibat dalam percaturan hubungan internasional di kawasan Asia Tenggara secara signifikan dalam hal pengaturan multilateral, pengaturan bilateral, intervensi militer, dan investasi ekonomi.

### **A. Sistem intrusif Amerika Serikat**

Sistem intrusif yang dijalankan oleh Amerika Serikat (AS) di kawasan Asia Tenggara merupakan sesuatu yang kontroversial karena dapat berdampak pada dua hal yang bertentangan, yaitu stabilitas atau instabilitas kawasan. Jika dilihat dari perspektif keamanan kawasan Asia Tenggara, keterlibatan partisipasi politik Amerika Serikat cenderung memberikan sumbangsih keamanan kawasan yang aman dan bebas dari perang besar. Keterlibatan signifikan AS di

kawasan Asia Tenggara pada pengaturan multilateral dapat dilihat dalam konteks MSSI, sedangkan pengaturan bilateralnya dapat ditelusuri di Thailand, Filipina dan Singapura. Keterlibatan signifikan lainnya dari AS di kawasan Asia Tenggara adalah intervensi militer di sekitar Laut Cina Selatan. Cantori & Spiegel mengatakan bahwa “*military intervention consist of the movement of the armed forces of an external power into a local area. There are three characteristic for military intervention: expanding one’s area of control, the maintenance of the status quo, or the reinstatement of a prior condition.*”<sup>74</sup> Intervensi tersebut dapat dijelaskan dari penempatan militer AS di Filipina serta seringnya AS melakukan patroli dan latihan militer di sekitar Laut Cina Selatan untuk memastikan kebebasan berlayar.<sup>75</sup> Di samping itu, AS juga melakukan hubungan dengan negara-negara Asia Tenggara dalam pengaturan investasi ekonomi.

Amerika Serikat telah melakukan sistem intrusif dalam pengaturan multilateral di Selat Malaka melalui perjanjian MSSI. Seperti telah disinggung di bab sebelumnya, di Selat Malaka sering timbul konflik dan ketegangan menyangkut

---

<sup>74</sup> Cantori & Spiegel, p. 28.

<sup>75</sup> ‘AS-Filipina Gelar Patroli Bersama di Laut Cina Selatan,’ *Berita Satu.com* (daring), 2016, <<http://www.beritasatu.com/dunia/360152-asfilipina-gelar-patroli-bersama-di-laut-china-selatan.html>>, diakses pada 18 April 2016.

keamanan maritim. Apalagi jika diperhadapkan pada peran negara-negara pantai yang saling berebut pengaruh kekuasaan di Selat Malaka. Pembentukan perjanjian multilateral MSSI merupakan upaya untuk memberantas perompak kapal di Selat Malaka. Selain itu, perjanjian ini juga telah menjadi alat atau instrumen Amerika Serikat untuk menekan negara-negara pantai dalam bertindak. Isu keamanan non-tradisional ini memunculkan isu keamanan tradisional antarnegara pantai. Konflik dan ketegangan politik keamanan di Selat Malaka mendapatkan sistem intrusif dari Amerika Serikat dalam kerangka MSSI.

*U.S. Energy Information Administration* (EIA) menginformasikan bahwa Selat Malaka adalah satu dari tujuh lautan terpenting bagi percaturan ekonomi dan politik global. Dikatakan bahwa selain sangat kaya akan sumber daya alam, Selat Malaka juga merupakan “*the heart of sea*” atau jantung utama penghubung komunikasi dan navigasi pelayaran kapal-kapal dunia, yang tidak hanya penting bagi negara sekitarnya, tetapi juga bagi banyak negara pengguna di luar kawasan.<sup>76</sup> Pada beberapa perkembangan lain, aksi perompakan kapal di Selat Malaka tampak berpotensi membahayakan keutuhan

---

<sup>76</sup> ‘World Oil Transit Chokepoints,’ *U.S. Energy Information Administration* (daring), 2012, <[http://www.eia.gov/cabs/world\\_oil\\_transit\\_chokepoints/Full.html](http://www.eia.gov/cabs/world_oil_transit_chokepoints/Full.html)>, diakses pada 15 Desember 2015.

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Berbagai kasus perompakan kapal yang terjadi sangat berkaitan dengan kelompok separatisme atau pemberontak Gerakan Aceh Merdeka (GAM) sebagai dalangnya. Sebagai contoh adalah perompakan kapal tanker *M.T. Pematang* pada tanggal 10 Juni 2004 yang dilakukan sekelompok perompak asal Aceh. Pemimpin aksi perompakan tersebut bernama Chaidir yang tercatat sebagai Panglima Laut GAM komando wilayah Peurlak, Aceh Timur.<sup>77</sup> Terdapat pula kasus penyanderaan kapal tanker *Tri Samudra*, yang kemudian diketahui dilakukan oleh anggota GAM.<sup>78</sup>

Pada tahun 2005, dalam forum Shangri-La Dialogue<sup>79</sup> di Singapura yang membahas *Enhancing Maritime Security Cooperation* di lautan Asia-Pasifik, Indonesia kembali mengusulkan untuk memperluas kerangka kerja sama “patroli

---

<sup>77</sup> ‘Tiga Perompak Tanker Pertamina Tewas Ditembak,’ *Liputan 6* (daring), 2004, <<http://news.liputan6.com/read/80118>>, diakses pada 15 Desember 2015.

<sup>78</sup> ‘GAM Belum Lepas Sandera Kru Kapal Tri Samudra,’ *Detik* (daring), 2005, <<http://news.detik.com/read/2005/03/19/171951/321279/10/gam-belum-lepas-sandera-kru-kapal-tri-samudra?nd771104bcj>>, diakses pada 15 Desember 2015.

<sup>79</sup> The Shangri-La Dialogue adalah suatu forum pertemuan antarpemerintah yang diselenggarakan setiap tahun oleh International Institute for Strategic Studies. Pertemuan ini dihadiri berbagai pejabat pemerintahan dari negara-negara Asia Pasifik dengan tujuan untuk membahas keamanan di kawasan Asia Pasifik. Lihat *Shangri-La Dialogue The IISS Asia Security Summit*, <<https://www.iiss.org/en/about-s-us>>, diakses pada 15 Desember 2015.

laut terkoordinasi trilateral” dalam kerangka MSSSI dengan mengajak aktor-aktor negara pengguna, seperti Amerika Serikat, Cina, Jepang, Korea Selatan, dan Australia serta negara-negara pengguna non-tepi pantai lainnya untuk turut berpartisipasi dalam penanganan perompakan kapal di Selat Malaka. Gagasan Indonesia tersebut semakin ditindaklanjuti dalam beberapa pertemuan informal maupun formal, di antaranya pada tanggal 1-2 Agustus 2005 di Batam yang menghasilkan *The Batam Joint Ministerial Statement on the Straits of Malacca and Singapore*<sup>80</sup> dan pertemuan pada tanggal 8 September 2005 di Jakarta yang menghasilkan *Jakarta Statement on Enhancement of Safety, Security and Environmental Protection in the Straits of Malacca and Singapore*.<sup>81</sup>

Puncak pertemuan terjadi pada tanggal 21 April 2006 di Batam, yang dihadiri Panglima TNI Marsekal Djoko Suyanto, Panglima Angkatan Laut Malaysia Admiral Tan Sri Dato Mohd Anwar bin Hj Mohd Noor, dan Kepala Pertahanan Angkatan Bersenjata Singapura Letnan Jenderal Ng Yat Chung, serta perwakilan-perwakilan dari negara-negara pengguna non-tepi pantai, yaitu Amerika Serikat, Cina,

---

<sup>80</sup> M. Akiyama, *OPRF Blueprint for a New Cooperative Framework on the Straits of Malacca and Singapore*, Ocean Policy Research Foundation, Tokyo, 2006, p. 19.

<sup>81</sup> Akiyama, p. 23.

Jepang, Korea Selatan, Australia, Thailand, India, serta *International Maritime Organisation* (IMO). Mereka bertemu untuk menyepakati *Malacca Straits Patrol (MSP) Terms of References Joint Coordinating Committee and Standard Operating Procedure* (MSP TOR JCC and SOP). Kesepakatan MSP TOR JCC and SOP memberikan payung bagi *Malacca Straits Security Initiative* (MSSI) yang berasaskan tiga prinsip:

1. *“That the primary responsibility for the security of Straits of Malacca lies with the littoral states: Indonesia, Malaysia and Singapore.”*
2. *“That user states and the other international community, including international agencies like the International Maritime Organisation (IMO) can play useful roles and can make useful contributions in the security of the Straits.”*
3. *“Any cooperative measures undertaken by other countries must be carried out in accordance with international law and be respectful of the sovereignty of the littoral states and done in consultation with all the littoral states.”*<sup>82</sup>

---

<sup>82</sup> ‘Remarks by Chief of Defence Force LG Ng Yat Chung at the Malacca Straits Patrol (MSP) Joint Coordinating Committee Terms of References and Standard Operating Procedure Signing Ceremony,’

Berdasarkan tiga prinsip di atas, MSSSI merupakan pengaturan multilateral berdasarkan mekanisme kooperatif dengan tujuan mengamankan Selat Malaka, khususnya penanganan aksi perompakan kapal. Hal ini dimaksudkan pada perbedaan peran antara negara pantai, yaitu Indonesia, Malaysia, dan Singapura, dengan negara-negara non-tepi pantai dalam penanganan aksi perompakan kapal di Selat Malaka.

Indonesia, Malaysia, dan Singapura berperan untuk melakukan tindakan pencegahan dan upaya polisional melalui operasi keamanan dengan penangkapan dan *sweeping*. Negara-negara pengguna seperti Amerika Serikat, Cina, Jepang, Korea Selatan, dan Australia diwajibkan untuk memberikan bantuan teknis dan pelatihan terhadap militer negara-negara pantai. Selain itu, segala tindakan pengamanan yang dilakukan dalam penerapan MSSSI juga diharuskan untuk menjunjung tinggi hukum internasional, terutama dalam prinsip-prinsip UNCLOS 1982 mengenai regulasi kegiatan-kegiatan pengamanan bersama berlandaskan koordinasi,

---

*Ministry of Defense Singapore*, 2006, <[http://www.mindef.gov.sg/imindef/press\\_room/official\\_releases/nr/2006/apr/21apr06\\_nr.print.img.html](http://www.mindef.gov.sg/imindef/press_room/official_releases/nr/2006/apr/21apr06_nr.print.img.html)>, diakses pada 21 Maret 2016.

komunikasi, dan saling menghormati kedaulatan laut suatu negara.<sup>83</sup>

Selain itu, sistem intrusif dalam pengaturan bilateral oleh Amerika Serikat terhadap Asia Tenggara dapat ditemukan dalam pengaturan kerja sama militer dengan Singapura melalui *US-Singapore Strategic Framework Agreement* (USSFA). Perjanjian ini mengizinkan angkatan perang Amerika Serikat memakai pelabuhan Angkatan Laut dan lapangan udara militer Singapura sebagai basis operasi. Oleh sebab itu, banyak pakar militer percaya, menyerang Singapura sama dengan bunuh diri secara masal.<sup>84</sup> Strategi Amerika Serikat sebagai sistem intrusif dalam Kerangka Kemitraan Pertahanan dan Keamanan (*Strategic Framework Agreement*) ditandatangani oleh Perdana Menteri Lee Hsien Loong dan Presiden George W. Bush. SFA mengartikulasikan

---

<sup>83</sup> A.S. Massey, *Maritime Security Cooperation in the Strait of Malacca*, tesis Master of Arts in Security Studies, Naval Postgraduate School, Monterey, California, 2008, p. 46, <<http://calhoun.nps.edu/bitstream/handle/10945/4113/ADA483524.pdf?sequence=5>>, diakses pada 15 Desember 2015.

<sup>84</sup> 'Pangkalan Militer Paling Mematikan di ASEAN,' *IndonesianReview.com* (daring), 1 Februari 2015, <<http://indonesianreview.com/gigin-praginanto/pangkalan-militer-paling-mematikan-di-asean>>, diakses pada 24 desember 2015.



prinsip-prinsip kemitraan pertahanan AS-Singapura dalam bidang kerja sama pertahanan.<sup>85</sup>

SFA merupakan bentuk kemitraan yang memperkuat keamanan kedua negara dan meningkatkan stabilitas regional. Ia dibangun atas dasar *Memorandum of Understanding* (MOU) di tahun 1990. SFA bertujuan agar Amerika Serikat dapat menggunakan fasilitas militer di Singapura. Dengan demikian, Singapura mendukung kehadiran Amerika Serikat di Asia Tenggara; SFA mengakui Singapura sebagai mitra utama kerja sama keamanan Amerika Serikat. Perjanjian Kerja Sama Pertahanan (*Defense Cooperation Agreement*) dan Perubahan Protokol MOU 1990 yang telah ditandatangani oleh Menteri Pertahanan Singapura Teo Chee Hean dan Menteri Pertahanan AS Donald Rumsfeld adalah dua perjanjian yang datang di bawah payung Perjanjian Kerangka Kerja Sama Strategis.

Amerika Serikat dan Singapura telah diikat dengan *Defence Cooperation Agreement* (DCA). Pengaturan dalam kerangka DCA telah menyatukan semua kegiatan kerja sama pertahanan AS dan Singapura saat ini. DCA merupakan pengaturan kerja sama dalam bidang militer, yakni

---

<sup>85</sup> 'Factsheet - The Strategic Framework Agreement,' *Ministry of Defense Singapore* (daring), <[http://www.mindef.gov.sg/imindef/press\\_room/official\\_releases/nr/2005/jul/12jul05\\_nr/12jul05\\_fs.html#.VnuBHdKqqko](http://www.mindef.gov.sg/imindef/press_room/official_releases/nr/2005/jul/12jul05_nr/12jul05_fs.html#.VnuBHdKqqko)>, diakses pada 24 Desember 2015.

menyediakan fasilitas militer yang saling menguntungkan. AS dan Singapura akan mengatur kebijakan strategi keamanan setiap tahun untuk mempertemukan pejabat pertahanan senior dari kedua negara agar dapat bertukar pandangan mengenai isu-isu keamanan dan pertahanan serta kerja sama bilateral. DCA dibangun di atas interaksi yang luas antara Angkatan Bersenjata AS dan Angkatan Bersenjata Singapura untuk memperluas kerja sama militer. DCA ini juga memunculkan intervensi militer AS di kawasan Asia Tenggara, ketika militer AS ditempatkan di Singapura sebagai bagian dari DCA. Situasi ini merupakan bagian dari beberapa tonggak penting dalam hubungan bilateral AS dan Singapura di bidang pertahanan, yang merupakan peresmian detasemen pelatihan Angkatan Udara Singapura di Amerika Serikat (1988); penandatanganan MOU sebagai pengaturan penggunaan fasilitas militer (1990); penandatanganan MOU untuk memperluas *Changi Naval Based* Amerika Serikat di Singapura (1998); peresmian *Undersecretary Level Defence Cooperation Committee* (DCC) untuk mengawasi teknologi pertahanan kedua negara (2000); dan penetapan SFA (2005).<sup>86</sup>

---

<sup>86</sup> 'Factsheet - The Strategic Framework Agreement,' *Singapore Government* (daring), 12 July 2005, <[http://www.mindef.gov.sg/imindef/press\\_room/official\\_releases/nr/2005/jul/12jul05\\_nr/12jul05\\_fs.html#.VxTLv9R97IV](http://www.mindef.gov.sg/imindef/press_room/official_releases/nr/2005/jul/12jul05_nr/12jul05_fs.html#.VxTLv9R97IV)>, diakses pada 18 April 2016.

Selain Singapura, Filipina juga memiliki pengaturan pertahanan dengan Amerika Serikat. Bahkan Amerika Serikat dan Filipina merupakan teman lama dalam menjalin hubungan bilateral bidang pertahanan. Departemen Pertahanan Filipina dan Amerika Serikat kembali membentuk pakta pertahanan militer. Dua negara ini sepakat melakukan renegotiasi kerja sama pertahanan dan keamanan di perairan teritorial Filipina, termasuk sekitar Laut Cina Selatan.<sup>87</sup> Perjanjian pakta militer AS dan Filipina merupakan pengaturan bilateral untuk menghadirkan militer AS di Filipina untuk membantu Filipina terkait keamanan maritim di Laut Cina Selatan.

Pengaturan bilateral untuk menempatkan militer AS di Filipina sebelumnya telah dilakukan sejak 14 Maret 1947. AS dan Filipina sepakat melakukan perjanjian pakta militer yang bernama *The Military Bases Agreement*. Perjanjian pakta militer ini mengatur kehadiran pangkalan militer AS di Filipina dan merupakan dasar untuk perjanjian-perjanjian selanjutnya. Amerika Serikat dan Filipina melanjutkan pengaturan bilateral dengan penandatanganan kesepakatan *Treaty of Friendship, Cooperation, and Security* pada tahun 1991 di Manila. Berdasarkan perjanjian tersebut, militer AS

---

<sup>87</sup> 'Filipina Buka Kembali Pangkalan Militer AS,' *Republika* (daring), 13 Agustus 2013, <<http://www.republika.co.id/berita/internasional/asean/13/08/13/mrfzqf-filipina-buka-kembali-pangkalan-militer-as>>, diakses pada 24 Desember 2015.

akan menggunakan pangkalan laut Subic sebagai pangkalan militer AS selama 10 tahun dengan bayaran setiap tahun sebesar \$203 juta. Ini merupakan bayaran yang jauh lebih rendah dari permintaan awal Filipina, yaitu \$825 juta setiap tahun. Penggunaan pangkalan laut Subic akhirnya disepakati oleh kedua pihak pada 27 Agustus 1991 dengan kompensasi \$203 juta per tahun, yang juga jauh lebih rendah dari tawaran AS sebelumnya, yaitu \$360 juta setiap tahun.<sup>88</sup>

Berakhirnya pengaturan bilateral MBA pada masa kepresidenan Corazon Aquino, yang mengadakan referendum pada tahun 1992, berakibat pada keamanan Filipina dan Asia Tenggara. Setelah ditariknya pasukan AS dari Filipina, keamanan Asia Tenggara menjadi lebih tegang, termasuk memanasnya konflik Laut Cina Selatan dan isu separatistis di Filipina. Kebangkitan negara-negara kuat di kawasan Asia Tenggara seperti Cina, Jepang, dan India yang telah meningkatkan armadanya, memunculkan pengaturan pakta militer Filipina dan AS yang baru pada 2014.<sup>89</sup> Hal ini untuk meningkatkan kemampuan militer Filipina yang masih lemah dan membuka kembali jalinan masa lalu antara Filipina dan AS agar semakin dekat dalam hubungan internasional.

---

<sup>88</sup> R.C.D. Castro, 'Special Relations and Alliance Politics in Philippine-U.S. Security Relations, 1990-2002,' *Asian Perspective*, vol. 27, no. 1, 2003, p. 156.

<sup>89</sup> Castro, pp. 153-157.

Kebijakan ini merupakan instrumen Filipina untuk menghadapi ketegangan dengan Cina terkait klaim di Laut Cina Selatan. Menteri Pertahanan Filipina Voltaire Gazmin dan Duta Besar AS Philip Goldberg menandatangani perjanjian bilateral di bidang pertahanan dan keamanan selama sepuluh tahun.

Perjanjian ini juga dapat dilihat sebagai upaya Presiden Obama untuk lebih memfokuskan perhatian militer dan ekonomi AS ke Asia Tenggara.<sup>90</sup> Obama mengatakan bahwa kesepakatan pengaturan itu akan menciptakan lebih banyak rotasi tentara Amerika Serikat melalui Filipina untuk latihan militer bersama, namun dia menekankan tidak akan ada pengembalian pangkalan Amerika secara permanen. Selain itu, Obama juga mengatakan bahwa kerja sama lebih besar antara pasukan Amerika dan Filipina akan meningkatkan kemampuan kedua negara dalam berlatih, uji coba, dan beroperasi satu sama lain serta merespon berbagai tantangan lebih cepat. Di samping itu, AS dan Filipina adalah teman lama yang terikat oleh pengaturan pakta pertahanan bersama dan terlibat secara rutin dalam latihan perang dengan

---

<sup>90</sup> Mukhlisun, 'Filipina-AS Tandatangani Kesepakatan Pertahanan,' *Sumbar - AntaraNews.Com* (daring), 28 April 2014, <<http://www.antarasumbar.com/berita/95465/filipina-as-tandatangani-kesepakatan-pertahanan.html>>, diakses pada 23 Maret 2016.

melibatkan ribuan militer AS dan peralatan militer Amerika Serikat yang canggih.<sup>91</sup> Pengaturan bilateral ini nampaknya memberikan kelegaan bagi Filipina yang mengalami ketegangan politik dan keamanan menyangkut klaim sekitar Laut Cina Selatan. Pengaturan ini telah meningkatkan anggaran belanja militer Filipina dari sebesar \$1,973 milyar pada tahun 2001 menjadi \$3 milyar di tahun 2014. Filipina juga berusaha memodernisasi angkatan perangnya di setiap mata militer.<sup>92</sup>

Dalam konteks pengaturan hubungan militer secara bilateral, Amerika Serikat juga melakukan hubungan dengan Thailand, seperti latihan militer bersama *Cobra Gold* secara rutin.<sup>93</sup> Latihan militer ini disebut sebagai latihan terbesar di Asia Tenggara, yang juga melibatkan Singapura dan Filipina.

Amerika Serikat juga melakukan sistem intrusif di kawasan Asia Tenggara dengan menjalin kerja sama dengan organisasi regional Asia Tenggara, yaitu ASEAN, dalam bidang investasi ekonomi. Investasi tersebut dapat meningkatkan hubungan kawasan Asia Tenggara dan

---

<sup>91</sup> 'AS dan Filipina Teken Pakta Pertahanan,' *Berita Satu.com* (daring), 28 April 2014, <<http://www.beritasatu.com/dunia/180796-as-dan-filipina-teken-pakta-pertahanan.html>>, diakses pada 23 Maret 2016.

<sup>92</sup> 'The SIPRI Military Expenditure Database,' *SIPRI* (daring) dan 'Comparisons of World Military Strengths,' *Global Fire Power* (daring).

<sup>93</sup> 'Latihan Multinasional Cobra Gold 2013,' *Artileri* (daring), 2013, <<http://www.artileri.org/2013/02/latihan-multinasional-cobra-gold-2013.html>>, diakses pada 18 April 2016.

Amerika Serikat. Kerja sama *Trade and Investment Framework Arrangement between the United States of America and ASEAN* menjadikan hubungan negara-negara anggota ASEAN dan AS dalam bidang investasi ekonomi meningkat. Amerika Serikat adalah salah satu negara yang memiliki investasi terbesar di kawasan Asia Tenggara. Total perdagangan antara Amerika Serikat dan ASEAN pada tahun 2004 sebesar \$135 milyar dan meningkat menjadi sebesar \$149 milyar pada tahun 2009. Sementara itu, investasi Amerika Serikat di negara-negara anggota ASEAN pada tahun 2009 sebesar \$3,3 milyar, atau 8,5 % dari total investasi ke kawasan Asia Tenggara. Total investasi Amerika Serikat ke ASEAN pada periode 2007- 2009 adalah \$16,5 milyar.<sup>94</sup>

Amerika Serikat juga menjalankan perannya sebagai sistem intrusif dengan membentuk *Trans Pacific Partnership* (TPP). Negara kawasan Asia Tenggara yang pertama kali menjadi anggota TPP pada bulan Maret 2010 adalah Singapura. Pengaturan investasi ekonomi dan perdagangan dalam kerangka TPP adalah sebuah sistem intrusif Amerika Serikat di kawasan Asia Tenggara. TPP merupakan kebijakan dengan prioritas tinggi untuk mendorong perbaikan ekonomi melalui peningkatan ekspor serta pembukaan lapangan kerja

---

<sup>94</sup> ‘Amerika Serikat Perjanjian Perdagangan Bebas,’ *EENI* (daring), 2015, <<http://id.reingex.com/United-States-FTA-Agreements.shtml>>, diakses pada 23 Maret 2016.

baru. Program ini juga adalah bagian utama kebijakan *rebalancing* (menyeimbangkan kembali kekuatan) strategis pemerintahan Presiden Obama di kawasan Asia Pasifik, khususnya untuk bidang investasi ekonomi. Setelah Singapura, Malaysia dan Vietnam menyusul pada tahun 2010, menjadikan sudah tiga negara Asia Tenggara yang menjadi anggota TPP.<sup>95</sup>

## **B. Sistem Intrusif Cina**

Cina dengan konsep *peaceful development* menunjukkan sikap yang lebih fleksibel dan berpeluang besar tampil sebagai kekuatan penyeimbang Amerika Serikat di Asia Tenggara. Dewasa ini, perkembangan politik di Asia Tenggara telah melahirkan tantangan, tekanan dan sekaligus peluang-peluang baru bagi Cina. Cina aktif dalam pengembangan regionalisme ekonomi dan keamanan di kawasan Asia Tenggara. Sikap ini membuat Cina menjadi lebih diterima di kawasan dan mempunyai posisi lebih kuat dalam kompetisi kekuatan dibandingkan dengan kekuatan-kekuatan negara eksternal lain. Cina selalu menjadi faktor pembentuk pemikiran strategis tentang masa depan kawasan

---

<sup>95</sup> 'Kemitraan Trans Pasifik (TPP): Membangun Ekonomi Amerika Serikat dan Kemitraan Strategis di Asia Pasifik,' *Embassy of the United States in Jakarta*, (daring), <[http://indonesian.jakarta.usembassy.gov/news/fact\\_130913id.html](http://indonesian.jakarta.usembassy.gov/news/fact_130913id.html)>, diakses pada 23 Maret 2016.



Asia Tenggara. Selain itu, Cina juga tergabung dalam MSSI sebagai negara pemakai jalur Selat Malaka. Perjanjian tersebut menjadikan Cina sebagai negara luar kawasan yang mempunyai partisipasi politik yang signifikan di Asia Tenggara. Bagi Cina, Selat Malaka adalah salah satu “jantung” lalu lintas energinya; keamanan energinya sangat bergantung pada wilayah ini.

Pada kerangka bilateral, Cina dan Laos berjanji akan memperdalam kerja sama dan pertukaran militer serta memelihara perdamaian dan stabilitas regional. Hal itu mengemuka dari pertemuan antara Wakil Perdana Menteri Laos, Menteri Pertahanan Nasional Douangchay Phichith, Wakil Menteri Pertahanan Nasional Sanyahak Phomvihane, dan Wakil Kepala Staf Umum Tentara Pembebasan Rakyat (TPR) Cai Yingting, di ibu kota Vietnam, Vientiane.<sup>96</sup> Laos adalah salah satu negara di kawasan Asia Tenggara yang tidak melakukan upaya meningkatkan kekuatan militer. Pada tahun 2001, anggaran belanja pertahanan Laos sebesar \$26,1 milyar, sedangkan pada tahun 2014 sebesar \$18,6 milyar.<sup>97</sup> Anggaran

---

<sup>96</sup> Laos-Cina Tingkatkan Hubungan Militer, *'Intelijen* (daring), <<http://www.intelijen.co.id/laos-cina-tingkatkan-hubungan-militer/>>, diakses pada 24 Desember 2016.

<sup>97</sup> 'The SIPRI Military Expenditure Database,' *SIPRI* (daring) dan Comparisons of World Military Strengths,' *Global Fire Power* (daring).

pertahanan yang terus menurun merupakan indikasi bahwa tidak ada maksud perlombaan senjata dari pihak Laos.

Selain itu, Cina juga melakukan sistem intrusif dalam pengaturan bilateral dengan Indonesia. Hal ini menimbulkan argumentasi bahwa masa lalu terjalin kembali. Pada masa pemerintahan Orde Lama, Indonesia menjalin hubungan yang akrab dengan Cina dalam apa yang disebut “Poros Jakarta-Peking.” Pada era sekarang hubungan Jakarta-Beijing kembali dibentuk dalam kerangka bilateral, terkait dengan kerja sama dalam produksi alutsista. Kerja sama yang telah disepakati oleh Cina dan Indonesia antara lain berupa *Military Equipment Acquisition*, *Transfer of Technology* dari sejumlah peralatan militer, serta *Joint Production* dan *Joint Marketing* sejumlah peralatan militer. Misalnya, kerja sama pembuatan rudal C-705 antara Indonesia dan Cina ditandatangani pada tahun 2013 dan kemudian dikembangkan melalui kontrak berikutnya di tahun 2014.

Kesepakatan kerja sama kembali ditingkatkan pada tanggal 27 Agustus 2015 di Beijing. *The State Administration for Science, Technology and Industry for National Defense* (SASTIND) Cina akan segera mempelajari perjanjian dasar terbaru dari Program Transfer Teknologi Rudal C-705<sup>98</sup>

---

<sup>98</sup> Rudal C-705 merupakan pengembangan dari C-704, namun bentuknya lebih menyerupai miniatur C-602. Pengembangan rudal baru

antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan SASTIND.<sup>99</sup> Kerja sama yang akan melibatkan PT Dirgantara Indonesia, PT Pindad dan PT LEN ini tertuang dalam nota kesepakatan yang ditandatangani Wakil Menteri Pertahanan RI dan Kepala SASTIND. Dalam nota kesepakatan disepakati lima hal pokok, antara lain bahwa pembelian senjata tertentu harus dilakukan antarpemerintah dan bahwa alih teknologi peralatan militer tertentu mencakup perakitan, pengujian, pemeliharaan, modifikasi, *upgrade*, dan pelatihan.<sup>100</sup>

Partisipasi intrusif yang signifikan oleh Cina di Asia Tenggara, yaitu intervensi militer, terlihat pada konflik Laut Cina Selatan. Hal ini terlihat dari kebijakan Cina dalam menempatkan pangkalan militer di Laut Cina Selatan untuk

---

ini berfokus ke tiga hal, yakni elemen mesin, hulu ledak, dan sistem pemandu. Desain modular dari mesin baru meningkatkan jangkauan rudal yang sebelumnya 75-80 kilometer menjadi hingga 170 kilometer, dengan jarak efektif 140 kilometer. C-705 dipersiapkan untuk mengandaskan kapal perang lawan yang berbobot hingga 1.500 ton (*light corvette class*). Daya hancur yang dihasilkan rudal C-705 bisa mencapai 95,7%, ideal untuk menenggelamkan kapal. Baca 'Kapal Selam Kilo, Amur dan Rudal C-705 dari Saudara Tua,' *Jakarta Greater* (daring), 16 Desember 2013, <<http://jakartagreater.com/kapal-selam-kilo-amur-dan-rudal-c-705-dari-saudara-tua/>>, diakses pada 24 Maret 2016.

<sup>99</sup> 'Indonesia dan Cina Sepakat Produksi Bersama Rudal C-705 dan Kembangkan Radar,' *Militer Hankam* (daring), <<http://www.militerhankam.com/2015/09/indonesia-dan-china-sepakat-produksi.html>>, diakses pada 24 Desember 2016.

<sup>100</sup> 'Perkembangan Kerja Sama Rudal C-705 China-Indonesia,' *Jakarta Greater* (daring), 22 Agustus 2013, <<http://jakartagreater.com/perkembangan-kerjasama-rudal-c-705-china-indonesia/>>, diakses pada 24 Maret 2016.

menjaga kepentingannya. Selama April 2010, misalnya, Cina telah melancarkan intervensi militer di Laut Cina Selatan dengan membangun *Fiery Cross Reef*, yang dapat mempermudah nelayan-nelayan Cina masuk ke LCS.<sup>101</sup> Intervensi militer Cina di Asia Tenggara sebagai suatu sistem instrusif merupakan perwujudan kepentingan politik, yaitu perebutan kekuasaan.

Pangkalan militer Cina di Laut Cina Selatan mungkin cukup besar untuk menampung pesawat angkut militer Y-20, pesawat jet pembom H-6, dan J-10 *fighter*. Hal ini telah memicu perlombaan senjata di Asia Tenggara. Penggelaran kekuatan Cina di Laut Cina Selatan bukan saja membuat ketakutan di kawasan Asia Tenggara, tetapi juga dunia internasional. Ini bukan hanya soal kepentingan ekonomi yang terancam – Laut Cina Selatan merupakan jalur perdagangan yang mengantarkan barang dan jasa internasional hingga mencapai nilai \$5 triliun setiap tahun<sup>102</sup> – namun juga munculnya perspektif secara umum bahwa ketegangan dan

---

<sup>101</sup> D. Scott, 'Conflict Irresolution in the South China Sea,' *Asian Survey*, vol. 52, no. 6, 2012, p. 1036.

<sup>102</sup> 'Mengapa Indonesia Menambah Kekuatan Militer di Natuna,' *BBC Indonesia* (daring), 1 Januari 2016, <[http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/12/151230\\_dunia\\_indonesia\\_natuna](http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/12/151230_dunia_indonesia_natuna)> dan 'Review Artikel: ASEAN Diuji Hadapi Sengketa Wilayah,' *Kompasiana* (daring), 2013, [http://www.kompasiana.com/www.nokjannah.com/review-artikel-asean-diuji-hadapi-sengketa-wilayah\\_5528d8896ea834a47f8b45a0](http://www.kompasiana.com/www.nokjannah.com/review-artikel-asean-diuji-hadapi-sengketa-wilayah_5528d8896ea834a47f8b45a0)>, diakses pada 26 Maret 2016.

konflik perbatasan tidak lagi ditentukan oleh upaya diplomatis, melainkan lewat kekuatan militer. Hal ini dapat dilihat dari respon beberapa negara, seperti AS yang mengirimkan militernya ke Laut Cina Selatan untuk menguji kebebasan navigasi. Vietnam, Malaysia, dan Filipina terus melakukan kebijakan pengaturan bilateral dengan negara-negara non-kawasan untuk merespon Cina. Sementara itu, Indonesia terus mempertahankan kedaulatan Kepulauan Natuna, yang dekat dengan wilayah konflik Laut Cina Selatan. TNI Angkatan Darat, yang sekarang mengerahkan 800 prajurit di Natuna, akan menambah jumlahnya hingga 2.000 prajurit di tahun 2016. Angkatan Laut menambah 14 kapal untuk mengawasi sekitar kepulauan Natuna, sedangkan Angkatan Udara juga menambah pesawat tempur.

Selain pengaturan multilateral, bilateral, dan intervensi militer, Cina juga melakukan sistem intrusif dengan cara investasi ekonomi di Asia Tenggara. Partisipasi Cina melalui investasi ekonomi telah menjadi penyeimbang kekuatan-kekuatan besar di Asia Tenggara. Hubungan ekonomi dan perdagangan antara Cina dan Asia Tenggara telah berlangsung sejak lama. Dewasa ini, investasi ekonomi Cina di Asia Tenggara mengalami peningkatan yang signifikan setelah diberlakukannya konsep *peaceful development* yang membuka Cina terhadap negara-negara lain.

Keterlibatan Cina di Asia Tenggara telah memunculkan isu keamanan kawasan. Setelah berdirinya Republik Rakyat Cina (RRC) pada tahun 1949, hubungan Cina dan negara-negara kawasan Asia Tenggara menempuh suatu dimensi baru dengan masuknya unsur-unsur ideologi dan geopolitik yang baru. Hubungan yang berlandaskan ideologi ini telah menerima tanggapan negatif, apalagi pada masa Perang Dingin, di mana terdapat persaingan antara dua kekuatan besar dunia, yaitu kapitalisme dan komunisme.<sup>103</sup> Hubungan ekonomi antarnegara tidak dapat dipisahkan dengan realitas hubungan politik saat itu. Pandangan buruk ASEAN terhadap Cina sebagian disebabkan oleh distorsi politik Perang Dingin dan sebagian lagi disebabkan oleh retorika revolusioner.

Konferensi Bandung pada tahun 1955 memberi peluang kepada Cina untuk masuk wilayah Asia Tenggara, khususnya secara politis. Setelah sempat tegang mulai akhir tahun 1970-an, hubungan Asia Tenggara dengan Cina mulai membaik pada awal tahun 1990-an.<sup>104</sup> Hubungan Cina-ASEAN terus mengalami perkembangan, termasuk pembentukan kerja sama ASEAN Plus Three (Cina, Jepang, dan Korea Selatan) pada tahun 1997. KTT pertama APT diselenggarakan pada bulan Desember 1997 di Kuala Lumpur, saat Asia Tenggara

---

<sup>103</sup> J. Wong, *Politik Perdagangan Cina di Asia Tenggara*, Bumi Aksara, Jakarta, 1987, p. 15.

<sup>104</sup> Wong, pp. 20-21.

mengalami krisis ekonomi. Hingga tahun 2007 pengaturan APT didasarkan pada pernyataan bersama tentang kerja sama Asia Timur, *East Asian Vision Group* (EAVG). Jepang, Korea Selatan dan Cina telah mengaksesi *Treaty of Amity and Cooperation (TAC) in Southeast Asia*: Cina pada tahun 2003, Jepang dan Korea Selatan pada tahun 2004. EAVG meliputi perdagangan, investasi, perbankan dan keuangan, transfer teknologi, industri, teknologi, *e-commerce*, pariwisata, usaha kecil dan menengah, pertanian, pengembangan wilayah pertumbuhan, jejaring dunia usaha, serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada bidang ekonomi dan moneter, cakupan EAVG antara lain manajemen risiko makro ekonomi, pengawasan aliran modal kawasan, penguatan sistem keuangan dan perbankan, serta reformasi arsitektur keuangan internasional. Terdapat beberapa rekomendasi EAVG, mulai dari pembentukan perdagangan bebas kawasan Asia Timur, jaringan informasi dan investasi Asia Timur, fasilitas pendanaan kawasan dan koordinasi mata uang, serta KTT Asia Timur.<sup>105</sup>

Dalam mengevaluasi kerja sama 10 tahun pertama dan menyongsong kerja sama 10 tahun berikutnya, para pemimpin pemerintahan APT telah mengesahkan pernyataan kedua

---

<sup>105</sup> 'ASEAN Plus Three,' *Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia* (daring), <<http://www.kemlu.go.id/ptri-asean/en/Pages/ASEAN-Plus-Three.aspx>>, diakses pada 26 Maret 2016.

tentang kerja sama dan rencana kerja tahun 2007-2017 pada KTT ke-11 di Singapura tahun 2007. Terdapat lima bidang kerja sama di dalam pernyataan kedua ini, yaitu politik dan keamanan; ekonomi dan keuangan; energi, pembangunan, lingkungan hidup, perubahan iklim, dan pembangunan yang berkesinambungan; sosial-budaya dan pembangunan; serta dukungan institusional dan hubungan kerangka kerja sama yang lebih luas. Dalam pernyataan kedua ini juga disepakati pembentukan *ASEAN Plus Three Cooperation Fund* (APTCF) dengan kerangka acuan dana awal \$3 juta, dengan proporsi 9:1, yaitu Cina, Jepang dan Korea Selatan sebesar \$2,7 juta dan ASEAN secara keseluruhan sebesar \$300 ribu.<sup>106</sup> Kerja sama APT juga telah berhasil membentuk *Chiang Mai Initiative* (CMI), yang antara lain berisikan skema bilateral Pengaturan Penukaran (PP) antara negara-negara APT guna membantu likuiditas keuangan di kawasan sehingga krisis keuangan di kawasan dapat dihindari. Secara politis, CMI merupakan keberhasilan yang nyata dari kerja sama APT.

Pada pertemuan menteri keuangan APT di Phuket, Thailand, tanggal 22 Februari 2009, disepakati beberapa hal, termasuk (1) penetapan jumlah dana *Chiang Mai Initiative Multilateralization* (CMIM) dari \$80 miliar menjadi \$120

---

<sup>106</sup> 'ASEAN Plus Three,' *Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia* (daring).



miliar dengan rasio kontribusi APT adalah 20:80; (2) *Regional Surveillance Unit* yang independen akan dibentuk; (3) Setelah berfungsinya mekanisme RSU, jumlah pinjaman yang dapat ditarik tanpa keterlibatan International Monetary Fund (IMF) dalam CMIM dapat ditingkatkan di atas batas yang berlaku sekarang sebesar 20%. Kemudian, pada KTT ke-12 APT di Thailand pada tahun 2009 telah dibahas isu krisis keuangan global, pangan dan keamanan energi, meninjau dua dokumen pernyataan kerja sama ketahanan pangan, serta pengembangan bioenergi dan pernyataan pers bersama. Selain itu, para menteri keuangan APT mengadakan pertemuan ke-13 di Tashkent, Uzbekistan, pada tanggal 2 Mei 2010 mengumumkan bahwa CMIM sudah diberlakukan sejak tanggal 24 Maret 2010, dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa seluruh elemen kunci untuk unit pengawasan mikro-ekonomi kawasan berpusat di Singapura. Pada pertemuan di Chiang Mai, Thailand, tanggal 2-4 November 2009 sudah disampaikan draf usulan Thailand sebagai pemimpin program perencanaan pendidikan APT tahun 2010-2017. APT juga dikembangkan pada upaya penyusunan rencana utama konektivitas.<sup>107</sup>

---

<sup>107</sup> 'ASEAN Plus Three,' *Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia* (daring).

Konsep *peaceful development* telah membawa Cina pada investasi ekonomi di Asia Tenggara dalam kerangka APT. Peranan Cina sangatlah besar di APT, sedangkan negara-negara Asia Tenggara telah membuka pintu seluas-luasnya bagi Cina untuk melakukan investasi ekonomi. Seperti terlihat pada pertemuan-pertemuan APT, dapat diasumsikan bahwa sistem intrusif yang dijalankan Cina di Asia Tenggara mengalami kemajuan yang signifikan. APT telah membuka peluang Cina untuk menanamkan investasi ekonomi di sepuluh negara Asia Tenggara.

Cina dan ASEAN juga telah melakukan perjanjian investasi ekonomi dan perdagangan melalui kerangka *ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA)*. Perjanjian yang ditandatangani di Phnom Penh, Kamboja, pada 4 November 2002 ini bertujuan untuk mewujudkan kawasan perdagangan bebas dengan menghilangkan atau mengurangi hambatan-hambatan perdagangan baik tarif maupun non-tarif; peningkatan akses pasar jasa, peraturan dan ketentuan investasi; serta peningkatan aspek kerja sama ekonomi untuk mendorong hubungan perekonomian para pihak dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat ASEAN dan Cina. ACFTA mempunyai empat tujuan penting:

1. Memperkuat dan meningkatkan kerja sama ekonomi, perdagangan, dan investasi antara negara-negara anggota.
2. Meliberalisasi secara progresif dan meningkatkan perdagangan barang dan jasa serta menciptakan suatu sistem yang transparan untuk mempermudah investasi.
3. Menggali bidang-bidang kerja sama yang baru dan mengembangkan kebijakan yang tepat dalam rangka kerja sama ekonomi antara negara-negara anggota.
4. Memfasilitasi integrasi ekonomi yang lebih efektif dari anggota-anggota terbaru ASEAN – Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam – dan menjembatani kesenjangan pembangunan ekonomi di antara negara-negara anggota.<sup>108</sup>

Usulan pembuatan ACFTA ini diprakarsai oleh Cina, dengan harapan dapat menandingi Amerika Serikat di Asia Tenggara, sekaligus berupaya menggeser AS sebagai mitra dagang ASEAN. ACFTA adalah contoh untuk mewujudkan hasil yang *win-win* dalam kerja sama ekonomi regional. Kesepakatan untuk membentuk ACFTA adalah sebuah indikasi bahwa Cina telah membuka diri bagi dunia luar. Cina

---

<sup>108</sup> 'ASEAN- China Free Trade Area,' *Kementerian Perdagangan Republik Indonesia* (daring), <<http://ditjenkpi.kemendag.go.id/Umum/Regional/Win/ASEAN%20-%20China%20FTA.pdf>>, diakses pada 26 Maret 2016.

mulai lebih memperhatikan kerja sama ekonomi regional, terutama untuk pengaturan perdagangan regional setelah menjadi anggota WTO pada tahun 2001.

Di samping kerja sama investasi ekonomi dan perdagangan dalam kerangka multilateral, Cina juga telah melakukan investasi ekonomi yang strategis di Myanmar. Mengapa Myanmar? Ini berkenaan dengan keuntungan geopolitik dari lokasi Myanmar. Letak geografis Myanmar memegang peranan penting dalam struktur geopolitik Cina di Asia Pasifik dan dunia. Secara historis, Myanmar merupakan negara bukan komunis yang pertama kali mengakui kedaulatan Cina pada tahun 1949. Resmi menjalin hubungan diplomatik pada 1950, pada tahun 1954 Cina dan Myanmar mendeklarasikan kesepakatan untuk tidak saling menyerang, melainkan hidup berdampingan secara damai. Faktor-faktor yang berpengaruh pada kebijakan Cina terhadap Myanmar adalah ekonomi, keamanan, dan politik. Secara ekonomis, misalnya, Myanmar yang berbatasan dengan Samudera Hindia penting bagi Cina, khususnya dalam keamanan sebagian besar kapal tanker Cina yang mengangkut minyak mentah dari Afrika dan Timur Tengah. Pada konteks ini,

adalah menguntungkan bagi Cina jika dapat menjaga hubungan baik dengan Myanmar.<sup>109</sup>

Kepentingan utama Cina di Myanmar adalah ekonomi. Untuk mewujudkan hal tersebut telah berlangsung banyak kunjungan resmi antarpemerintah kedua negara. Misalnya, pada Maret 2009 dan Juni 2010 tiga dari sembilan anggota komite Politburo PKC berkunjung ke Myanmar. Sebelumnya pemimpin Cina tidak pernah mengunjungi Myanmar sejak kunjungan terakhir mantan presiden Jiang Zemin pada tahun 2001. Kunjungan pemerintah Cina ke Myanmar akhir-akhir ini bertujuan untuk menyepakati kerja sama ekonomi yang disebut “Perjanjian Ekonomi Tiga Puluh Lima.” Investasi Cina di Myanmar mulai tumbuh secara signifikan. Perusahaan-perusahaan Cina telah berinvestasi \$18,7 milyar, termasuk \$5 milyar untuk Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), \$2,15 milyar untuk sektor minyak dan gas, serta \$997 juta untuk pertambangan di Myanmar.<sup>110</sup> Selain itu, pada tahun 2010 dan

---

<sup>109</sup> S. Djelantik, *Asia Pasifik: Konflik, Kerja Sama, dan Relasi Antarkawasan*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2015, pp. 257-258.

<sup>110</sup> ‘China’s Myanmar Strategy: Elections, Ethnic Politics and Economics,’ *International Crisis Group* (daring), 21 September 2010, <http://www.crisisgroup.org/~media/Files/asia/northeastasia/B112%20Chinas%20Myanmar%20Strategy%20%20Elections%20Ethnic%20Politics%20and%20Economics.pdf>, diakses pada 28 Maret 2016.

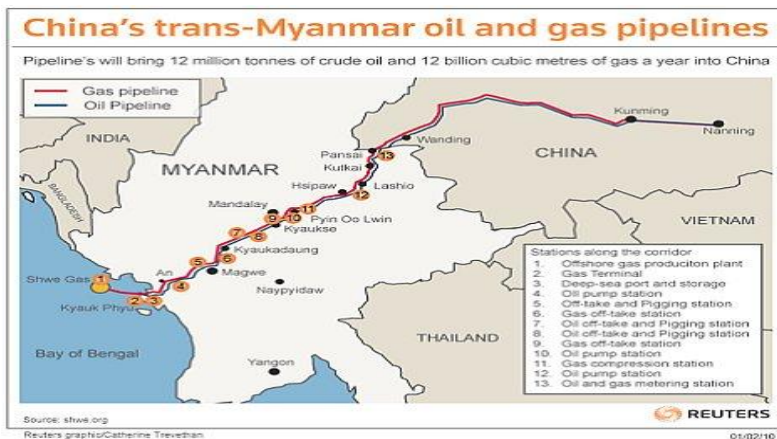
2011 Cina telah melakukan investasi di Myanmar sebesar total \$7,75 milyar untuk pembangunan sumber daya dan energi.<sup>111</sup>

Sejak itu, hubungan bilateral kedua negara dalam hal investasi ekonomi terus meningkat. Bentuk kerja sama yang ada juga termasuk transportasi minyak mentah dan gas alam dari Myanmar ke Cina dan pembangkit listrik tenaga air. Cina berencana merealisasikan pemasangan pipa minyak mentah dari Myanmar hingga ke Cina (lihat Gambar 7). Di samping itu, Cina membantu membangun wilayah Kyaukpyu dengan tujuan menjadikan ia sebagai Zona Ekonomi Khusus (ZEK). Kyaukpyu akan menghubungkan Myanmar dengan Cina melalui jalan raya dan jalur kereta api.<sup>112</sup>

---

<sup>111</sup> Y. Sun, 'China's Strategic Misjudgement on Myanmar,' *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, vol. 31, no. 1, 2012, p. 77.

<sup>112</sup> Djelantik, pp. 262-263.



Gambar 6. Saluran pipa minyak dan gas Myanmar-Cina<sup>113</sup>

Selain itu, Cina memiliki proyek besar lainnya di Myanmar, yaitu pembangunan bendungan hidroelektrik di daerah perbatasan. Investasi Cina ini adalah yang terbesar di Myanmar. Cina berencana membangun tujuh bendungan hidroelektrik di sepanjang daerah aliran hulu sungai Irrawaddy. Kerja sama tersebut meningkatkan perdagangan kedua negara sebesar 52,3% menjadi \$4,4 milyar pada tahun 2010, sedangkan impornya sebesar 49%. Pada tahun 2011, impor meningkat sebesar 75%.<sup>114</sup> Investasi ekonomi dan perdagangan yang besar dari Cina ini dapat diargumentasikan

<sup>113</sup> 'China's Maritime Ambitions: Implications for Regional Security,' *Srilanka Guardian* (daring), <<http://www.srilankaguardian.org/2011/01/chinas-maritime-ambitions-implications.html>>, diakses pada 28 Maret 2016.

<sup>114</sup> Djelantik, p. 262.

sebagai bentuk intrusif paling penting di Myanmar secara khusus dan Asia Tenggara secara umum.

### **C. Sistem Intrusif Australia**

Keterlibatan Australia di kawasan Asia Tenggara tidak terlepas dari hubungannya dengan Amerika Serikat. Australia diyakini banyak pihak sebagai instrumen politik internasional Amerika Serikat di Asia Tenggara. Hubungan internasional Australia dan negara-negara Asia Tenggara terkait dengan sistem intrusif merupakan sesuatu yang sangat signifikan, khususnya dalam konteks pengaturan pakta militer *Five Power Defence Arrangements* (FPDA) sebagai kerangka kerja sama multilateral yang melibatkan dua negara Asia Tenggara, yaitu Singapura dan Malaysia. Selain kedua negara ini, FPDA yang ditandatangani pada tahun 1971 juga melibatkan Inggris, Selandia Baru, dan Australia. Aliansi militer ini berupaya untuk mengambil langkah-langkah secara bersama atau terpisah jika terdapat serangan atau ancaman bagi negara-negara anggota.

FPDA pada awalnya didirikan untuk menyediakan pertahanan udara dari Semenanjung Malaysia dan Singapura setelah penarikan kekuatan militer Inggris dari Terusan Suez. Sejak akhir 1980-an, FPDA mengalami peningkatan setelah tingginya antusiasme dari negara-negara anggota, terutama



berkaitan dengan latihan militer bersama yang lingkup dan kompleksitasnya telah diperluas. Unsur yang paling terlihat dari FPDA adalah Markas Besar Sistem Pertahanan Kawasan Terpadu atau *Headquarters of the Integrated Area Defence System* (HQ-IADS), yang dipimpin langsung oleh *Air Vice Marshal* Angkatan Udara Australia. HQ-IADS terus melakukan kontrol dalam menjaga pertahanan negara-negara anggota, seperti memfasilitasi aset FPDA, yakni 42 kapal perusak, kapal dukungan, pesawat patroli maritim, *Tornado fighters*, dan sistem rudal pertahanan udara.<sup>115</sup>

FPDA dicatat telah menimbulkan profesionalisme militer dan keuntungan bagi negara-negara anggota. Latihan militer bersama FPDA yang dipimpin oleh Australia ini telah memberikan dampak positif bagi negara-negara anggota. Selain itu, Para Menteri menegaskan bahwa kebutuhan untuk memastikan bahwa eksistensi FPDA agar tetap ada maka harus terpenuhinya tuntutan strategis yang berkembang dari perubahan lingkungan dan kebutuhan negara-negara anggotanya.<sup>116</sup> FPDA telah menunjukkan perkembangan ke arah yang lebih signifikan dalam bentuk latihan bersama pada segala matra angkatan tempur. Peningkatan ini untuk menjaga

---

<sup>115</sup> 'Five Power Defence Arrangements (FPDA),' *Global Security* (daring), <<http://www.globalsecurity.org/military/world/int/fpda.htm>>, diakses pada 28 Maret 2016.

<sup>116</sup> 'Five Power Defence Arrangements (FPDA),' *Global Security* (daring).

negara-negara anggota dari ancaman dan serangan negara lain.

FPDA memiliki perangkat tambahan yang signifikan dalam kebijakan, perencanaan, dan struktur operasional. Ada pertemuan rutin menteri pertahanan, yang bertujuan untuk membuat kebijakan FPDA; pertemuan rutin kepala angkatan bersenjata, yang memberikan saran militer profesional untuk menteri; dan Dewan Konsultatif, yang memiliki tanggung jawab untuk kebijakan, perencanaan, dan anggaran. Juga terdapat penajaman pengaturan untuk pengawasan kebijakan, dengan perhatian diberikan untuk memastikan relevansi kegiatan militer, yang telah memungkinkan FPDA berkembang pada era kontemporer.<sup>117</sup> Singapura dan Malaysia telah menjadi mitra penting Australia dalam pemeliharaan keamanan di kawasan. Ini sejalan dengan posisi Australia yang juga terlibat dalam MSSSI.

Pada konteks bilateral, keterlibatan Australia sebagai sistem intrusif terlihat pada hubungan negeri ini dengan Indonesia. Indonesia dan Australia adalah dua negara bertetangga yang memiliki sejarah panjang dalam merangkai hubungan satu sama lain. Hubungan bilateral kedua negara

---

<sup>117</sup> *Five Power Defence Arrangements: A New Zealand Perspective* (daring), 2013, <[http://www.victoria.ac.nz/hppi/centres/strategic-studies/documents/09\\_Five-Power-Defence-Arrangements\\_Strategic-Background-Paper\\_10.2013.pdf](http://www.victoria.ac.nz/hppi/centres/strategic-studies/documents/09_Five-Power-Defence-Arrangements_Strategic-Background-Paper_10.2013.pdf)>, diakses pada 28 Maret 2016.

telah terjalin sejak awal kemerdekaan Indonesia. Pada tahap ini, hubungan bilateral kedua negara cenderung terbuka secara harmonis, di mana Australia merupakan salah satu negara pertama di dunia yang mendukung dan mengakui kemerdekaan Indonesia. Akan tetapi, dalam perjalanan di tahun-tahun 1960-an atau tepatnya pada masa-masa konfrontasi Indonesia-Malaysia, hubungan bilateral kedua negara mulai merenggang seiring dengan turut campurnya Australia yang memihak Malaysia. Kemudian, pada tahun 1968 dengan dimulainya rezim Orde Baru, hubungan bilateral Indonesia dan Australia mulai mengalami kemajuan ke arah normalisasi seiring dengan banyaknya praktik kerja sama bilateral di bidang-bidang politik, ekonomi, pembangunan, sosial-budaya, dan keamanan.

“Bulan madu” hubungan bilateral Indonesia dan Australia tidak berlangsung lama. Hubungan kedua negara kembali memburuk seiring dengan sikap Australia terhadap Indonesia terkait kasus Timor Timur. Dukungan Australia kepada kemerdekaan Timor Timur menciptakan permusuhan dengan Indonesia. Kedua negara bahkan dihadapkan dalam periode paling tegang yang memuncak pada anggapan Indonesia terhadap Australia sebagai aktor yang ikut menyebabkan lepasnya Timor Timur dari Indonesia dan kemudian menjadi negara yang berdaulat Timor Leste pada

tanggal 20 Mei 2002.<sup>118</sup> Setelah itu, hubungan Indonesia dan Australia menjadi penuh ketidakpastian, sampai terjadinya serangkaian serangan terorisme di Indonesia, mulai dari Bom Bali I tahun 2002, bom di Hotel J.W. Marriot tahun 2003, bom di depan Kedutaan Besar Australia tahun 2004, dan Bom Bali II tahun 2005. Peristiwa-peristiwa ini kemudian mengubah haluan kedua negara untuk bersama-sama merumuskan pentingnya hubungan kerja yang intensif. Kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Australia pada tanggal 3-6 April 2005 menghasilkan *Joint Declaration on a Comprehensive Partnership* sebagai payung pengaturan kerja sama di bidang politik, keamanan, ekonomi, dan sosial-budaya.<sup>119</sup>

Pada berbagai fora Indonesia dan Australia kembali dihadapkan pada beragam peristiwa yang mengganjal harmonisasi hubungan bilateral kedua negara, mulai dari penangkapan ratusan nelayan Indonesia dalam operasi penertiban yang dilakukan Australia dengan tuduhan berada pada ZEE Australia, penangkapan warga Australia Schapelle Leigh Corby yang menyelundupkan narkoba dan divonis 20 tahun penjara oleh pengadilan Indonesia pada tanggal 20 Juli

---

<sup>118</sup> C.B. Roberts & A.D. Habir, *Australia's relations with Indonesia: Progress despite economic and socio-cultural constraints?*, National Security College Issue Brief, no. 11, Canberra, 2014, p. 89.

<sup>119</sup> Roberts & Habir, p. 91.

2005, hingga pada tanggal 23 Maret 2006, ketika pemerintah Australia memberikan suaka kepada 42 imigran asal Papua yang diklaim Indonesia sebagai anggota dari Organisasi Papua Merdeka (OPM). Kejadian-kejadian tersebut kemudian menjadi pendorong penting bagi perbaikan hubungan bilateral melalui penyepakatan kerangka kerja sama keamanan bernama *Agreement between the Republic of Indonesia and Australia on the Framework for Security Cooperation* pada tanggal 13 November 2006 di Mataram, Lombok, yang juga dikenal dengan sebutan *Lombok Treaty*.<sup>120</sup>

Wacana pembentukan Perjanjian Lombok berawal sejak masa pasca peristiwa Bom Bali I, ketika Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Susilo Bambang Yudhoyono berkunjung ke Australia guna membicarakan upaya hubungan kerja sama keamanan kedua negara. Dari sini muncul usulan untuk membentuk suatu perjanjian keamanan dengan elemen penghormatan kedaulatan, integritas teritorial, tidak saling mencampuri urusan dalam negeri, dan tidak bernuansa pakta militer yang memuat prinsip-prinsip *Treaty of Amity and Cooperation* (TAC). Kemudian, pada tahun 2004 Indonesia dan Australia bersepakat menandatangani *Joint Declaration on Comprehensive Partnership*. Kedua negara bersepakat untuk melakukan kerja sama dalam bidang keamanan terkait

---

<sup>120</sup> Roberts & Habir, p. 89.

dengan peningkatan kapabilitas polisi, agen intelijen, imigrasi dan bea cukai, serta penjagaan keamanan laut. Selain itu, kedua negara juga bersepakat untuk meningkatkan kerja sama dalam bidang ekonomi dan teknis serta meningkatkan interaksi antarmasyarakat.

Pasca pertemuan ke-8 forum menteri Australia dan Indonesia di Bali, dalam tenggang waktu selama sekitar tiga tahun Indonesia dan Australia melalui dua kali perundingan formal mengenai naskah perjanjian kerja sama pertahanan antara kedua negara, yakni pada bulan Agustus 2006 di Jakarta dan September 2006 di Canberra. Kedua pertemuan ini dilanjutkan dengan pertemuan tingkat menteri luar negeri di New York guna membahas dan menyepakati naskah final *Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Australia on the Framework for Security Cooperation*. Naskah final perjanjian ini yang kemudian ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda dan Menteri Luar Negeri Alexander Downer di Lombok. Diratifikasi oleh pemerintah Australia pada pertengahan Juli 2007 dan oleh pemerintah Indonesia pada tanggal 27 November 2007, Perjanjian Lombok secara garis besar mengatur perilaku Indonesia dan Australia tentang 21 kerja sama dalam 10 bidang, yakni pertahanan, penegakan hukum, terorisme, intelijen, keamanan maritim, keamanan

penerbangan, proliferasi senjata pemusnah masal, tanggap darurat, kerja sama di organisasi internasional terkait keamanan, dan kerja sama antarmasyarakat.<sup>121</sup>

Selain dengan Indonesia, Australia juga memiliki hubungan bilateral terkait keamanan dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya, termasuk dengan dengan Malaysia dan Singapura dalam kerangka FPDA. Hubungan bilateral serupa ditemukan juga di Vietnam, Thailand, dan Kamboja. Namun, negara-negara maritim Asia Tenggara lebih mendapatkan fokus intrusif Australia dengan alasan geopolitis. Bentuk lain dari sistem intrusif yang dijalankan Australia di Asia Tenggara adalah menjalankan pengawasan dan patroli militer secara rutin di Laut Cina Selatan untuk menjaga kepentingan Australia dan AS.<sup>122</sup>

Amerika Serikat memperkuat aset militer di Asia Tenggara dengan menjadikan Australia sebagai tuan rumah beberapa senjata strategis yang paling tangguh. Asisten

---

<sup>121</sup> 'Agreement between Australia and the Republic of Indonesia on the Framework for Security Cooperation,' *Australian Parliament* (daring), 2006, <[http://www.aph.gov.au/parliamentary\\_business/committees/house\\_of\\_representatives/committees?url=jst/6december2006/treaties/indonesia\\_nia.pdf](http://www.aph.gov.au/parliamentary_business/committees/house_of_representatives/committees?url=jst/6december2006/treaties/indonesia_nia.pdf)>, diakses pada 12 November 2015.

<sup>122</sup> 'Patroli Australia di Laut China Selatan Mendapat Tantangan dari Militer China,' *JPNN.com* (daring), 3 Februari 2016, <<http://www.jpnn.com/read/2016/02/03/354602/Patroli-Australia-di-Laut-China-Selatan-Mendapat-Tantangan-dari-Militer-China->>, diakses pada 29 Maret 2016.

Menteri Pertahanan AS David Shear mengatakan bahwa AS akan menambahkan aset angkatan udara dan pembom jarak jauh tipe B-1 di Australia dengan tujuan pencegah signifikan terhadap efek destabilisasi Cina di Laut Cina Selatan. Langkah ini adalah wujud dari rencana pemerintahan Obama untuk merealisasikan kebebasan navigasi di wilayah laut tersebut. Hal ini langsung direspon oleh Kementerian Luar Negeri Cina yang menyatakan bahwa Beijing akan tegas dan serius menjaga dan mempertahankan kedaulatan teritorialnya.<sup>123</sup> Angkatan Udara Australia telah mengirim lebih banyak patroli di atas area Laut Cina Selatan yang disengketakan oleh beberapa negara Asia Tenggara dan Cina. Departemen Pertahanan Australia menjelaskan Operasi *Gateway* sebagai kontribusi abadi Australia di Asia Tenggara.<sup>124</sup>

Pada konteks lain, Australia menanamkan investasi dan menjalankan perdagangan dengan negara-negara Asia Tenggara melalui ASEAN. Australia dan ASEAN bertekad

---

<sup>123</sup> 'AS Siapkan Bomber B-1 di Australia Untuk Urusan Laut Cina Selatan,' *Jakarta Greater* (daring), 15 May 2015, <<http://jakartagreater.com/as-siapkan-bomber-b-1-di-australia-untuk-urusan-laut-china-selatan/>>, diakses pada 29 Maret 2016.

<sup>124</sup> A. Greene, 'Patroli Australia di Laut China Selatan Mendapat Tantangan dari Militer China,' *ABC Radio Australia* (daring), 4 February 2016, <<http://www.radioaustralia.net.au/indonesian/2016-02-04/patroli-australia-di-laut-china-selatan-mendapat-tantangan-dari-militer-china/1543438>>, diakses pada 29 Maret 2016.



untuk meningkatkan kerja sama perdagangan dan investasi dengan Program Kerja Sama Pembangunan ASEAN-Australia Tahap II (AADCP-II). Di bawah program ini, Australia akan memberikan A\$57 juta kepada ASEAN selama lebih dari tujuh tahun untuk mendukung penyatuan ekonomi yang lebih luas di kawasan.<sup>125</sup> Selain itu, terdapat pula persetujuan pembentukan *ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area* (AANZFTA) sebagai kesepakatan perdagangan paling ambisius Australia, oleh karena perdagangan bebas ini sangat menguntungkan Australia dari berbagai aspek, seperti ekonomi, keamanan, dan geopolitik. AANZFTA adalah program perdagangan bebas jangka panjang yang melibatkan banyak negara, mencakup banyak sektor, termasuk barang-barang, jasa, investasi, dan kekayaan intelektual.<sup>126</sup>

Langkah awal pembentukan AANZFTA adalah dengan disepakatinya *Joint Declaration of the Leaders of ASEAN-Australia and New Zealand Commemorative Summit* pada

---

<sup>125</sup> 'Indonesia, ASEAN dan Australia Mendorong Maju Penyatuan Ekonomi,' *Kedutaan Besar Australia* (daring), 13 Juni 2008, <[http://indonesia.embassy.gov.au/jaktindonesian/PB08\\_ASEAN.html](http://indonesia.embassy.gov.au/jaktindonesian/PB08_ASEAN.html)>, diakses pada 29 Maret 2016.

<sup>126</sup> 'ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Agreement,' *Australian Government: Department of Foreign Affairs and Trade* (daring), <<http://dfat.gov.au/trade/agreements/aanzfta/pages/asean-australia-new-zealand-free-trade-agreement.aspx>>, diakses pada 29 Maret 2016.

tanggal 30 November 2004 di Vientiane, Laos. Dalam kesepakatan ini tertuang *Guiding Principles for Negotiation on ASEAN-Australia and New Zealand Free Trade Area*. Ini dilanjutkan dengan proses negosiasi AANZFTA pada tahun 2005, dan setelah melalui 15 putaran perundingan Persetujuan AANZFTA diselesaikan pada bulan Agustus 2008. Persetujuan AANZFTA ditandatangani oleh para menteri ekonomi ASEAN, Australia, dan Selandia Baru pada tanggal 27 Februari 2009 di Hua Hin, Thailand, untuk kemudian disepakati oleh semua negara pada tahun 2012.<sup>127</sup>

Terdapat beberapa kepentingan-kepentingan kunci Australia dalam kerja sama AANZFTA. Di antara kepentingan itu adalah penghapusan tarif; penyediaan peluang baru bagi eksportir Australia untuk memasuki rantai pasokan internasional di kawasan Asia Tenggara; promosi kepastian yang lebih besar untuk pemasok jasa Australia dan investor, termasuk melalui perlindungan hukum tertentu untuk investasi di kawasan Asia Tenggara; dan penyediaan *platform*

---

<sup>127</sup> 'ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area,' *Kementerian Perdagangan Republik Indonesia* (daring), <<http://ditjenkpi.kemendag.go.id/Umum/Regional/Win/ASEAN%20-%20ANZ%20FTA.pdf>> dan 'ASEAN Australia New Zealand FTA (AANZFTA),' *New Zealand Ministry of Foreign Affairs and Trade* (daring), <<https://www.mfat.govt.nz/en/trade/free-trade-agreements/free-trade-agreements-in-force/aanzfta-asean-australia-new-zealand-fta/>>, diakses pada 29 Maret 2016.

untuk keterlibatan ekonomi yang sedang berlangsung dengan ASEAN melalui berbagai agenda, proyek kerja sama ekonomi, dan kegiatan usaha.<sup>128</sup> Dari uraian ini dapat diasumsikan bahwa keterlibatan Australia di Asia Tenggara merupakan bagian dari sistem intrusif yang dijalankan guna mencapai kepentingan politik di kawasan.

Bab ini telah menguraikan pelaksanaan sistem intrusif di Asia Tenggara oleh tiga negara besar. Sistem intrusif yang dijalankan Amerika Serikat di kawasan Asia Tenggara dapat dilihat dengan jelas pada pengaturan multilateral dalam kerangka MSSSI yang melibatkan Singapura, Indonesia dan Malaysia. Pengaturan bilateral dan penempatan militer terkait perjanjian pertahanan dapat ditemukan di Singapura, Thailand, dan Filipina. Di samping itu, pada aspek investasi ekonomi, Amerika Serikat mempunyai perjanjian dengan ASEAN dan secara bilateral dengan beberapa negara Asia Tenggara.

Partisipasi lain datang dari kekuatan intrusif Cina dan Australia. Cina telah melakukan sistem intrusif dengan Indonesia, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Kebangkitan Cina, khususnya di bidang ekonomi, menuai respon positif dari ASEAN untuk bekerja sama dalam kerangka multilateral.

---

<sup>128</sup> 'ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Agreement,' *Australian Government: Department of Foreign Affairs and Trade* (daring).

Namun, respon berbeda diterima Cina dalam hal keamanan di kawasan. Sementara itu, kekuatan intrusif Australia diwujudkan dalam bentuk pengaturan multilateral FPDA yang sangat signifikan. Pengaturan tersebut telah melibatkan Singapura dan Malaysia sebagai anggota. Selain itu, Australia juga memiliki pengaturan investasi ekonomi dan perdagangan dengan ASEAN. Kekutan intrusif dari Amerika Serikat, Cina, dan Australia dalam berbagai bentuknya diyakini telah memberikan implikasi pada tidak terjadinya perang di kawasan sehingga keamanan kawasan dapat terjaga hingga saat ini. Dampak positif ini muncul karena sistem intrusif menyumbang pada kohesi, level kekuatan, dan struktur hubungan di kawasan, sehingga menimbulkan keseimbangan kekuatan. Hal-hal inilah yang akan dibahas lebih lanjut pada bab berikutnya.

## **BAB IV**

### **IMPLIKASI SISTEM INTRUSIF**

Anomali keamanan di kawasan Asia Tenggara yang memiliki konflik dan ketegangan keamanan sangat tinggi tidak terlepas dari keterlibatan negara-negara eksternal. Kekuatan intrusif – dalam kerangka hukum internasional dan dilakukan baik secara multilateral maupun bilateral, intervensi militer, dan investasi ekonomi – telah menyumbang pada tidak terjadinya perang di kawasan Asia Tenggara. Keterlibatan sistem intrusif memberikan dampak positif (stabilitas) dan secara signifikan berimplikasi pada tiga variabel penting, yakni level kekuatan, kohesi, dan struktur hubungan.<sup>129</sup> Variabel-variabel ini yang menimbulkan keseimbangan kekuatan, baik militer maupun ekonomi, sehingga menciptakan keamanan. Bab ini akan menjelaskan implikasi keseimbangan tersebut sebagai hasil dari bekerjanya sistem intrusif.

#### **A. Anomali di Laut Cina Selatan**

Kawasan Laut Cina Selatan meliputi perairan dan daratan dari gugusan kepulauan dua pulau besar, yakni Spratly dan Paracel, serta bantaran Sungai Macclesfield dan Karang

---

<sup>129</sup> Cantori & Spiegel, pp. 30-33.

Scarborough yang terbentang luas dari Selat Malaka sampai ke Selat Taiwan. Karena wilayah ini sangat luas dan memiliki sejarah penguasaan yang berganti-ganti, sering terjadi benturan kepentingan di wilayah ini. Dewasa ini, beberapa negara Asia Tenggara – Brunei Darussalam, Filipina, Vietnam, dan Malaysia – terlibat saling klaim dengan Cina dan Taiwan atas sebagian ataupun seluruh kawasan tersebut. Selain itu, Laut Cina Selatan memiliki berbagai kekayaan alam, misalnya cadangan minyak yang sangat banyak. Kekayaan alam di wilayah ini telah menimbulkan konflik multilateral. Kepentingan ekonomi politik memicu klaim tumpang tindih dan menimbulkan isu keamanan tradisional yang berimplikasi pada kemungkinan perang terbuka antarnegara.

Sengketa terkait kedaulatan teritorial di Laut Cina Selatan sesungguhnya merujuk pada kawasan laut dan daratan di Kepulauan Paracel dan Spratly. Cina mengklaim bahwa kedua kepulauan ini adalah miliknya, sedangkan Vietnam dan Filipina juga mengklaim hal yang serupa. Malaysia hanya mengklaim sebagian dari Spratly berdasarkan ZEE, yang juga diikuti oleh Brunei. Konflik dan ketegangan di kawasan Laut Cina Selatan merupakan sengketa yang menyangkut kedaulatan teritorial negara-negara berdaulat, di mana penyelesaian sengketa dengan jalan diplomasi sejauh ini

belum berhasil. Apa yang dikatakan oleh Sir Ernest Satow, *“diplomacy is the application of intelligence and tact to conduct of official relations between the government of independent state, the conduct of business between states by peaceful means,”*<sup>130</sup> tidak berhasil diterapkan di Laut Cina Selatan. Yang muncul di Laut Cina Selatan adalah kegagalan dalam mempraktikkan konsep diplomasi. Yang menarik, alternatif dari diplomasi, yaitu perang, juga tidak terjadi di kawasan. Menurut ahli strategi perang Carl von Clausewitz, *“where war is identified as a political instrument, a continuation of political activity by other means.”*<sup>131</sup> Clausewitz mengajarkan bahwa perang adalah sebuah instrumen politik yang merupakan kelanjutan dari kegiatan politik dengan cara lain. Ketika diplomasi gagal dijalankan atau upaya menempuh jalan damai tidak berhasil, maka perang menjadi jalan terakhir. Dengan kata lain, perang adalah implikasi dari diplomasi yang gagal. Namun demikian, yang disampaikan Clausewitz juga tidak terbukti di Laut Cina Selatan.

Situasi ini menciptakan anomali keamanan yang unik di Laut Cina Selatan. Sekalipun terdapat konstelasi konflik dan

---

<sup>130</sup> L.T. Woods, *Asia-Pacific Diplomacy: Non Governmental Organizations and International Relations*, UBC Press, Canada, 1960, p. 19.

<sup>131</sup> C. von Clausewitz, *On War*, Princeton University Press, New Jersey, 1976, p. 87.

ketegangan politik yang tinggi, juga kegagalan diplomasi yang memunculkan realita konflik yang berkepanjangan, namun perang terbuka antarnegara tidak terjadi. Yang hadir adalah keamanan tanpa perang dalam situasi konflik. Berbagai kepentingan teritorial yang berbenturan di wilayah ini seharusnya bisa mendorong perang besar antarnegara untuk mendapatkan kepentingan-kepentingan nasional. Upaya penyelesaian damai yang gagal telah menimbulkan saling unjuk kekuatan (*show of force*) di wilayah tersebut. Selain itu, juga muncul kompetisi dari negara-negara yang bersengketa untuk memodernisasi angkatan perang dan menambahkan anggaran belanja militer masing-masing. Walaupun upaya-upaya tersebut menghasilkan ketegangan politik dan keamanan, setiap negara tetap melakukannya. Cina memiliki personil militer yang banyak dan peralatan perang yang canggih, serta selalu meningkatkan anggaran militernya dalam beberapa tahun terakhir. Filipina berupaya untuk meningkatkan kekuatan militernya dengan melakukan perjanjian bilateral dengan Amerika Serikat, sedangkan Vietnam hingga tahun 2014 telah banyak mengeluarkan anggaran untuk memodernisasi angkatan perangnya. Malaysia, melalui pakta militer FPDA yang melibatkan Australia, terus-menerus melakukan latihan militer secara bersama-sama.



Modernisasi angkatan perang negara-negara Asia Tenggara yang terlibat sengketa Laut Cina Selatan dengan cara melakukan aliansi pertahanan dengan negara-negara luar kawasan disebut oleh Cantori dan Spiegel sebagai sistem intrusif. Sebagai contoh, Vietnam dan Filipina melakukan kerja sama pertahanan dengan Amerika Serikat. Pada tahun 2014, Vietnam tercatat memiliki alutsista angkatan darat sebesar 8444 unit, angkatan udara 404 unit, dan angkatan laut 65 unit, serta personel tentara aktif sebanyak 412.000. Filipina juga telah berusaha memodernisasi angkatan perangnya, yang meliputi angkatan darat 1093 unit, angkatan udara 126 unit, angkatan laut 120 unit, dan 220.000 personel aktif.<sup>132</sup> Kedua negara telah melakukan latihan militer bersama-sama dengan AS di wilayah Laut Cina Selatan.

Amerika Serikat menempatkan pasukan militernya di Filipina untuk memperkuat Angkatan Perang Filipina. Melalui *The Military Bases Agreement*, kedua negara bersepakat untuk menghadirkan intervensi militer AS di kawasan, khususnya Filipina, secara legal. Kehadiran militer AS di Filipina telah mempengaruhi perilaku-perilaku negara lain yang terlibat dalam sengketa Laut Cina Selatan. Latihan bersama antara AS dan Filipina di wilayah Laut Cina Selatan

---

<sup>132</sup> 'The SIPRI Military Expenditure Database,' *SIPRI* (daring) dan 'Comparisons of World Military Strengths,' *Global Fire Power* (daring).

merupakan pertunjukan kekuatan militer sekaligus *deterrence* bagi pengklaim-pengklaim lainnya.<sup>133</sup> Filipina dan AS mengadakan latihan bersama di sebuah pangkalan angkatan laut Filipina yang menghadap di Laut Cina Selatan pada tahun 2013 melibatkan sekitar 2.300 marinir dari kedua negara. Kehadiran militer AS di Filipina ini akan dilakukan secara rutin,<sup>134</sup> termasuk program tahunan *Cooperation Afloat Readiness and Training* (CARAT) yang melibatkan hampir seribu tentara kedua negara.<sup>135</sup> Untuk mengimbangi kekuatan Cina dan Vietnam yang memiliki kekuatan militer lebih besar dibandingkan Filipina, AS hadir sebagai negara berkekuatan besar dalam kerangka kerja sama bilateral dengan Filipina. Sistem intrusif yang dijalankan Amerika Serikat di Filipina berdampak pada keseimbangan kekuatan di Laut Cina Selatan.

---

<sup>133</sup> 'Filipina-AS Tandatangani Kesepakatan Pertahanan,' *Sumbar.AntaraNews.Com* (daring), 28 April 2014, <<http://www.antasumbar.com/berita/95465/filipina-as-tandatangani-kesepakatan-pertahanan.html>>, diakses pada 23 Maret 2016.

<sup>134</sup> 'AS & Filipina gelar latihan perang di dekat Laut Cina Selatan,' *SindoNews.com* (daring), 19 September 2013, <<http://international.sindonews.com/read/784850/40/as-filipina-gelar-latihan-perang-di-dekat-laut-cina-selatan-1379536628>>, diakses pada 30 Maret 2016.

<sup>135</sup> 'AS-Filipina Latihan Perang Dekat Perairan Sengketa,' *SindoNews.com* (daring), 20 Juni 2014, <<http://international.sindonews.com/read/875562/40/as-filipina-latihan-perang-dekat-perairan-sengketa-1403270300>>, diakses pada 30 Maret 2016.

Di samping itu, sistem intrusif yang hadir dalam kerangka multilateral FPDA yang melibatkan Malaysia juga memberikan kontribusi penyeimbang kekuatan di Laut Cina Selatan. Unsur yang paling terlihat dari FPDA adalah Markas Besar Sistem Pertahanan Kawasan Terpadu (HQ-IADS), yang dipimpin langsung oleh Angkatan Udara (AU) Australia. Bagian ini merupakan pengaturan untuk melakukan latihan militer bersama. Melalui pengaturan ini Malaysia telah mendapatkan kemajuan yang begitu pesat di bidang militer. Malaysia terus melakukan peningkatan anggaran pertahanan mulai dari tahun 2001 sebesar \$2,248 milyar, pada tahun 2005 menjadi \$4,183 milyar dan 2014 sebesar \$4,700 milyar. Malaysia juga terus memodernisasi angkatan perangnya. Pada tahun 2014 Malaysia tercatat telah memiliki alutsista kekuatan darat dengan total 1630 unit, kekuatan udara 217 unit dan kekuatan laut 61 unit.<sup>136</sup> Kekuatan multilateral FPDA telah memberikan kepada Malaysia hal yang serupa dengan Filipina, yaitu keseimbangan kekuatan yang diyakini dapat menciptakan keamanan di Laut Cina Selatan. Dalam konteks sistem intrusif, pengaturan multilateral dapat berdampak pada stabilitas kawasan karena memberikan *deterrence* bagi pihak-pihak lain yang mungkin akan bersikap kasar.

---

<sup>136</sup> 'The SIPRI Military Expenditure Database,' *SIPRI* (daring) dan 'Comparisons of World Military Strengths,' *Global Fire Power* (daring).

Cina sendiri telah menempatkan militernya di sekitar Laut Cina Selatan, yaitu di pulau buatan *Fiery Cross Reef* di tepi barat Kepulauan Spratly. Ini merupakan pangkalan udara yang dibangun dengan panjang 3.000 meter dan lebar 200 sampai 300 meter. Pertunjukan militer di Laut Cina Selatan secara unilateral telah mengimbangi kekuatan AS di Filipina dan Australia dalam kerangka FPDA di Malaysia sehingga memunculkan kompetisi militer. Fenomena ini bukanlah sesuatu yang negatif, namun menciptakan stabilitas kawasan. Unilateralisme Cina di Laut Cina Selatan, eksistensi Amerika Serikat di Filipina dan Vietnam serta Australia (FPDA) di Malaysia merupakan instrumen keamanan dalam sistem intrusif yang berdampak pada stabilitas Laut Cina Selatan.

Semua ini menunjukkan bahwa keamanan dapat lahir dalam situasi konflik dan ketegangan antanegara dapat dikendalikan melalui hubungan baik antara negara-negara yang berkonflik. Dalam konteks Laut Cina Selatan, peran ASEAN tidak bisa dikesampingkan. Cina telah mengikatkan diri dalam kerja sama dengan ASEAN dalam bentuk *ASEAN Plus Three* (APT) dan *ASEAN China Free Trade Area* (ACFTA). Stabilitas keamanan merupakan dampak dari sistem intrusif pada level kekuatan setiap negara yang terlibat. Secara khusus, dampak itu terlihat pada kekuatan militer, yaitu transfer teknologi perang, bantuan personil, dan ikatan

militer yang kuat, serta kekuatan ekonomi. Mengingat sistem intrusif dijalankan oleh negara-negara berkekuatan besar, maka dapat dipahami bahwa kekuatan ekonomi negara yang mengalami sistem tersebut meningkat.

Dampak sistem instrusif pada stabilitas keamanan juga muncul dalam aspek hubungan internasional. Misalnya, hubungan Vietnam dan Filipina yang mengalami peningkatan. Kedua negara menyatakan bahwa peningkatan hubungan ke tahap yang lebih tinggi bukan hanya menciptakan keakraban, namun juga memberikan sumbangan positif terhadap perdamaian, kestabilan, perkembangan, dan kerja sama di kawasan.<sup>137</sup> Hal serupa juga diharapkan dari hubungan kemitraan strategis Vietnam-Malaysia. Pemerintah kedua negara menyampaikan pernyataan bersama tentang kerangka kerja sama komprehensif abad ke-21 yang telah dan sedang memberikan banyak keuntungan kepada Vietnam dan Malaysia. Malaysia sekarang adalah salah satu di antara 10 mitra dagang yang paling besar bagi Vietnam. Jika pada tahun 2010 angka nilai perdagangan bilateral kedua negara

---

<sup>137</sup> 'Pemerintah Vietnam Selalu Menciptakan Syarat Kepada Badan-Badan Usaha Filipina Untuk Melakukan Investasi dan Bisnis Secara Efektif di Vietnam,' *VOV5* (daring), 22 Oktober 2015, <<http://vovworld.vn/id-ID/Berita/Pemerintah-Vietnam-selalu-menciptakan-syarat-kepada-badanbadan-usaha-Filipina-untuk-melakukan-investasi-dan-bisnis-secara-efektif-di-Vietnam/378297.vov>>, diakses pada 4 April 2016.

mencapai \$5,5 milyar, pada tahun 2014 angka ini telah mencapai \$8 milyar.<sup>138</sup>

Sistem intrusif oleh Amerika Serikat, Australia dan Cina di Laut Cina Selatan menciptakan level kekuatan militer dan ekonomi serta struktur hubungan internasional antarnegara yang berkonflik. Hubungan internasional Vietnam, Malaysia, Filipina, dan Brunei Darussalam mengalami peningkatan, dan ini adalah dampak yang positif di tengah-tengah konflik Laut Cina Selatan. Kekhawatiran negara-negara ini kepada militer Cina yang ditempatkan di Laut Cina Selatan juga dapat dikurangi karena keberadaan Amerika Serikat dan Australia. Anomali keamanan dalam bentuk tidak terjadinya perang secara terbuka di tengah-tengah konflik dan ketegangan Laut Cina Selatan merupakan dampak yang ditimbulkan sistem intrusif terhadap negara-negara yang berkonflik di kawasan.

## **B. Anomali di Asia Tenggara Maritim**

Asia Tenggara Maritim (ATM) terdiri dari Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam dan Filipina. Asia Tenggara Maritim ini merupakan bagian terpenting dalam kawasan Asia Tenggara mengingat banyaknya konflik

---

<sup>138</sup> 'Memperkuat kerja sama antara Vietnam dengan Malaysia dan Singapura,' *VOV5* (daring), 7 Agustus 2015, <<http://vovworld.vn/id-ID/Ulasan-Berita/Memperkuat-kerjasama-antara-Vietnam-dengan-Malaysia-dan-Singapura/357574.vov>>, diakses pada 4 April 2016.

teritorial dan negara-negara maritim yang menjalin aliansi militer dengan pihak luar kawasan, sehingga tampak persaingan pada peningkatan militer yang terus-menerus dilakukan. Salah satu negara ATM, yaitu Indonesia, menunjukkan respon yang menarik dalam hal keterlibatan sistem intrusif di kawasan. Indonesia, yang menjalankan prinsip politik luar negeri bebas aktif, tidak memiliki pakta pertahanan dengan negara-negara lain, namun tetap melakukan peningkatan alutsista dan anggaran belanja pertahanan serta menjalin hubungan bilateral yang kuat dengan Cina.

Seperti telah disampaikan, Indonesia pernah memiliki hubungan yang tegang dengan Malaysia dan Singapura dalam sejumlah kasus. Sebagai respon terhadap hubungan konfliktual ini, Indonesia terus melakukan peningkatan anggaran pertahanan dari sebesar \$1,762 milyar di tahun 2001 hingga menjadi \$6,900 milyar pada tahun 2014. Akan halnya modernisasi angkatan perang, sampai dengan tahun 2014 Indonesia memiliki alutsista total untuk kekuatan darat 1760 unit, kekuatan udara 405 unit, dan kekuatan laut 171 unit.<sup>139</sup> Peningkatan anggaran dan modernisasi angkatan perang adalah penting mengingat militer Indonesia memiliki karakter yang ofensif sehingga membuka kemungkinan besar bagi pecahnya

---

<sup>139</sup> 'The SIPRI Military Expenditure Database,' *SIPRI* (daring) dan 'Comparisons of World Military Strengths,' *Global Fire Power* (daring).

perang dengan negara-negara tetangganya. Namun, karakter militer Indonesia ini tidak berdampak pada perang antarnegara.

Anomali keamanan yang dimunculkan Indonesia terhadap Malaysia dan negara-negara tetangga lainnya tidak terlepas dari pengaruh sistem intrusif yang dijalankan negara-negara kuat luar kawasan. Konfrontasi Malaysia tahun 1960-an, misalnya, adalah kebijakan keras Indonesia terhadap pengaruh imperialisme di kawasan. Pada tahun 1960-1970, Malaysia belum memiliki kekuatan untuk menahan sikap agresif Indonesia. Namun, pada tahun 1971, pakta pertahanan FPDA ditandatangani oleh lima negara, termasuk Malaysia. Aliansi ini memberikan pengaruh besar terhadap Malaysia, karena sejak adanya pakta pertahanan tersebut konfrontasi tidak terjadi lagi, walaupun kedua negara memiliki konflik begitu banyak. Dalam hal ini, FPDA yang memberikan dampak keamanan terlihat pada latihan-latihan bersama yang dipimpin langsung oleh Australia dalam pengaturan HQ-IADS.

Di samping itu, untuk mengimbangi kekuatan Malaysia dan Singapura, Cina hadir sebagai kekuatan intrusif yang melakukan hubungan bilateral dengan Indonesia, yaitu akuisisi peralatan militer, transfer teknologi, kerja sama produksi, dan kerja sama pemasaran sejumlah peralatan

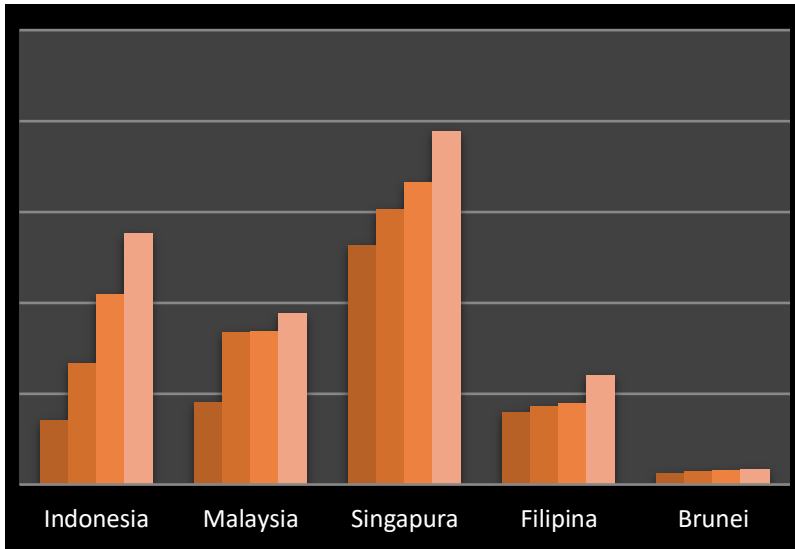


militer, termasuk rudal C-705. Kehadiran Cina di Indonesia sebagai kekuatan intrusif berdampak pada peningkatan anggaran belanja pertahanan Indonesia dan modernisasi alutsista Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Menurut Cantori dan Spiegel, "*the pattern of the participation of external powers in a subordinate system is the constant state of interaction between the balance of power among the external powers in the region and the balance among the peripheral and core nations.*"<sup>140</sup> Terjadinya keseimbangan kekuatan antara tiga negara eksternal di kawasan dan negara-negara Asia Tenggara Maritim akan menghasilkan keamanan. Konflik di kawasan Asia Tenggara Maritim tidak berdampak pada perang terbuka antarnegara karena adanya aliansi pertahanan FPDA dan kerja sama militer Amerika Serikat dengan Singapura dan Filipina, lalu MSSI, serta kerja sama Indonesia dengan Cina. Sistem intrusif ini berdampak pada level kekuatan militer (lihat Grafik 2), kekuatan ekonomi, serta kohesi ekonomi, politik, dan organisasi di kawasan. Sistem intrusif yang menimbulkan level kekuatan akan sangat signifikan dalam memberikan dampak positif karena menciptakan keseimbangan kekuatan (*balance of power*).

---

<sup>140</sup> Cantori & Spiegel, p. 33.



Grafik 2. Anggaran pertahanan Asia Tenggara Maritim (dalam milyar dolar)<sup>141</sup>

Telah disampaikan sebelumnya bahwa peningkatan anggaran pertahanan untuk memodernisasi alutsista berdampak pada konflik dan ketegangan negara-negara Asia Tenggara. Namun, di lain sisi, dalam kaitannya dengan sistem intrusif di kawasan Asia Tenggara Maritim, fenomena ini telah menciptakan keseimbangan kekuatan militer. Di Asia Tenggara Maritim, aspek keseimbangan kekuatan tidak terlepas dari sistem intrusif. Dalam grafik di atas, misalnya, terlihat Indonesia dan Malaysia kurang seimbang dalam hal

<sup>141</sup> 'The SIPRI Military Expenditure Database,' *SIPRI* (daring) dan 'Comparisons of World Military Strengths,' *Global Fire Power* (daring).

penganggaran alutsista pertahanan, namun aliansi FPDA telah menjadi penyeimbang bagi Malaysia terhadap Indonesia, di mana keterlibatan dalam FPDA telah berdampak pada kekuatan militer Malaysia. FPDA merupakan aliansi pakta keamanan yang menjamin keamanan Malaysia.

Jika kita memperhatikan grafik di atas, Indonesia pada tahun 2001 dan 2005 memiliki anggaran militer yang lebih rendah dibandingkan Malaysia. Hal tersebut disebabkan antara lain karena embargo militer AS terhadap Indonesia sejak kasus Timor Timur pada tahun 1999. Embargo ini menyebabkan alutsista Indonesia banyak yang harus di-*'grounded'* sementara karena tidak memiliki suku cadang untuk mendukung operasinya. Sebagai contoh, sebagian onderdil pesawat F-16 milik TNI AU harus dijadikan suku cadang bagi pesawat F-16 lainnya. Dari 10 pesawat F-16 yang dimiliki Indonesia, tidak lebih dari empat pesawat saja yang bisa diterbangkan.<sup>142</sup> Embargo ini sangat menguntungkan Malaysia dalam hal persaingan alutsista. Namun, setelah Indonesia dibebaskan dari embargo militer, pada tahun 2011 dan 2014 anggaran pertahanan Indonesia jauh melampaui Malaysia. Hal ini merupakan ancaman besar bagi Malaysia

---

<sup>142</sup> 'Embargo Militer : Masa Suram Alutsista Militer Indonesia,' *AnalisisMiliter.com* (daring), 14 April 2012, <[http://analisismiliter.com/artikel/part/8/Embargo\\_Militer\\_Masa\\_Suram\\_Alutsista\\_Militer\\_Indonesia](http://analisismiliter.com/artikel/part/8/Embargo_Militer_Masa_Suram_Alutsista_Militer_Indonesia)>, diakses pada 3 April 2016.

dalam hal keamanan. Apalagi saat itu kedua negara diperhadapkan pada kasus Ambalat yang belum ada solusinya. Cantori dan Spiegel mengatakan bahwa “*level of power, of more direct effect on the balance of power of a subordinate system is a change in military power.*”<sup>143</sup> Meskipun dari sisi anggaran kalah besar, namun Malaysia mendapatkan dukungan dari kekuatan intrusif dalam kerangka FPDA sebagai payung keamanan. FPDA telah menciptakan *deterrence* bagi Indonesia sehingga klaim Malaysia terhadap segmen Ambalat yang menimbulkan konflik berkepanjangan tidak menimbulkan perang besar-besaran antarkedua negara. Hal yang serupa terjadi pada kasus status kepemilikan Pulau Sipadan dan Ligitan, yang akhirnya juga dimenangkan oleh Malaysia melalui mekanisme penyelesaian multilateral. Ini adalah bukti bahwa konflik kedua negara tidak dapat diselesaikan dengan cara perang terbuka karena alasan aliansi, sehingga penyelesaian lain tanpa melibatkan militer menjadi pilihan.

Di samping itu, FPDA yang juga melibatkan Singapura berdampak pada level kekuatan. Luas wilayah Singapura hanya 719,1 km<sup>2</sup>, sangat jauh bila dibandingkan dengan wilayah Indonesia seluas 1.919.000 km<sup>2</sup>. Luas wilayah tersebut mengindikasikan bahwa jika terjadi perang, maka

---

<sup>143</sup> Cantori & Spiegel, p. 31.

Indonesia mungkin akan memenangkan peperangan karena memiliki wilayah yang lebih luas. Hans Morgenthau menulis bahwa geografi merupakan faktor paling stabil yang menentukan kekuatan suatu negara; ia adalah elemen penting bagi kekuatan nasional.<sup>144</sup> Terlepas dari sistem intrusif, pernyataan Morgenthau ini menguatkan perspektif bahwa Indonesia memiliki kekuatan nasional yang tidak dimiliki oleh Singapura. Mengingat pertahanan dan kekuatan nasional adalah barang publik, maka pada dasarnya negara-negara yang lebih besar wilayahnya dapat memberikan keamanan yang lebih baik.<sup>145</sup>

Jika kita bandingkan Indonesia dan Singapura tanpa kekuatan intrusif, maka Indonesia masih memiliki keunggulan dalam hal jumlah personil, medan pertempuran yang luas, dan juga memiliki alutsista militer yang cukup memadai sejak 2011. Singapura jauh melampaui Indonesia dalam hal anggaran pertahanan, sebuah keunggulan yang tidak terlepas dari sistem intrusif AS. Belum lagi, posisi Singapura yang dihimpit oleh Malaysia di utara dan Indonesia di selatan. Secara geopolitik, boleh dikatakan Singapura telah kalah sebelum bertarung. Dengan posisi tersebut, dapat dipahami

---

<sup>144</sup> Morgenthau, pp. 135-136.

<sup>145</sup> A. Alesina & E. Spolaore, 'War, peace, and the size of countries,' *Journal of Public Economics*, vol. 89, 2005, pp. 1333-1354, <[http://scholar.harvard.edu/files/alesina/files/war\\_peace\\_and\\_the\\_size\\_of\\_countries.pdf](http://scholar.harvard.edu/files/alesina/files/war_peace_and_the_size_of_countries.pdf)>, diakses pada 6 Mei 2016.

bahwa keamanan ketiga negara memiliki tendensi ketegangan yang tinggi. Namun, sistem intrusif Australia (FPDA) dan Amerika Serikat (DCA) telah memberikan tambahan kekuatan kepada Singapura sehingga keduanya dapat menjadi *deterrence* bagi Indonesia dan Malaysia. Di samping itu, peningkatan anggaran Singapura lebih tinggi dibandingkan negara-negara ATM lainnya. Keterlibatan politik Amerika Serikat di Singapura menjadikan negara ini memiliki tingkatan kekuatan militer yang tinggi dan kuat dan dapat mengimbangi negara besar seperti Indonesia. Sistem intrusif AS dan Australia telah mendorong perubahan perilaku negara-negara yang berkonflik dengan Singapura. Pangkalan militer AS di Singapura merupakan pangkalan militer terkuat di Asia Tenggara. Dengan kata lain, menyerang Singapura sama saja menyerang Amerika Serikat; menyerang Singapura sama dengan bunuh diri masal.<sup>146</sup>

Pada konteks keamanan Asia Tenggara Maritim, Singapura, Malaysia, dan Indonesia adalah aktor-aktor yang penting dalam menjaga keamanan kawasan. Ketiga negara tersebut memiliki level kekuatan yang boleh dikatakan cukup berimbang (lihat Tabel 3), sehingga menciptakan hubungan

---

<sup>146</sup> 'Pangkalan Militer Paling Mematikan di ASEAN,' *IndonesiaReview.com* (daring), 1 Februari 2016, <<http://indonesianreview.com/gigin-pragianto/pangkalan-militer-paling-mematikan-di-asean>>, diakses pada 24 Desember 2015.

intrakawasan yang aman, sebagaimana dapat dilihat dalam tingkat ASEAN.

Tabel 3. Alutsista Asia Tenggara Maritim (dalam unit, 2014)<sup>147</sup>

No	Negara	Angkatan Darat	Angkatan Udara	Angkatan Laut
1	Indonesia	1760	405	171
2	Malaysia	1630	217	61
3	Singapura	2732	262	40
4	Brunei Darussalam	138	70	17
5	Filipina	1093	126	120

Diasumsikan bahwa tanpa ada kekuatan intrusif, postur kekuatan negara-negara Asia Tenggara Maritim akan mengakibatkan konflik yang berujung pada perang terbuka. Postur kekuatan yang saling mengimbangi karena dampak dari kekuatan intrusif akan berdampak positif pada kestabilan kawasan, ia tidak akan berdampak pada perang. Data pada tabel di atas, misalnya, menunjukkan bahwa kekuatan

---

<sup>147</sup> 'The SIPRI Military Expenditure Database,' *SIPRI* (daring) dan 'Comparisons of World Military Strengths,' *Global Fire Power* (daring).

alutsista angkatan darat Singapura sebanyak 2.732 unit adalah yang terbanyak bila dibandingkan negara-negara ATM lainnya. Alutsista dan anggaran modernisasi alat perang telah menjadi alat politik keamanan Singapura untuk menekan pihak lain. Hal tersebut dibuktikan dengan tekanan yang diberikan Singapura kepada Indonesia dalam kasus penamaan kapal perang Indonesia KRI Usman-Harun. Walaupun tekanan itu tidak memberikan hasil yang memuaskan untuk Singapura, namun kasus ini menunjukkan fakta sebuah negara kecil dapat menekan negara lain yang jauh begitu besar.

Selain itu, FPDA juga memberikan dampak bagi peningkatan alutsista Malaysia, sehingga ia memiliki kekuatan angkatan darat sebanyak 1.630 unit, hanya selisih tipis 130 unit dengan Indonesia. Sekalipun Indonesia memiliki lebih banyak alutsista dibandingkan Malaysia, namun Indonesia tidak memiliki pakta pertahanan seperti Malaysia. Pengaruh sistem intrusif pada keamanan Asia Tenggara Maritim begitu besar, sehingga setiap negara yang memiliki karakter militer yang ofensif tidak dapat berbuat “kasar” pada negara yang menjadi target intrusif. Hal serupa juga terjadi pada Filipina, di mana hubungan dengan Amerika Serikat memberikan level kekuatan militer yang dapat menjaga keamanannya.



Kekuatan intrusif Amerika Serikat, Cina, dan Australia juga telah memberikan dampak pada level kekuatan ekonomi, seperti terlihat peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) negara-negara Asia Tenggara Maritim (lihat Tabel 4 dan 5). Kekuatan intrusif yang signifikan dilakukan Amerika Serikat di Singapura dan Filipina dalam kerangka bilateral serta Cina di Indonesia telah berdampak pada level kekuatan ekonomi yang diukur dari pertumbuhan PDB pada harga pasar.<sup>148</sup> Cantori dan Spiegel mengatakan bahwa *“It is upon the pattern variable of level of power that external powers have perhaps their greatest affect. External power can promote the material power of members of subordinate system by providing economic aid.”*<sup>149</sup> Oleh karena itu, untuk mengetahui seberapa besar kompetisi negara-negara kawasan, khususnya dalam

---

<sup>148</sup> Produk Domestik Bruto adalah salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu negara dalam suatu periode tertentu. PDB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun, sedangkan PDB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar. PDB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi, sedang harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. Baca ‘Pengertian Pendapatan Nasional,’ *Badan Pusat Statistik* (daring), <<https://www.bps.go.id/Subjek/view/id/11>>, diakses pada 19 April 2016.

<sup>149</sup> Cantori & Spiegel, p. 31.

investasi dan perdagangan dengan negara-negara eksternal dalam kurung waktu tertentu, maka PDB digunakan untuk mengukur pergeseran dan pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. Investasi dan perdagangan dalam kerangka sistem intrusif telah menyumbang peningkatan PDB negara-negara ATM setiap tahun. Hal ini dapat dilihat, antara lain, dari keterlibatan Malaysia dan Singapura dalam skema TPP dan seluruh negara Asia Tenggara dalam kerangka *Trade and Investment Framework Arrangement between the United States of America and ASEAN*.<sup>150</sup>

Selain itu, Cina dan Australia juga memberikan dampak pada level ekonomi yang akan menyumbang PDB total setiap negara kawasan. Indikator perdagangan dan investasi

---

<sup>150</sup> Singapura dan Malaysia telah menjadi anggota TPP sejak tahun 2010. Pada tahun 2012, total perdagangan Amerika Serikat dengan negara-negara TPP mencapai lebih dari \$1,5 trilyun. Di tahun yang sama, total ekspor barang-barang dari Amerika Serikat ke negara-negara TPP mencapai \$689 milyar atau 45% dari total ekspor Amerika Serikat secara keseluruhan. Pada tahun sebelumnya, total perdagangan Amerika Serikat dengan mitra-mitra TPP mencapai lebih dari \$242 milyar. Baca 'Kemitraan Trans Pasifik (TPP): Membangun Ekonomi Amerika Serikat dan Kemitraan Strategis di Asia Pasifik,' *Embassy of the United States in Jakarta* (daring). Sementara itu, dalam kerangka *Trade and Investment Framework Arrangement between the United States of America and ASEAN*, tercatat total perdagangan antara Amerika Serikat dan ASEAN pada tahun 2004 sebesar \$135 milyar dan meningkat menjadi sebesar \$149 milyar pada tahun 2009. Investasi Amerika Serikat di negara-negara anggota ASEAN pada tahun 2009 sebesar \$3,3 milyar, atau 8,5 % dari total investasi ke kawasan Asia Tenggara. Total investasi Amerika Serikat ke ASEAN antara tahun 2007 sampai 2009 adalah \$16,5 milyar ('Amerika Serikat Perjanjian Perdagangan Bebas,' *EENI* (daring)).

ekonomi ini telah meningkatkan perdagangan setiap negara. Skema PDB adalah skema untuk melihat secara keseluruhan pendapatan negara, baik dari investasi ekonomi dan perdagangan maupun unit usaha lain. Hal tersebut digunakan untuk mengetahui keseimbangan ekonomi negara Asia Tenggara Maritim.

Tabel 4. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto ATM  
(2013)<sup>151</sup>

Negara	PDB (milyar \$)	PDB (%)	Inflasi (%)
Indonesia	910,4	5,6	4,7
Malaysia	323,3	4,7	0,2
Singapura	302,2	4,9	0,2
Filipina	271.9	7.1	2.3
Brunei Darussalam	16.110	-1.8	-3.2

---

<sup>151</sup> 'East Asia & Pacific (developing only),' *The World Bank* (daring), <<http://data.worldbank.org/region/EAP>>, diakses pada 4 April 2016.

Tabel 5. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto ATM  
(2014)<sup>152</sup>

Negara	Populasi (juta)	PDB (milyar \$)	PDB (%)	Inflasi (%)
Indonesia	254,5	888, 5	5,0	6,4
Malaysia	29,90	338,1	6,0	3,1
Singapura	5,470	307,9	2,9	-0,1
Filipina	99,14	284,8	6,1	3,2
Brunei Darussalam	0,415	17,108	-2,3	10,1

Level kekuatan ekonomi Asia Tenggara Maritim yang diukur dari PDB setiap negara masih dalam angka yang normal. Penurunan persentase PDB dan pertumbuhan PDB dibagi dengan jumlah populasi setiap negara memiliki angka kewajaran. Angka normal dan kewajaran dilihat dari angka-angka persaingan dalam pertumbuhan ekonomi yang saling mengimbangi. Dengan kata lain, angka PDB dalam kedua tabel di atas tidak memiliki jarak yang signifikan satu sama lain. Selain itu, dalam menjelaskan angka kewajaran, PDB naik atau turun dikarenakan indikator ekspor lebih tinggi dari impor atau sebaliknya.

---

<sup>152</sup> 'East Asia & Pacific (developing only),' *The World Bank* (daring).

Jika kita memperhatikan tabel PDB di atas, maka hampir setiap negara memiliki pertumbuhan PDB di atas 2%, kecuali Brunei Darussalam. Namun, jika dilihat dari populasi penduduk, Indonesia harus terus meningkatkan PDB agar dapat mengimbangi negara tetangganya. Singapura, yang memiliki pertumbuhan 2,9% dengan populasi hanya 5 juta penduduk, merupakan contoh yang baik. Bahkan tahun 2013, Singapura dapat mencapai pertumbuhan PDB lebih dari 4%. Singapura mengalami peningkatan angka nilai PDB pada tahun 2013 sebesar \$302,2 milyar dengan inflasi 0,2%, sedangkan pada tahun 2014 meningkat menjadi \$307,9 milyar dan inflasi -0,1%.

Semua pencapaian di atas tidak terlepas dari perdagangan internasional dan investasi ekonomi negara-negara intrusif. Pengaturan TPP yang digagas Amerika Serikat yang melibatkan Singapura dan Malaysia, investasi Cina di ASEAN dalam kerangka APT, serta hubungan perdagangan bebas Australia-ASEAN memberikan kontribusi besar bagi negara-negara anggota ASEAN. Pertumbuhan PDB negara-negara ATM tidak terlepas dari perdagangan dan investasi ekonomi negara-negara eksternal tersebut. Posisi negara eksternal dalam setiap pengaturan investasi ekonomi di kawasan berdampak pada pertumbuhan PDB. Pertumbuhan yang dianggap normal berdasarkan populasi setiap negara

memberikan keseimbangan kekuatan ekonomi antarnegara, yang kelak memengaruhi kebijakan luar negeri negara-negara ATM.

Selain itu, terdapat dampak lain dari sistem intrusif terhadap Asia Tenggara Maritim, yakni kohesi ekonomi (keuntungan material), kohesi politik (teritorial), dan kohesi organisasi (hubungan teknis). Dampak ini terlihat pada pengaturan multilateral di Selat Malaka (MSSI). Kekuatan instrusif dalam kerangka MSSI telah memberikan implikasi yang signifikan bagi keamanan jalur Selat Malaka. Persoalan di Selat Malaka bukan saja merupakan isu keamanan non-tradisional, namun juga mengenai masalah batas wilayah. Dewasa ini, konflik yang timbul di Selat Malaka mengenai pencurian ikan di wilayah Indonesia, misalnya, terus terjadi. Beberapa kasus menunjukkan bahwa insiden pencurian ikan dimungkinkan karena batas wilayah yang belum jelas antara Indonesia dan Malaysia. Selain itu, nilai strategis Selat Malaka yang merupakan jalur internasional menjadi persoalan dalam pembagian keuntungan antara Indonesia, Malaysia dan Singapura. Yang dimaksud di sini bukanlah pembagian profit secara legal, namun lebih ditekankan pada tidak adanya pengaturan mengenai persinggahan kapal-kapal di pelabuhan. Dalam hal ini, Singapura dan Malaysia lebih diuntungkan

karena kapal-kapal yang melewati Selat Malaka lebih banyak singgah di pelabuhan mereka.<sup>153</sup>

MSSI yang melibatkan negara-negara pantai (Indonesia, Malaysia dan Singapura) dan negara-negara pengguna (Amerika Serikat, Cina, Australia, dan lain-lain) menjadi solusi terbaik dalam mengatasi persoalan perompak dan berdampak pada kohesivitas semua pihak yang terlibat. Keterlibatan politik kekuatan eksternal yang berdampak pada faktor kohesi merupakan sesuatu yang signifikan dalam menjaga keamanan di Selat Malaka. Berdasarkan prinsip-prinsip MSSI yang sudah disepakati pada 2006, maka negara-negara pengguna dapat memberikan kontribusi keamanan secara teknis di Selat Malaka. Unsur kohesi ekonomi yang merupakan implikasi kekuatan intrusif telah mempererat hubungan ketiga negara pantai yang sering berkonflik mengenai perbatasan di Selat Malaka. Selain itu, dampak pengaturan MSSI telah memberikan keuntungan ekonomi yang besar bagi ketiga negara dalam menjaga keamanan teritorial.

Bagi Indonesia, implikasi pengaturan MSSI ini memberikan keuntungan material maupun keamanan teritorial. Berdasarkan Deklarasi Djuanda pada tanggal 13

---

<sup>153</sup> T. Lee & K. McGahan, 'Norm subsidiarity and institutional cooperation: explaining the straits of Malacca anti-piracy regime,' *The Pacific Review*, vol. 28, no. 4, 2015, p. 534.

Desember 1957 yang diresmikan menjadi UU No.4/PRP/1960 tentang Negara Kepulauan (*Archipelagic State*) Indonesia, aturan UNCLOS 1982 yang diratifikasi melalui UU Nomor 17 Tahun 1985, dan UU No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, Indonesia menetapkan diri sebagai negara yang menganut prinsip-prinsip perairan negara kepulauan (*archipelagic sea*).<sup>154</sup> Dalam prinsip ini, negara kepulauan Indonesia terdiri dari tiga zona wilayah laut, yaitu (1) wilayah perairan teritorial sejauh 12 mil yang diukur dari *main baseline* pangkal pantai daratan Indonesia, (2) Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sejauh 200 mil yang diukur dari garis dasar pangkal pantai daratan Indonesia, dan (3) zona landas kontinen sampai batas 350 mil yang diukur dari landas kontinental titik terluar wilayah teritorial Indonesia.<sup>155</sup> Dalam konteks ini, Selat Malaka merupakan wilayah perairan yang ditetapkan masuk dalam zona maritim Indonesia. Penetapan ini telah dilakukan sejak tahun 1957, baik melalui penetapan batas ukuran wilayah laut secara individual maupun dengan perundingan-perundingan bersama negara tetangga sejak

---

<sup>154</sup> Sekretariat Dewan Kelautan Indonesia, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Kelautan*, Dewan Kelautan Indonesia, Jakarta, 2009, p. 37.

<sup>155</sup> Sekretariat Dewan Kelautan Indonesia, p. 144.



tahun 1969 yang menghasilkan tiga zona maritim.<sup>156</sup> Dalam perkembangannya masih terdapat sejumlah permasalahan pada wilayah perairan Indonesia di Selat Malaka yang masih belum tuntas. Di antara persoalan tersebut adalah belum adanya kejelasan titik-titik kordinat yang disepakati berkaitan dengan wilayah teritorial Indonesia di selatan Selat Malaka yang merupakan perbatasan laut langsung dengan Malaysia dan Singapura, serta penetapan ZEE oleh Indonesia seluas 350

---

<sup>156</sup> Departemen Luar Negeri, *Penetapan Batas Maritim Dengan Malaysia Sudah dilakukan Sejak Tahun 1969*, Direktorat Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri RI & Pilar Indo Meditama, Jakarta, 2010, p. 6. Ketiga zona tersebut adalah:

1. Zona laut teritorial yang ditetapkan secara individual dan hasil perundingan bersama Malaysia dan Singapura, membentang mulai dari utara Selat Malaka atau wilayah perairan Provinsi Aceh sampai delapan titik kordinat mulai dari titik *one fathom bank* hingga perairan provinsi kepulauan Riau. Zona wilayah laut teritorial ini merupakan wilayah laut yang tunduk dalam kedaulatan Indonesia sepenuhnya.
2. Wilayah perairan ZEE dari penetapan atau klaim individual Indonesia mulai dari titik *one fathom bank* hingga utara wilayah perairan Selat Malaka dengan total luas sekitar 350 mil. ZEE ini merupakan wilayah perairan di mana Indonesia memiliki hak-hak (sebatas) berdaulat untuk eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan atas kekayaan alam di dalamnya, serta menerapkan kebijakan-kebijakan hukumnya, termasuk pada yuridiksi pengawasan, pencegahan, dan penindakan kemungkinan datangnya ancaman maupun pelanggaran-pelanggaran hukum terhadap Indonesia.
3. Zona landas kontinen yang ditetapkan bersama Malaysia pada tanggal 27 Oktober 1969 dan 21 Desember 1971, yang meliputi 10 titik batas dasar perairan Selat Malaka mulai dari segmen utara Selat Malaka sampai selatan sepanjang 400,8 mil. Ini merupakan dasar laut Selat Malaka sebagai wilayah Indonesia untuk (sebatas) hak yurisdiksi eksklusif dalam melakukan eksplorasi dan eksploitasi hingga pemasangan kabel dan atau pipa saluran.

mil yang masih tumpang tindih dengan penetapan ZEE Malaysia.<sup>157</sup>

Selat Malaka merupakan perairan yang sangat bernilai penting bagi Indonesia. Selat Malaka dipandang Indonesia sebagai suatu “lem” perekat dalam konsepsi Wawasan Nusantara dari seluruh wilayah perairan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).<sup>158</sup> Kemudian, sesuai dengan Undang-Undang RI. No. 34 Tahun 2004 mengenai Sistem Pertahanan Semesta, Selat Malaka juga dipandang Indonesia sebagai kawasan strategis pagar geostrategi pertahanan dan keamanan untuk mencegah dan menahan segala kemungkinan ancaman yang datang dari luar.<sup>159</sup> Selain bernilai penting secara politik dan keamanan, Selat Malaka juga berada dalam artikulasi kepentingan ekonomi Indonesia yang sangat kompleks.

Secara ekonomi, nilai penting Selat Malaka bagi Indonesia terbagi menjadi dua sudut pandang prioritas.

---

<sup>157</sup> Departemen Luar Negeri, p. 6.

<sup>158</sup> ‘Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2011-2025,’ *Badan Nasional Pengelola Perbatasan RI* (daring), 2011, <[http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/134109-%5B\\_Konten\\_%5D-Konten%20C9494.pdf](http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/134109-%5B_Konten_%5D-Konten%20C9494.pdf)>, diakses pada 5 April 2016.

<sup>159</sup> ‘Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia,’ *Elsam* (daring), <<http://referensi.elsam.or.id/2014/10/uu-nomor-34-tahun-2004-tentang-tentara-nasional-indonesia/#sthash.SS4EV2fQ.dpuf>>, diakses pada 5 April 2016.

Prioritas pertama berkaitan dengan eksploitasi sumber daya alam, terutama perikanan yang telah menjadi salah satu andalan bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Prioritas kedua terletak pada pengembangan sektor industri-industri maritim pelabuhan Indonesia. Sektor transportasi dan komunikasi Indonesia, di mana sub-sektornya termasuk sektor pelabuhan dan angkutan laut, telah menyumbang pada PDB negara yang didasarkan menurut lapangan usaha sekitar lebih dari Rp29,473 milyar pada tahun 2014 dan Rp30,173 milyar pada tahun 2015.<sup>160</sup> Selat Malaka sebagai salah satu jalur pelayaran turut menyumbang pada PDB mengingat ia sangat ramai akan kapal-kapal komersial dan sangat penting bagi pengembangan sektor industri pelabuhan-pelabuhan Indonesia, seperti pelabuhan Belawan, pelabuhan Dumai, pelabuhan Batam, pelabuhan Tanjung Balai, pelabuhan Bengkalis, pelabuhan Karimun, dan pelabuhan Tanjung Pinang. Beberapa dari pelabuhan ini bahkan merupakan pelabuhan internasional dengan kapasitas besar, misalnya

---

<sup>160</sup> 'PDB Triwulanan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha,' *Badan Pusat Statistik* (daring), <<http://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/827>>, diakses pada 5 April 2016.

pelabuhan Belawan, dengan laba pendapatan terhitung lebih dari Rp28,3 milyar per tahunnya.<sup>161</sup>

Pada prinsipnya, pengaturan multilateral MSSSI telah memberikan keuntungan untuk mencapai kepentingan Indonesia. Pertama, untuk menjaga kepentingan keamanan Indonesia, baik dari segi politik, hukum, maupun ekonomi yang terganggu akibat aksi perompakan kapal di Selat Malaka. Kedua, dalam rangka menjaga citra Indonesia sebagai negara pantai yang dipercayai oleh komunitas internasional sebagai penjaga keamanan Selat Malaka. Ketiga, sebagai upaya pencegahan dari kemungkinan munculnya intervensi negara asing atau negara luar kawasan dalam pengamanan Selat Malaka yang kepentingannya terganggu akibat isu non-tradisional. Selain itu, hal terpenting dari implikasi pengaturan MSSSI adalah masalah teritorial Indonesia, Malaysia dan Singapura dapat diselesaikan agar tidak menimbulkan konflik yang lebih besar.

Pengaturan MSSSI sebagai upaya keamanan berimplikasi pada kohesi ekonomi dan politik seperti ditunjukkan dalam kasus Indonesia. Amerika Serikat, Cina, dan Australia yang

---

<sup>161</sup> 'Terkait Dampak Krisis Ekonomi Global, PT Pelabuhan I Cab. Belawan akan Naikkan Jasa Kepelabuhan,' *BUMN* (daring), 2008, <<http://www.bumn.go.id/pelindo1/en/berita/498/terkait.dampak.krisis.ekonomi.global.pt.pelabuhan.i.cab...belawan.akan.naikkan.jasa.kepelabuhan>>, diakses pada 4 April 2016.

merupakan pengguna jalur Selat Malaka mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pelatihan militer, transfer teknologi, dan bantuan-bantuan teknis lainnya, agar dapat digunakan negara pantai untuk menjaga keamanan Selat Malaka. Selain itu, terdapat pula kompromi keamanan antara Indonesia, Malaysia, dan Singapura mengenai penetapan ZEE yang belum jelas. Kepentingan negara secara individual di Selat Malaka dapat dibendung dengan perjanjian MSSI. Terjalinnnya struktur hubungan teknis antara negara pantai dan pengguna menguntungkan ketiga negara Asia Tenggara Maritim dalam bidang keamanan non-tradisional maupun tradisional. Kekuatan intrusif dalam pengaturan MSSI juga memberikan kontribusi pada kohesi organisasi. MSSI merupakan ikatan kerja sama negara pengguna dengan negara-negara pantai tanpa intervensi militer dari kekuatan intrusif, sehingga penjaga keamanan di Selat Malaka seluruhnya adalah ketiga negara pantai.

Sistem intrusif di Asia Tenggara Maritim berimplikasi pada keamanan di wilayah tersebut. Hal ini dapat dilihat dari hubungan bilateral maupun multilateral (ASEAN) di kawasan, MSSI sebagai perjanjian yang memberikan kontribusi positif, khususnya dalam meningkatkan perjanjian-perjanjian sebelumnya, seperti mengenai landas kontinental di Selat Malaka antara Indonesia dan Malaysia. Perjanjian Batas

Landas Kontinen yang pertama diadakan dengan Malaysia pada 27 Oktober 1969, yang menentukan batas landas kontinen berdasarkan garis lurus yang ditarik dari titik bersama ke titik koordinat yang disepakati bersama.<sup>162</sup> Selain itu, peningkatan hubungan keamanan bersama di Selat Malaka dilakukan oleh Indonesia, Singapura, dan Malaysia melalui pertemuan tripartit untuk membahas tentang keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan maritim di Selat Malaka dan Selat Singapura di Langkawi, Malaysia, pada tanggal 22 hingga 26 September 2014.<sup>163</sup> Dapat diargumentasikan bahwa jika eksistensi kekuatan intrusif dalam kerangka MSSSI terus dijalankan di Asia Tenggara Maritim, perang terbuka tidak akan terjadi, sekalipun negara-negara Asia Tenggara Maritim berada dalam situasi konflik.

### **C. Anomali di Asia Tenggara Daratan**

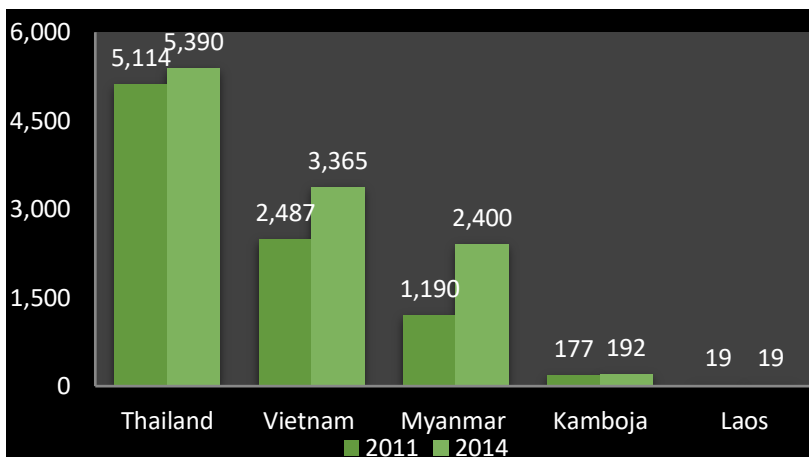
Keamanan Asia Tenggara Daratan (ATD) tidak terlepas dengan keamanan di Laut Cina Selatan dan Asia Tenggara Maritim. Kekuatan intrusif Amerika Serikat dan Australia di Laut Cina Selatan dan Asia Tenggara Maritim berpengaruh

---

<sup>162</sup> M. Kusumaatmadja, *Hukum Laut Internasional*, Trimitra Mandiri, Jakarta, 1999, pp. 200-201.

<sup>163</sup> 'Indonesia, Singapura, dan Malaysia Bahas Kerja Sama Keamanan Laut,' *Aksara Pura* (daring), 26 September 2014, <<http://beritatrans.com/2014/09/26/indonesia-singapura-dan-malaysia-bahas-kerjasama-keamanan-laut/>>, diakses pada 6 April 2016.

bagi negara Asia Tenggara Daratan, seperti Vietnam dan Thailand. Tipe bantuan militer dan keterlibatan kekuatan intrusif telah mempengaruhi struktur hubungan di Asia Tenggara Daratan. Jika diperhatikan, keamanan yang diakibatkan kekuatan intrusif di Asia Tenggara Daratan berimplikasi pada level kekuatan militer Thailand, Vietnam dan Myanmar. Kamboja hanya mengalami peningkatan anggaran sedikit saja pada tahun 2014, sedangkan Laos tidak meningkatkan anggaran pertahanannya (lihat Grafik 3).



Grafik 3. Anggaran pertahanan ATD (dalam milyar dolar)<sup>164</sup>

Grafik atas menunjukkan bahwa persaingan kekuatan hanya terjadi pada tiga negara Asia Tenggara Daratan, yakni Thailand, Vietnam dan Myanmar. Sedangkan Kamboja dan

<sup>164</sup> 'The SIPRI Military Expenditure Database,' *SIPRI* (daring) dan 'Comparisons of World Military Strengths,' *Global Fire Power* (daring).

Laos dapat dikatakan sebagai negara-negara yang “terancam kedaulatannya.” Anggaran pertahanan Thailand yang tinggi dan hubungannya yang harmonis dengan Amerika Serikat dan Australia tidak dapat diimbangi oleh Myanmar, Kamboja, dan Laos. Dalam hal ini, diperlukan struktur hubungan kekuatan intrusif yang lain untuk mengimbangi level kekuatan militer Thailand. Hadirnya Cina sebagai kekuatan intrusif akan mengimbangi kekuatan intrusif yang lain, sebagaimana ditunjukkan oleh pengaruh Cina yang semakin kuat terhadap Kamboja, Laos, dan Myanmar.

Sejarah mencatat kedekatan hubungan Cina dengan Kamboja, Laos, dan Myanmar pada masa lalu.<sup>165</sup> Kedekatan itu juga yang terus dipertahankan Cina dengan banyak menawarkan kerja sama di bidang ekonomi kepada ketiga negara tersebut. Pendekatan dilakukan Cina dengan cara bilateral maupun multilateral, antara lain forum negara-negara di sekitar Sungai Mekong. Selain dengan ketiga negara itu, Cina pun cukup aktif memperkuat hubungan bilateral dengan Thailand dan Vietnam. Bagi negara-negara mitra ASEAN, khususnya negara-negara Barat, terjalinnya hubungan negara-negara Asia Tenggara Daratan dengan Cina tentu mengkhawatirkan karena dapat menurunkan ‘pamor’ Amerika

---

<sup>165</sup> D.G.E. Hall, *Sejarah Asia Tenggara*, Usaha Nasional, Surabaya, 1988, pp. 417, 791-794.



Serikat di kawasan ini. Di forum negara-negara sepanjang Sungai Mekong, Cina dengan kekuatan ekonominya bisa membangun sejumlah bendungan untuk pembangkit tenaga listrik, yang kelak dapat berdampak positif pada ekonomi Thailand, Laos, Kamboja, dan Vietnam.

Dalam Forum Kerja Sama Moneter Sub-kawasan Sungai Mekong Raya, perwakilan Cina, Thailand, Laos dan Myanmar secara rutin mengadakan diskusi mengenai kerja sama moneter. Forum ini akan digelar setiap tahun terkait dengan tujuan untuk menyediakan *platform* bagi kerja sama moneter.<sup>166</sup> Negara-negara yang dialiri Sungai Mekong meyakini bahwa mekanisme tersebut akan membawa manfaat nyata bagi rakyat mereka, selain berimplikasi pada kerja sama antara Cina dan ASEAN.<sup>167</sup> Hubungan kerja sama ini akan menciptakan ikatan negara-negara yang terlibat dengan Cina dan keseimbangan kekuatan dengan pihak lain, sehingga menimbulkan keamanan kawasan Asia Tenggara Daratan.

---

<sup>166</sup> 'Forum Kerja Sama Moneter Kawasan Sub-Regional Sungai Mekong Digelar Setiap Tahun,' *Elshinta.com* (daring), 14 Juni 2015, <<http://elshinta.com/news/15298/2015/06/14/forum-kerja-sama-moneter-kawasan-sub-regional-sungai-mekong-digelar-setiap-tahun>>, diakses pada 6 April 2016.

<sup>167</sup> 'Kerja Sama Sungai Lancang-Mekong Bawa Manfaat Bagi Berbagai Negara,' *Elshinta.com* (daring), 23 Maret 2016, <<http://elshinta.com/news/53699/2016/03/23/kerja-sama-sungai-lancang-mekong-bawa-manfaat-bagi-berbagai-negara>>, diakses pada 6 April 2016.

Hal lain yang juga menarik tentang kekuatan intrusif Cina di Asia Tenggara Daratan adalah kerja sama Cina dengan Myanmar. Sekalipun Myanmar memiliki konflik internal, namun kerja sama kedua negara tidak terganggu. Pertemuan kepentingan kedua negara tampak dalam bidang ekonomi, termasuk pembangunan pipa minyak dari Myanmar ke Cina. Myanmar memiliki nilai geopolitik strategis yang menguntungkan Cina agar pengiriman minyak dari Timur Tengah melewati jalur laut yang lebih cepat. Myanmar bernilai strategis bagi Cina karena dapat memberikan rute transportasi energi yang lebih singkat melalui perjalanan darat, di samping melalui jalur konvensional pelayaran dunia. Myanmar akan menjadi jalur penghubung yang sangat penting antara Cina dan negara-negara yang kaya energi. Implikasi yang ditimbulkan dari kekuatan intrusif ini adalah peningkatan kekuatan ekonomi Myanmar, yang memiliki pertumbuhan Produk Domestik Bruto yang tinggi hingga 8,5%. Perdagangan kedua negara meningkat sebesar 52,3% menjadi \$4,4 milyar pada tahun 2010, sedangkan impornya sebesar 49%. Pada tahun 2011 nilai perdagangan kedua negara meningkat sebesar 75%.<sup>168</sup> Level kekuatan ekonomi ini menjadikan Cina sebagai teman bisnis dalam politik luar negeri Myanmar. Cantori dan Spiegel meyakini bahwa

---

<sup>168</sup> Djelantik, p. 262.

kekuatan intrusif ini dapat berdampak positif guna menciptakan keseimbangan kekuatan ekonomi.

Implikasi kekuatan intrusif pada level kekuatan ekonomi juga mewarnai Asia Tenggara Daratan (lihat Tabel 6 dan 7). Hal ini didasarkan pada kerja sama dengan negara-negara eksternal yang memiliki pertumbuhan ekonomi tinggi seperti Cina dan AS dalam kerangka investasi ekonomi dan perdagangan. Implikasi kekuatan intrusif ini dapat menyumbang pertumbuhan ekonomi negara kawasan. Kembali menurut Cantori dan Spiegel, salah satu faktor yang merupakan dampak sistem intrusif yang signifikan adalah level material (ekonomi).<sup>169</sup> Jika dihubungkan dengan tujuan sistem intrusif dalam kerangka investasi ekonomi ACFTA, APT, dan TPP, juga pada investasi dan perdagangan Cina-Myanmar seperti telah diuraikan sebelumnya, maka dapat diargumenkan bahwa salah satu penyumbang peningkatan kekuatan ekonomi ADD adalah sistem intrusif. Perdagangan dan investasi ekonomi negara-negara eksternal di ADD, khususnya dengan Cina, telah menyumbang bagi pertumbuhan ekonomi ADD.

---

<sup>169</sup> Cantori & Spiegel, p. 31

Tabel 6. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto ATD  
(2013)<sup>170</sup>

Negara	Populasi	PDB (milyar \$)	PDB (%)	Inflasi (%)
Thailand	67.451.422	420,1	2,8	1,6
Vietnam	89.708.900	171,2	5,4	4,8
Myanmar	52.983.829	58,6	8,2	5,7
Kamboja	15.078.564	15,4	7,5	2,2
Laos	6.579.985	11,1	8,2	8,5

Tabel 7. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto ATD  
(2014)<sup>171</sup>

Negara	Populasi	PDB (milyar \$)	PDB (%)	Inflasi (%)
Thailand	67.725.979	404,8	0,9	1,0
Vietnam	90.730.000	186,2	6,0	3,7
Myanmar	53.437.159	64,3	8,5	6,6
Kamboja	15.328.136	16,7	7,1	1,7
Laos	6.689.300	11,9	7,5	-0,3

<sup>170</sup> 'East Asia & Pacific (developing only),' *The World Bank* (daring).

<sup>171</sup> 'East Asia & Pacific (developing only),' *The World Bank* (daring).

Kekuatan intrusif Cina dalam kerangka multilateral APT dan ACFTA telah memberikan implikasi bagi negara-negara Asia Tenggara Daratan, khususnya Myanmar, Kamboja dan Laos. Sekalipun level kekuatan militer negara-negara ini di bawah negara-negara lain, namun pertumbuhan PDB mereka melampaui negara-negara tetangganya. Secara keseluruhan negara-negara Asia Tenggara Daratan mengalami peningkatan PDB dalam kurun waktu 2013-2014. Ini menunjukkan bahwa, tanpa mengabaikan faktor lain, kekuatan intrusif Cina dapat mengimbangi kekuatan-kekuatan intrusif Amerika Serikat dan Australia di Asia Tenggara. Pertumbuhan tingkat PDB ADD dipengaruhi oleh kekuatan intrusif Cina dalam pengaturan ACFTA, yang antara lain bertujuan memfasilitasi integrasi ekonomi yang lebih efektif dari anggota-anggota terbaru ASEAN – Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam – dan menjembatani kesenjangan pembangunan ekonomi di antara negara-negara anggota.<sup>172</sup> Tujuan tersebut memastikan bahwa salah satu orientasi perdagangan dan investasi ekonomi Cina dalam kerangka ACFTA difokuskan pada ADD.

Perubahan struktur hubungan di Asia Tenggara Daratan nampak dengan kehadiran Cina di kawasan. Negara-negara

---

<sup>172</sup> 'ASEAN- China Free Trade Area,' *Kementerian Perdagangan Republik Indonesia* (daring).

Asia Tenggara Daratan sebagian besar telah membuka diri bagi Cina, sehingga struktur hubungan yang awalnya hanya dipengaruhi oleh Amerika Serikat dan sekutunya menjadi lebih berwarna dengan kehadiran Cina. Cantori dan Spiegel mengatakan bahwa *“as this analysis of the risks attendant upon the involvement of intrusive power suggest, external power affect and indeed, at times determine, the structure of relations within a subordinate system.”*<sup>173</sup> Cina telah memberikan kontribusi terhadap gejolak konflik di Asia Tenggara melalui bantuan konseptual dan praktis dalam kerja sama ekonomi dengan ASEAN. Pengaruh besar dari kekuatan intrusif pada struktur hubungan di Asia Tenggara ini juga ditunjukkan dengan keterlibatan Amerika Serikat, Cina, dan Australia dalam berbagai perundingan yang diadakan guna menyelesaikan konflik-konflik regional.

Anomali keamanan di kawasan Asia Tenggara – banyak konflik, tetapi tidak terjadi perang – muncul karena keterlibatan kekuatan intrusif Amerika Serikat, Cina dan Australia dalam kasus konflik di Laut Cina Selatan, serta pengaturan politik, ekonomi, dan pertahanan Asia Tenggara Maritim dan Asia Tenggara Daratan. Sistem intrusif ini telah berimplikasi pada level kekuatan, kohesi, serta struktur hubungan di kawasan, yang dapat dilihat dari peningkatan

---

<sup>173</sup> Cantori & Spiegel, p. 32.

anggaran, pertunjukan kekuatan, peningkatan alutsista, dan pertumbuhan ekonomi setiap negara di kawasan. Semua implikasi tersebut telah menimbulkan *deterrence* dan keseimbangan kekuatan (*balance of power*) di kawasan Asia Tenggara. Keseimbangan kekuatan ini pada gilirannya akan menciptakan keamanan di Asia Tenggara, yakni situasi tanpa perang antarnegara. Dengan kata lain, sistem intrusif di Asia Tenggara berdampak positif berupa stabilitas kawasan. Selain alasan-alasan yang lahir dari pendekatan sistem intrusif, diskursus dan representasi kedaulatan menjadi akar konflik antarnegara. Pada bab selanjutnya akan dibahas diskursus kedaulatan.

**[Halaman Ini Sengaja Dikosongkan]**



## **BAB V**

### **KEKUASAAN KEDAULATAN**

#### **A. Rezim Kebenaran**

Bagian ini bertujuan membongkar misteri roh kedaulatan bertubuh negara sebagai teks dominan yang menggerakkan perilaku negara untuk berkonflik di LCS. Hal ini bertujuan mengungkap sisi lain kedaulatan yang memiliki kuasa memerintah untuk berkonflik. Genealogi Foucault mengungkap asal-usul kedaulatan sebagai proses reproduksi kekuasaan dan pengetahuan. Genealogi akan mengungkap relasi kuasa kedaulatan dan pengetahuan yang mampu bertahan sepanjang sejarah, sehingga disebut sebagai rezim kebenaran negara modern. Menurut Foucault, tidak adanya sejarah besar tunggal, melainkan banyak jalinan sejarah yang bervariasi dalam relasi kekuasaan dan pengetahuan. Genealogi menunjukkan variasi alur sejarah yang masih bertahan dan telah ditutup dalam mempengaruhi perilaku subjek, objek, tindakan, dan ranah pengetahuan.<sup>174</sup>

Genealogi merupakan pendekatan anti-esensialis, ia menekankan bahwa sebuah pengetahuan terjadi pada tempat dan waktu tertentu serta didominasi oleh sebuah perspektif.

---

<sup>174</sup> M. Foucault, *Power/Knowledge*, edisi Bahasa Indonesia *Wacana Kuasa/Pengetahuan*, diterjemahkan oleh Yudi Santoso, narasi/pustaka promethean, Yogyakarta, 2017, pp.146-147.

Ilmu pengetahuan selalu memiliki syarat sebagai konsekuensi mempertahankan eksistensinya dalam ranah pertarungan, sehingga tidak ada satu “kebenaran tunggal,” yang ada hanyalah perspektif dan “rezim kebenaran” yang saling bersaing. Rezim kebenaran menunjukkan ketika pengetahuan dan kekuasaan sama-sama bertahan. Istilah tersebut merujuk pada diskursus yang diyakini sebagai kebenaran, sesuai dengan aturan dan kriteria yang menentukan proposisi yang benar dari yang salah, sehingga mempengaruhi pembentukan praktik.<sup>175</sup>

Rezim kebenaran tidak mencari kebenaran tersebut, namun menunjukkan pertarungan kebenaran dalam sebuah ranah, dan menaklukkan kebenaran lain. Diskursus yang menang akan mempengaruhi praktik aktor dalam bertindak. Terdapat pertempuran antara dan di dalam rezim kebenaran, di mana ada bangunan hierarki sehingga kekuasaan mempengaruhi klaim pengetahuan.<sup>176</sup> Mekanisme kekuasaan dan pengetahuan kedaulatan akan disebut rezim kebenaran jika sepanjang sejarah peradaban kekuasaan dan pengetahuan saling menjaga agar tidak mengalami keretakan sejarah yang berimplikasi pada rezim pengetahuan baru. Kekuasaan

---

<sup>175</sup> M. Foucault, *The Archeology of Knowledge*, edisi Bahasa Indonesia *Arkeologi Pengetahuan*, diterjemahkan oleh Inyik Ridwan Muzir, IRCiSoD, Yogyakarta, 2012, pp.66-67.

<sup>176</sup> Foucault, p.69.

kedaulatan menjadi syarat penting bagi berdirinya suatu negara, di mana negara membutuhkan kekuasaan tersebut untuk membangun nasionalisme bangsanya, sehingga berdampak pada *statolatry*.

## **B. Negara Idola**

Sebelum kita lanjutkan paradoks teks agung kedaulatan, pertama, kita akan membongkar sebuah teks penuh misteri yang terkandung dalam pemaknaan negara sentrisme. Teks ini tidak terlepas dengan makna kesatuan yang membentuk cinta negara yang berlebihan dari masyarakatnya. Logika kesatuan sebagai pemaknaan berlebihan membangun perilaku beridentitas nasional atau *we and the other*. Frasa “kita” membentuk mikrofasis masyarakat negara bangsa untuk memusuhi “mereka” (negara lain). Melalui fragmentasi kebangsaan inilah terjalin hubungan yang intim antara negara dan rakyatnya. Mungkin seperti itu gambaran bernegara.

Gramsci menyebutnya sebagai “*statolatry*.” Secara etimologi, *statolatri* adalah gabungan dari dua konsep yaitu “*state*” dan “*idolatry*,” negara dan pemujaan.<sup>177</sup> Menyimak secara historis, kata ini pertama kali dikenalkan oleh Gentile dalam *doctrine of fascism* pada 1931. Ia menggambarkan

---

<sup>177</sup> A. Gramsci (eds), *Selection From The Prison Notebooks*, International Publishers, New York, 1971, p.268.

karakteristik fasisme di Italia. Namun dalam pengertian lebih dalam lagi, Gramsci menyebutnya sebagai efek kekuasaan yang hegemonik. Hegemoni adalah perluasan jangkauan kekuasaan negara pada sektor-sektor yang belum dijangkaunya. Berdasarkan logika negara, jangkauan negara secara konvensional adalah doktrin kesatuan sebagai instrumen kepatuhan warganya terhadap negara. Jika demikian maka hegemoni memperluas jangkauannya kepada hal-hal yang non-konvensional, yaitu budaya. Target hegemoni bukanlah represif melalui instrumen kekuatan senjata dan aparaturnya militer, melainkan pada pengendalian kultural, intelektual, dan moral.<sup>178</sup>

Melalui hegemoni budaya, negara mendapatkan persetujuan spontan dari rakyat mengenai eksistensinya. Dalam bahasa Gramsci "*able to present itself as an integral 'state, 'possessing all the intellectual and moral forces it needed to organize a complete and perfect society.*"<sup>179</sup> Hal ini menjelaskan negara pada upaya perluasan jangkauan mengenai "perbudakan halus" pada rakyatnya. Namun demikian, rakyat menerima begitu saja, seakan-akan negara adalah sesuatu yang esensial. Hegemoni inilah yang membuat hubungan yang intim antara negara dan rakyat.

---

<sup>178</sup> Polimpung, pp.84-85.

<sup>179</sup> Gramsci, p.271

Negara menjadi idola rakyat, sekalipun negara melakukan kekerasan atau ketidakadilan, ia tetap menjadi “tuhan” bagi rakyatnya. Penyakit rasa nyaman yang diderita oleh warga negara merupakan implementasi hegemoni kultural, intelektual, bahkan moral. Persetujuan secara sukarela inilah yang kemudian menjadi basis legitimasi kultural dan moral, dalam keadaan tidak sadar diberikan oleh rakyatnya.

Dalam statolatri, negara menjadi sesuatu yang normal, sehingga sangat mustahil hidup di luar negara. Hal ini menegaskan bahwa tidak ada kehidupan yang normal di luar dari pada negara. Masyarakat sipil akan merasa nyaman hidup bernegara tanpa mencari tahu sisi lain bernegara. Akhirnya perhambaan sukarela ini menjadikan negara sebagai sesuatu yang ahistoris, artinya sesuatu yang alamiah atau terberi. Berbagai macam wajah digunakan negara untuk mewujudkan statolatri, misalnya nasionalisme dan kewarganegaraan. Melalui nasionalisme, negara membangun pengetahuan kepada bangsanya agar mencintai negaranya dan menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi ataupun golongan. Selain itu, kewarganegaraan mengidentifikasi rakyatnya agar terlibat dalam urusan-urusan politik.<sup>180</sup>

---

<sup>180</sup> Polimpung, p.723.

Secara historis negara adalah representasi raja, sedangkan raja adalah representasi tuhan. Meminjam Carl Schmitt, *all significant concept of the modern theory of the state are secularized theological concepts*. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh konsep atau teori negara modern berasal dari teologi. Namun, konsep teologia tersebut dimanifestasikan atau disekularkan pada pemerintahan monarki absolut. Misalnya sebutan *mortal god* oleh Thomas Hobbes sebagai Leviathan. Begitu juga nabi filsafat modern Rene Descartes menyebutkan tuhan yang menciptakan hukum-hukum di alam, sebagaimana raja menciptakannya di kerajaan.<sup>181</sup>

Pandangan di atas dapat dikonfirmasi kembali pada pemikiran Nicollo Machiavelli tentang ide cemerlang *fortuna* dan *legibus solutus* dari Jean Bodin. Melalui para pemikir di atas maka Schmitt memiliki argumentasi kuat untuk membuktikan bahwa konsep negara memiliki akar konsep teologi yang disekulerisasi. Dengan demikian bernegara dengan berbagai rupa teologi; *mortal god*, *fortuna*, dan *solutus* merupakan sebuah imajinasi historis yang diperhambakan pada masyarakat sipil seolah-olah ahistoris.<sup>182</sup> Berbagai

---

<sup>181</sup> T. Hobbes, *Leviathan or the Matter, Forme, & Power of a Common wealth Ecclesiastical and Civil*, Thomas Hobbes, Malbesbury, 1651, p.106

<sup>182</sup> Polimpung, p.90

kerangka pemikiran tersebut menghidupkan diskusi mengenai nasionalisme dan kewarganegaraan sebagai instrument untuk mencapai imajinasi statolatri.

Benedict Anderson menyebut nasionalisme sebagai sebuah imajinasi komunitas yang terbatas oleh konsep kedaulatan negara, sehingga selalu fleksibel atas realitas. Paper ini sejalan dengan pemikiran Schmith dan Polimpung dalam psikogenealogi yaitu mengungkap paradoks kedaulatan dalam tubuh negara sehingga mempengaruhi negara-negara berperilaku konflik di LCS. *Fortuna* seperti apa yang hidup di dalam negara sehingga menjadi rezim kebenaran. Imanensi antara kuasa negara dan pengetahuan *mortal god* menjadi fokus pengungkapan misteri terselubung dalam tubuh negara. Ini sejalan dengan cerita klasik tentang “buah pohon pengetahuan baik dan jahat” di taman eden yang mendiami tubuh Hawa dan Adam sehingga mereka berperilaku telanjang. Lagi, seperti yang dikatakan Polimpung, Yesus yang memerlukan rahim Maria dan kandang domba untuk kelahirannya, dalam hal ini pohon pengetahuan berbuah kedaulatan yang mendiami rahim negara membuahkan perilaku berkonflik di Laut Cina selatan.

Doxa atau skema-skema pemikiran individual yang menjadi kebenaran universal menguak problematika kompleks. Ini adalah asal usul mikro-fasis bernegara. Melalui

doxa yang dibangun oleh Leviathan Hobesian, berdampak signifikan pada hubungan antarnegara di LCS. Doxa tersebut menciptakan totalitarianisme pemimpin-pemimpin negara dengan menghadirkan *mortal god* dalam rahim negara dan melakukan kebenaran serigala bagi sesamanya di LCS. Oleh karena itu, dibutuhkan dekonstruksi untuk membongkar kejelasan teks kedaulatan bertubuh negara.

### **C. Paradoks Kedaulatan**

Misteri roh kedaulatan bertubuh negara sebagai teks dominan yang menggerakkan perilaku negara untuk berkonflik di LCS, akan ditunjukkan paradoksalnya. Kedaulatan merupakan rezim kebenaran kaum modern yang diproduksi menjadi pengetahuan universal negara bangsa. Dipastikan semua negara memiliki rezim kedaulatan, sehingga kedaulatan menjadi syarat mutlak penggerak perilaku negara. Rezim tersebut mampu bertahan lama sebagai pengetahuan dominan setiap negara. Foucault mengatakan bahwa kekuasaan (*power*) terspesialisasi melalui ilmu pengetahuan. Ia menyebutnya sebagai hukum imanensi (*rule of immanence*). Dengan demikian kekuasaan terdesentralisasi dan terpluralisasi.<sup>183</sup>

---

<sup>183</sup> Burchil & Linklater, p.248



Teks kedaulatan memiliki relasi kuat dalam kognitif struktural *civil society* maupun *political society*. Mengakar sebagai pengetahuan yang mengidolakan negara. Hampir dipastikan bahwa pemaksaan pengetahuan negara berdaulat dalam paternalistik identitas menjadi universal. Laclau menyebutnya sebagai hegemoni diskursif. Dalam konflik LCS yang dikemukakan sebelumnya, kedaulatan menjadi suatu alasan riil. Ia menjadi pengetahuan dominan dalam konflik LCS, sehingga pengetahuan masyarakat lokal terkuburkan (belum mati). Cina dan negara-negara Asia Tenggara melalui kedaulatan wilayah laut berkonflik mempertahankan hasrat negara.

Berdiskusi tentang kedaulatan tidak terlepas oleh pemikir abad pertengahan yaitu Thomas Hobbes. Ia adalah pencetus teori kedaulatan. Menurutnya, manusia adalah serigala bagi sesamanya. Suatu bangunan wacana yang menarik sehingga aliran positivisme menyakini bahwa kedaulatan merupakan sesuatu yang terberi karena berasal dari sifat dasar manusia yaitu serigala. Kondisi *homo homini lupus* adalah manusia selalu dihantui oleh rasa takut akan ancaman yang datang dari manusia lain. Prakondisi ini disebut Hobbes sebagai kondisi alamiah. Diktum Hobbes yang kemudian dikutip oleh Foucault adalah “perang semua

melawan perang atau *bellum omnium contra omnes*.”<sup>184</sup> Berdasarkan kondisi alamiah inilah maka para manusia serigala memaksakan lahirnya Leviathan untuk menjaga dan meredam sifat manusia serigala terhadap manusia lain.

Leviathan merupakan kondisi tertekan para *lupus* pada keinginan untuk aman. Sehingga kemudian Leviathan disebut dari *lupus*, oleh *lupus*, dan untuk *lupus*. Lalu, mengapa Hobbes menyebut kedaulatan Leviathan adalah *mortal god* atau berasal dari tuhan?.<sup>185</sup> Secara historis hal ini dijadikan sebagai kebenaran para raja dengan berbagai macam doktrin, misalnya negara adalah raja, seorang raja adalah representasi tuhan, doktrin dua tubuh, bahkan doktrin dua pedang. Misalnya raja Henri VIII menganggap dirinya sebagai “utusan Yesus Kristus” untuk menjadi raja yang memerintah tubuh kerajaannya. Selain itu, raja Charles I yang meyakini bahwa kerajaannya diberikan oleh Tuhan.<sup>186</sup>

Selanjutnya, manusia adalah serigala bagi sesamanya menciptakan komoditas bersama untuk mewujudkan rasa aman. Foucault menyebutnya sebagai mikro-kekuasaan, kekuasaan memproduksi subjek melalui wacana dan

---

<sup>184</sup> M. Foucault, *Il Faut Défendre La Société*, English Edition *Society Must be Defended*, translate by David Macey, picador, New York, 1975-76, p.112.

<sup>185</sup> Hobbes, p.275.

kemudian mengontrolnya. Para *lupus* menciptakan ketidakamanan dalam dirinya sehingga menekan agar Leviathan berkuasa atas dirinya untuk keamanan. Hal ini mendorong subjek untuk memberikan semua yang dimilikinya kepada serigala untuk menjaganya dari serigala lain. Akhirnya memunculkan sifat manusia yang individualistik menciptakan konsep-konsep kedaulatan Leviathan seperti nasionalisme dan kewarganegaraan. Penyerahan keamanan kepada *mortal god* memberikan peluang terhadap kedaulatan menempati tubuh negara dengan reproduksi ketidakamanan. Wacana nasionalisme dan wacana kewarganegaraan menjadi wacana dominan dalam menjaga eksistensi kedaulatan Leviathan dengan cara menguasai subjek tetap berpikir membutuhkan Leviathan.

Untuk melacak misteri kedaulatan Westphalia sebagai suatu kuasa wacana maka hegemoni diskursif kedaulatan Leviathan yang lahir dari antagonisme para *lupus* harus dipandang sebagai wacana universal. Penelusuran ini dibatasi mulai perang tiga puluh tahun. Era sebelum perang tiga puluh tahun akan didiskusikan pada lain kesempatan. Westphalia merupakan seperangkat prinsip, aturan, dan norma yang memproduksi berbagai macam pengetahuan, yang kemudian menjadi landasan filsafat modern. Salah satu perangkat lunak yang disepakati pada perjanjian Westphalia adalah rezim

kedaulatan. Rezim didefinisikan sebagai *sets of implicit or explicit principles, norms, rules, and decision making procedures around which actors expectation converge in a given area*.<sup>187</sup> Dengan demikian maka Westphalia dapat dikalim sebagai sebuah rezim karena memproduksi prinsip, norma, aturan, keputusan membuat prosedur tentang kedaulatan. Sehingga kedaulatan adalah sebuah proses pengetahuan historis yang dibentuk oleh para aktor pada perjanjian Westphalia, bukan Leviathan yang terberi secara alamiah.

Pengetahuan Leviathan yang dianggap alamiah dipertahankan oleh kalangan realisme, misalnya Joseph Grieco yang mengatakan bahwa rezim internasional sebagai landasan kerja sama neoliberalisme terlalu meremehkan sistem internasional yang anarki. Setiap negara tidak dapat dipercaya dalam kerja sama, kemungkinan salah satu negara inkar terhadap perjanjian kerja sama dalam sebuah rezim karena sistem anarki. Keuntungan relatif dan absolute ala neoliberalisme akan membentuk perilaku negara untuk bersikap curang dan menarik diri. Dalam mencari keuntungan dalam politik global, negara lebih banyak menjadi serigala

---

<sup>187</sup> S.D. Kresner, *International Rezim*, Cornell University Press, New York, 1983, p.2.

bagi sesamanya karena negara pada dasarnya adalah Leviathan.

Menurut Polimpung, pandangan Grieco tersebut karena hanya melihat sebelah mata terhadap model permainan *prisoner's dilemma*. Permainan ini membawa para aktor pada suatu kerugian besar jika menarik diri dari kerja sama. Oleh karena itu, tidaklah mungkin salah satu pihak berani mengambil resiko untuk sesuatu yang berdampak pada kehancuran besar. Dalam hal ini, neoliberalisme institusional justru lebih memahami anarki dibandingkan realisme.<sup>188</sup>

Kembali ke perjanjian Westphalia. Terbentuk sebuah rezim Westphalia merupakan dorongan mengakhiri perang 30 tahun. Perang ini terdiri dari 4 fase. Pertama, pada tahun 1618-1625 yaitu perang saudara di Bohemia. Perang antara katolik yang dipimpin oleh Raja Ferdinand dan Uni evangelis dipimpin oleh Pangeran Frederick yang berasal dari Palestin. Kedua, pada tahun 1625-1629 yaitu perang Denmark. Perang ini melibatkan Raja Christian IV yang berasal dari Denmark, merupakan pembela kaum protestan. Namun, kemenangan masih berpihak pada kaum katolik. Fase ketiga, adalah fase kemenangan protestan disebut sebagai perang Swedia. Di mana Raja Gustavus Adolphus berhasil menjadikan Denmark, Polandia, Finlandia, dan negara-negara kecil lainnya sebagai

---

<sup>188</sup> Polimpung, p.27.

garda terdepan protestan. Fase keempat adalah sebuah fase yang muncul karena keterlibatan Prancis, Belanda, dan Skotlandia untuk memperkuat protestan. Tidak ada satu pihakpun yang memenangkan perang fase terakhir ini sampai berakhir pada perjanjian Westphalia dengan dua traktat; *Muster* berisi perjanjian perdamaian antara Prancis dan kekaisaran agung Romawi. *Osnabruk* adalah perjanjian perdamaian antara Swedia dan kekaisaran agung Romawi.<sup>189</sup>

Jika Westphalia dipandang dari kacamata Foucault maka perlu ditelusuri relasi kuasa para Raja Prancis dan Raja Swedia bersama Raja-Raja lain serta Raja Agung Romawi mengkonstruksi wacana yang kemudian dapat berkuasa mempertahankan eksistensinya pasca Westphalia. Dalam hal ini pembacaan dekonstruksi memperlihatkan bahwa teks kedaulatan merupakan perangkat paling efektif mempertahankan prinsip *mortal god*. Dalam pandangan hegemoni Laclau dan Mouffe, diskursif pengetahuan kedaulatan menggerakkan komunitas epistemik pada universalisme wacana yaitu kedaulatan.

Hasrat para Raja mempertahankan eksistensi ketuhanannya dengan melegitimasi prinsip, norma, aturan, dan prosedur keputusan dalam sebuah perjanjian bersejarah. Dengan kata lain bahwa kedaulatan atau Leviathan Hobbesian

---

<sup>189</sup> Polimpung, pp.114-115.

bukanlah sesuatu yang terberi melainkan sebuah upaya kekuasaan berupa wacana bertujuan mempertahankan eksistensi sang Raja pada era kontemporer. Melalui wacana kekuasaan (kedaulatan) ini, negara dan pemimpinnya (seperti raja dan kerajaan) eksis pada politik global. Kelahiran kedaulatan modern melalui relasi kekuasaan Westphalia memilih negara sebagai rahimnya, dan arena internasional sebagai tempat lahirnya. Implikasi signifikan pada kelahiran kedaulatan ini dapat dikonfirmasi pada PD I, PD II, dan Perang Dingin. Negara dengan hasrat kekuasaan kedaulatannya membuahakan perilaku serigala bagi sesama negaranya. Anomalinnya, Westphalia sebagai rezim perdamaian harusnya menciptakan wacana kedaulatan sebagai wacana damai, ternyata sebaliknya membuahakan perilaku serigala.

Demikian kata Polimpung, Jika wacana kedaulatan lahir karena relasi kekuasaan Westphalia, maka dia-pun dapat dibunuh oleh kekuasaan wacana lainnya. Kata lain, sesuatu yang lahir, pasti mati. Bourdieu mengatakan bahwa pertarungan wacana akan terus terjadi pada arena-arena kekuasaan seperti arena budaya, sosial, politik, dan ekonomi. Dekonstruksi kedaulatan Westphalia mengungkap sisi buruk kedaulatan sehingga negara akan terus menerus mengalami mimpi buruk tentang rasa aman. Instrumen Leviathan seperti

penguatan militer, alutsista, dan senjata canggih menjadi pilihan mempertahankan diri kaum serigala. Seterusnya tulisan ini akan memperlihatkan implikasi kelahiran kedaulatan di arena pertarungan Laut Cina Selatan.

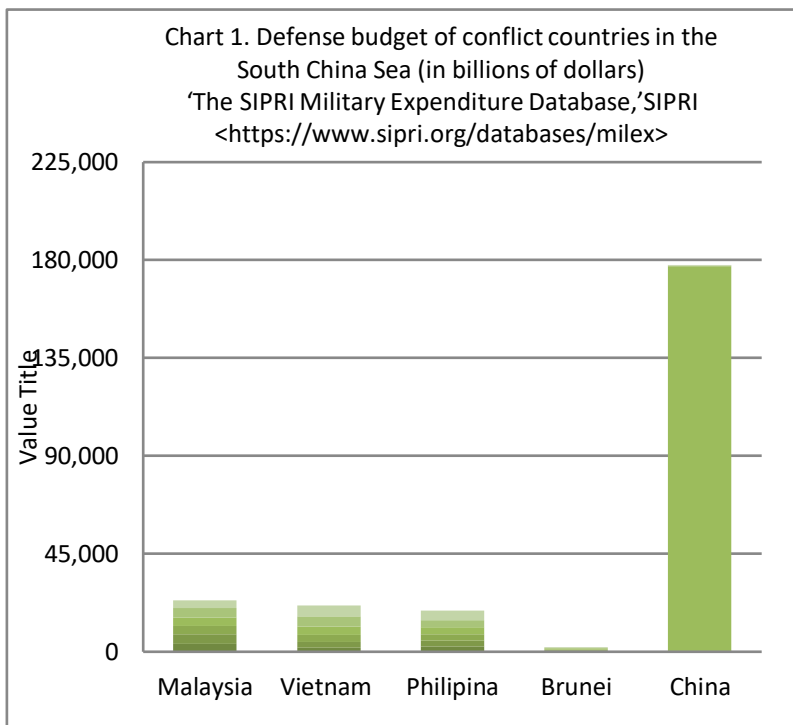
#### **D. Implikasi Kekuasaan Kedaulatan Terhadap Konflik Laut Cina Selatan**

Stabilitas keamanan di Laut Cina Selatan penuh dengan friksi, konflik, dan ketegangan yang mewarnai hubungan antarnegara kawasan sehingga sangat berbahaya dan sensitif. Kuasa wacana kedaulatan berimplikasi pada negara-negara berkonflik berusaha meningkatkan postur kekuatan militer mereka dengan anggaran pertahanan yang besar dari tahun 2005 sampai 2017 dan perbandingan kekuatan militer pada tahun 2019 (lihat grafik 4 dan Tabel 8). Peningkatan anggaran pertahanan dan alutsista masing-masing negara merupakan implementasi teks kedaulatan.

Meminjam Foucault, bahwa kekuasaan kedaulatan selalu bermakna negatif, berbeda dengan kita memahami kekuasaan pendisiplinan dan kekuasaan *governmentality*. Kedaulatan selalu memproduksi rezim pengetahuan atau rezim kebenaran yang berusaha mempertahankan kejayaannya melalui pertahanan kekuatan militer. Sejak kedaulatan menjadi rezim pengetahuan, banyak peristiwa



konflik yang mengikuti rezim kedaulatan tersebut, misalnya terjadi perang dunia pertama tahun 1914-1918 dan perang dunia kedua 1939-1945, serta perang dingin 1945-1989. Pasca perang dingin kita menjumpai hal yang sama di Laut Cina Selatan yaitu konflik akibat klaim tumpang tindih terkait kedaulatan teritorial.



Sumber: disusun penulis

Grafik 4. Anggaran Militer Negara-Negara Berkonflik di LCS

Tabel 8. COMPARISONS OF MILITARY STRENGTHS 2019<sup>190</sup>

<b>SUBJECT</b>	<b>CHINA</b>	<b>VIETNAM</b>	<b>PHILIPINES</b>	<b>MALAYSIA</b>
GFP Rank	3 (of 137)	23 (of 1370)	64 (of 137)	41 (of 137)
Total population	1.384.688.986	97.040.334	105.893.381	31.809.660
Manpower available	752.855.402	51.043.216	51.887.757	15.201.837
Fit-for-service	621.105.706	41.804.394	42.547.960	12.587.121
Reaching military age	19.614.518	1.651.274	2.127.394	526.147
Active personnel	2.183.000	482.000	125.000	116.000
Reserve components	510.000	5.000.000	180.000	300.000
Total military personnel	2.693.000	5.000.000	305.000	4.100.000
Defense budget	\$224.000.000.000	\$3.365.000.000	\$3.000.000.000	\$4.700.000.000
External debt	\$1.598.000.000.000	\$96.580.000.000	\$76.180.000.000	\$217.200.000.000
Foreign reserve	\$3.236.000.000.000	\$49.500.000.000	\$81.570.000.000	\$102.400.000.000
Purchasing power	\$24.810.000.000.000	\$686.500.000.000	\$931.000.000.000	\$977.500.000.000

<sup>190</sup> Comparisons of World Military Strengths , “*Global fire power* “  
<https://www.globalfirepower.com/countries-comparison.asp>,  
 diakses 18 April 2019.

Total aircraft	\$3.187	318	171	187
Tank strength	\$13.050	2.575	18	74
Tota naval assets	714	65	119	61

Data di atas menunjukkan sisi paradoksal sang Leviathan. Realisme klasik membaca bahwa keseimbangan kekuatan antarnegara sebagai instrumen tidak terjadi perang di Laut Cina Selatan. Perilaku di atas lebih menunjukkan upaya mempertahankan eksistensinya seperti sang raja mempertahankan eksistensinya pada perjanjian Westphalia. Data tersebut menunjukkan tidak adanya keseimbangan kekuatan antarnegara. Potensi pembuat perang besar di LCS dapat datang dari negara Cina, dengan memperhatikan grafik anggaran pertahanan yang terus naik hingga 2019, kelengkapan alutsista perang yang canggih dibandingkan negara-negara lain. Dengan begitu maka negara-negara penganut pakta aliansi berusaha menghadirkan sistem intrusif di kawasan LCS. Mereka adalah negara-negara kuat luar kawasan seperti Amerika Serikat dan Rusia. Jika kehadiran ini dibaca dari kekuasaan wacana maka pakta aliansi bukanlah alasan keamanan, namun relasi kekuasaan dan ideologi menjadi alasan yang kuat.

Bagian lain datang menawarkan permainan *prisoners dilemma* sebagai wacana neoliberalisme. Anarki diatasi lewat keuntungan absolut dan relatif. Hal ini akan berakibat pada diskursif hegemoni berdampak gerakan sosial berdasarkan nasionalisme. Jika logika kedaulatan dipertahankan sebagai sebuah prinsip pencapaian perdamaian, maka ini adalah kebohongan terselubung para elit negara. Logika negara dan kedaulatan tidak akan pernah membuahkan pengetahuan perdamaian, oleh karena berasal dari pohon yang sama yaitu kekuasaan wacana kedaulatan Westphalia. Pohon pengetahuan ini memiliki buah konflik dan perang (terbukti PD I & PD II).

Perilaku negara-negara berkonflik pada grafik dan tabel di atas membuktikan bahwa sekalipun kedaulatan pada era kontemporer terlihat lemah kuasanya, namun pada satu sisi negara-negara tetap menjadikannya sebagai rezim penggerak dalam politik internasional. Sehingga menguatkan data bahwa negara tetap kuatir akan eksistensinya. Kaum realisme menganggap bahwa dengan penguatan alutsista militer dan peningkatan anggaran pertahanan dapat berimplikasi pada pemeliharaan keamanan. Bagi mereka negara harus kuat secara militer untuk menjamin rakyatnya aman.

Implikasi teks kedaulatan teritorial dapat dikonfirmasi lagi pada partisipasi yang signifikan oleh Cina, yaitu intervensi militer, terlihat pada konflik LCS. Hal ini terlihat dari kebijakan Cina dalam menempatkan pangkalan militer di LCS untuk menjaga kepentingannya (lihat Gambar 7). Selama April 2010, misalnya, Cina telah melancarkan intervensi militer di Laut Cina Selatan dengan membangun *Fiery Cross Reef*, yang dapat mempermudah nelayan-nelayan Cina masuk ke LCS.<sup>191</sup>



Gambar 7. Pangkalan Militer Cina di LCS (*Fiery Cross Reef*)<sup>192</sup>

---

<sup>191</sup>D. Scott, 'Conflict Irresolution in the South China Sea,' *Asian Survey*, vol. 52, no. 6, 2012, p.1036.

<sup>192</sup>Fiery Cross Reef, 'Asia Maritime Transparency Initiative (daring), <<http://amti.csis.org/mischief-reef/>>, diakses pada 24 Maret 2019.

Sejak Agustus 2014 militer Cina terus memperluas *Fiery Cross Reef* di tepi barat kepulauan Spratly. Pakar dari *Centre for International and Strategic Studies* (CSIS) di Washington, D.C. dan Asia Maritime Transparency Initiative (AMTI) meyakini bahwa negeri tirai bambu itu tengah membangun pangkalan udara dengan panjang tiga kilometer dan lebar 200 sampai 300 meter. Landasan sepanjang itu mampu menampung pesawat pembom jarak jauh tipe H-6 milik Cina.<sup>193</sup> Intervensi militer Cina tersebut merupakan perwujudan wacana kedaulatan.

Pangkalan militer Cina di Laut Cina Selatan (mungkin) cukup besar untuk menampung pesawat angkut militer Y-20, pesawat jet pembom H-6, dan J-10 *fighter*. Hal ini telah memicu perlombaan senjata di LCS. Penggelaran kekuatan Cina di Laut Cina Selatan bukan saja membuat ketakutan di kawasan, tetapi juga dunia internasional. Ini bukan hanya soal kepentingan ekonomi yang terancam – Laut Cina Selatan merupakan jalur perdagangan yang mengantarkan barang dan jasa internasional hingga mencapai nilai \$5 trilyun setiap tahun<sup>194</sup> – namun juga munculnya perspektif secara umum

---

<sup>193</sup>Fiery Cross Reef, '*Asia Maritime Transparency Initiative* (daring).

<sup>194</sup>Mengapa Indonesia Menambah Kekuatan Militer di Natuna, '*BBC Indonesia* (daring), 1 Januari 2016, <[http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/12/151230\\_dunia\\_indonesia](http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/12/151230_dunia_indonesia)

bahwa ketegangan dan konflik perbatasan tidak lagi ditentukan oleh upaya diplomatis, melainkan lewat kekuatan militer. Hal ini dapat dilihat dari respon beberapa negara, seperti AS yang mengirimkan militernya ke Laut Cina Selatan untuk menguji kebebasan navigasi. Vietnam, Malaysia, dan Filipina terus melakukan kebijakan pengaturan bilateral dengan negara-negara non-kawasan untuk merespon Cina.

Melihat implikasi perjuangan kedaulatan teritorial di LCS, mulai dari sengketa perbatasan, ketegangan antarnegara, hingga respon peningkatan postur kekuatan militer, dapat diargumentasikan bahwa kawasan ini memiliki realitas keamanan yang unik. Tidak pernah terjadi perang di LCS dalam beberapa dekade ini, namun bukan berarti kawasan tersebut bebas dari potensi perang. Peningkatan alutsista dan anggaran belanja pertahanan dari setiap negara kawasan manandakan bahwa LCS bersiap untuk menghadapi kemungkinan perang terbuka, khususnya yang muncul dari konflik-konflik perbatasan dan saling klaim wilayah.

Konstelasi konflik dan ketegangan kawasan LCS merupakan isu keamanan yang penting karena menyangkut eksistensi negara dan kehidupan warganya. Isu keamanan

---

[natuna](http://www.natuna.com)> dan 'Review Artikel: ASEAN Diuji Hadapi Sengketa Wilayah, 'Kompasiana (daring), 2013, <[http://www.kompasiana.com/www.nokjannah.com/review-artikel-asean-diuji-hadapi-sengketa-wilayah\\_5528d8896ea834a47f8b45a0](http://www.kompasiana.com/www.nokjannah.com/review-artikel-asean-diuji-hadapi-sengketa-wilayah_5528d8896ea834a47f8b45a0)>, diakses pada 26 Maret 2019.

tradisional masih mewarnai politik internasional kawasan ini, di mana konflik yang berkepanjangan di kawasan dapat memicu perang antarnegara. Keseluruhan konflik di kawasan ini memiliki isu yang sama, yaitu kedaulatan teritorial negara. Potensi perang diperkuat dengan pertunjukan kekuatan antarnegara sebagaimana ditampakkan oleh peningkatan anggaran pertahanan maupun alutsista. Negara-negara ini juga telah melakukan penyeimbangan kekuatan dengan cara menjalin hubungan militer dengan negara-negara kuat luar kawasan. Berdasarkan hal tersebut maka dapat diargumentasikan bahwa akar konflik LCS adalah kehadiran wacana kedaulatan sebagai kuasa dalam menggiring negara-negara pada perilaku yang sama (logika kedaulatan yang sama), sehingga diyakini logika ini mampu membuahkan perang terbuka di LCS. Dalam pandangan Bourdieu, dibutuhkan kuasa wacana budaya yang lain untuk mengimbangi kuasa wacana kedaulatan modern. Dalam hal ini akan ditelusuri *minor narrative* yang lahir dari budaya Cina, sehingga mewujudkan tidak terjadinya perang.



## **BAB VI**

### **KEKUASAAN BUDAYA**

Bagian ini akan dijelaskan narasi tandingan teks kedaulatan yaitu konfusianisme. Narasi kecil konfusianisme merupakan skema pemikiran atau persepsi budaya yang menyejarah dan melekat pada kehidupan masyarakat budaya Cina. Ia diyakini memproduksi pengetahuan lokal yang selanjutnya melekat pada pemikiran elit-elit politik Cina, sehingga mempengaruhi kebijakan luar negeri Cina untuk tidak perang terbuka di LCS. Hal ini akan ditelusuri dengan menggunakan pendekatan kekuasaan budaya dari Bourdieu yang menekankan pada habitus, kapital, dan arena. Selain itu, pendekatan hegemoni diskursif Ernesto Laclau akan mewarnai telusur data gerakan sosial konfusianisme dalam arena pertarungan wacana.

#### **A. Minor Narrative**

Menguak wacana lokal yang terkubur secara politis akan diperlihatkan melalui pendekatan kekuasaan yang dicetuskan oleh Bourdieu, dan untuk menunjukkan gerakan sosial yang mendukung teks minor lokal menggunakan Laclau dan Mouffe tentang hegemoni diskursif. Bagian ini sangat menarik untuk ditelusuri karena mampu melahirkan pandangan baru dalam hubungan internasional. Benturan

kuasa budaya Cina dan kuasa budaya modern akan memberikan kontribusi besar terhadap konflik di LCS. Teks minor tersebut diyakini mengimbangi teks kedaulatan melalui kebijakan luar negeri Cina di LCS. kekuasaan bukanlah sesuatu yang dipahami oleh pemikir strukturalis, namun, kekuasaan adalah sebuah dominasi wacana yang terlegitimasi dan melalui proses dalam arena pertarungan. Dengan kata lain, 'wacana' adalah kekuasaan yang sebenarnya. Bourdieu menguraikan kekuasaan dalam tiga hal penting; habitus, kapital, dan arena.

Untuk menunjukkan pemaknaan teks minor Cina yang mempengaruhi setiap arena kekuasaan, akan dipetakan tiga tahapan penelusuran; pertama, menunjukkan konfusianisme sebagai habitus mencakup segala jenis aktivitas budaya; produksi; persepsi; dan evaluasi terhadap praktik hidup sehari-sehari. Habitus konfusianisme terjadi dalam ruang sosial melalui pengalaman yang terjadi dalam waktu yang lama. Pengalaman-pengalaman sosial tersebut membentuk doxa yang kemudian mengontrol para elit dalam merumuskan kebijakan di LCS. Doxa yang dimaksud adalah skema-skema pemikiran dan persepsi para elit politik yang dihasilkan oleh struktur-struktur sosial. Dengan demikian, agen/aktor bersifat memproduksi wacana yang dipengaruhi oleh lingkungan budaya, sebaliknya menjadi doxa untuk mengontrolnya;

Kedua, menunjukkan elit atau kekuasaan yang berelasi dengan teks konfusianisme. Hal ini merupakan modal yang digunakan elit-elit Cina untuk mencapai dominasinya. Di antaranya kapital ekonomi, sosial, dan kultural atau simbolik. Kapital ekonomi berkaitan dengan kepemilikan harta benda yang dimiliki oleh seseorang. Kapital sosial adalah seseorang yang memiliki modal ekonomi dan budaya. Kapital budaya atau kekuasaan simbolik adalah kemampuan verbal, ketrampilan, pendidikan, dan pengetahuan yang dimiliki seseorang. Bourdieu menjelaskan bahwa satu jenis kapital dapat membaur dengan kapital lain. Misalnya seseorang yang memiliki semua kapital; ekonomi, sosial, dan kultural. Untuk mencapai kekuasaan adalah pertarungan dan perebutan dalam arena tertentu yang terdapat doxa (struktur mapan) dalam arena tersebut. Bangunan konstruksi teks konfusianisme di dalam arena yang akan membedakan dengan struktur dominan yang sudah terlegitimasi;

Ketiga, menunjukkan arena/ranah/field sebagai ruang pertarungan teks kedaulatan dan teks konfusianisme yang di dalamnya memiliki beberapa indikator khusus; strategi konservasi adalah upaya untuk mempertahankan wacana dominan atau doxa; suksesi merupakan upaya untuk mencapai kekuasaan dengan menggunakan kapital; sedangkan subversi adalah salah satu upaya untuk meruntuhkan struktur yang

sudah matang atau dengan menawarkan reproduksi wacana. Ia diyakini sebagai ortodoxa atau sebuah keyakinan tentang sesuatu yang benar. Di dalam arena selalu terjadi pertempuran wacana karena terdapat heterodoxa atau banyaknya skema-skema pemikiran dan persepsi yang dihasilkan oleh struktur-struktur sosial objektif. Dengan demikian, tergabungnya habitus dan kapital di dalam arena akan menghasilkan wacana dominan yang mencapai legitimasi. Kekuasaan tersebut akan mempengaruhi perilaku aktor negara untuk bertindak tidak berperang di LCS. Selain itu, akan ditunjukkan implikasi terhadap kebijakan luar negeri Cina di LCS.

## **B. Habitus Konfusianisme**

Wacana Konfusianisme menjadi penting dalam wacana politik, meskipun pada kenyataannya tidak ada seorang Konghucu tampaknya telah menjadi aktor politik yang signifikan selama periode Klasik. Namun, di era kontemporer teks konfusianisme menjadi kajian menarik para intelektual etnologi dan antropologi bahkan hubungan internasional. Paska perang dingin, fenomena internasional bergeser pada benturan-benturan budaya. Sepertinya Fukuyama (belum) tepat menguniversalkan pengetahuan mengenai akhir dari peradaban dunia adalah demokrasi liberal. Sekalipun pengetahuan liberalisme memiliki relasi kuasa yang kuat

sehingga keduanya (kuasa dan pengetahuan) masih eksis di era kontemporer.

Hipotesis tergesa-gesa Fukuyama dikritik oleh Huntington dalam bukunya yang terkenal; *clash of civilization*. Ia menunjukkan bahwa liberalisme bukanlah akhir dari peradaban manusia, namun di masa depan akan ada benturan peradaban barat & islam dan barat & timur. Peristiwa WTC 9/11 2001 membuktikan prediksi Huntington mendekati kebenaran. Pada tahun 2013 di Cina, Zheng Bijian mendeklarasikan *the peaceful rise* berbasis nilai-nilai konfusianisme. Hal ini menggambarkan bahwa nilai-nilai barat sedang berhadapan dengan nilai-nilai lokal. Bagian ini akan mengelaborasi nilai-nilai konfusianisme yang menjadi teks tandingan pengetahuan barat. Konfusius merupakan seorang Guru Agung yang berasal dari dataran Cina. Ia lahir pada tahun 551 SM, masa pemerintahan Raja Ling dari Dinasti Zhou, dengan nama kecil Khung Chiu atau Zhong Ni. Konfusius dikenal dengan ajarannya yang sarat akan moralitas atau kebajikan sebagai landasan utama untuk menjalani kehidupan yang harmonis. Michale Hart, dalam bukunya *The 100: A Ranking of the Most Influential Persons in History*; Fermi-Hart paradoks, memposisikan Konfusius pada urutan kelima setelah Nabi Muhammad, Isaac Newton, Nabi Isa dan Buddha.

Ajaran konfusianisme yang berasal dari konfusius berakar pada nilai budaya harmoni. Ia mengajarkan agar setiap kehidupan manusia selalu didasarkan pada cinta terhadap sesama. Dalam perkembangannya, ajaran konfusius dipakai sebagai landasan pemikiran diberbagai aspek kehidupan selama berabad-abad. Pembatiran terhadap nilai harmonisasi ini telah berakar pada masyarakat Cina. Mereka menjaga keharmonisan antara manusia dan alam; antara orang dan masyarakat; antara anggota komunitas yang berbeda; dan antara pikiran dan tubuh. Dari semua ajaran konfusius, nilai intinya adalah harmoni. Harmoni yang dimaksud bukan semua harus sama atau tidak ada perbedaan, harmoni konfusius berbeda dengan keseragaman. Dasar pijakan teks ini adalah sebuah perbedaan, sehingga dibutuhkan nilai budaya yang harmoni. Selanjutnya nilai harmoni konfusianisme menjadi sebuah energy pemersatu Cina. berkembang dari negara yang tidak terkoordinasi menjadi negara yang terkoordinasi; dari asimetri ke simetri; dan dari ketidakseimbangan ke keseimbangan.<sup>195</sup>

Skema pemikiran masyarakat Cina didasarkan pada nilai harmoni konfusianisme. Nilai-nilai budaya tradisional

---

<sup>195</sup> Z. Lihua, 'China's Tradition Cultural Value and National Identity,' *Center for Global Policy* (Daring), Novemver, 21, 2013, <<https://carnegietsinghua.org/2013/11/21/china-s-traditional-cultural-values-and-national-identity-pub-53613>>, diakses pada 20 April 2019.

Cina tentang harmoni, kebajikan, kebenaran, kesopanan, kebijaksanaan, kejujuran, kesetiaan, dan kesalehan berbakti diwujudkan dalam kebijakan luar negeri Cina melalui konsep harmoni.<sup>196</sup> Nilai harmoni kemudian berkembang menjadi nilai Asia di bidang ekonomi. Misalnya Dalam beberapa dekade terakhir, politisi Asia seperti Lee Kuan Yew, Singapura, atau Dr. Mahathir dari Malaysia telah mendukung mitos ini dengan menarik perhatian pada 'dekadensi' individualisme Barat dan dengan mendeklarasikan bahwa kekuatan ekonomi negara mereka disebabkan oleh budaya kolektivitas yang kuat berdasarkan nilai-nilai keluarga Konfusianisme (berasal dari Cina) seperti keteraturan, rasa hormat, hierarki, dan harmoni.<sup>197</sup>

Secara historis nilai harmoni Konfusianisme telah melekat menjadi habitus yang berkembang menjadi skema pemikiran pengembangan ekonomi. Di antaranya terdapat 4 nilai dalam teks harmoni konfusianisme di antaranya; *Confucianism & prosperity*, *Confucianism & inner circle*, *Confucian relationship*, and *joining the Confucian family*. Nilai-nilai Konfusianisme dapat dikatakan telah mendorong

---

<sup>196</sup> Lihua, 'China's Tradition Cultural Value and National Identity,' *Center for Global Policy* (Daring).

<sup>197</sup> David Clive Price, '4 Confucian Values for Doing Business in China' (daring), <<http://davidcliveprice.com/4-confucian-values-business-china/>>, diakses pada 20 April 2019.

tingkat tabungan yang tinggi dan karenanya merupakan modal besar untuk pertumbuhan ekonomi. Tingkat tabungan rata-rata di Cina adalah sekitar 50 persen sebagai persentasi dari pendapatan, salah satu yang tertinggi di dunia. Nilai-nilai Konfusianisme juga berasal dari sikap bahwa kepentingan keluarga dan teman dekat dalam kelompok harus dilindungi dengan segala cara dan ditempatkan di depan kepentingan publik. Selain itu, nilai ekonomi didasarkan terutama pada kepercayaan, timbal balik dan kewajiban timbal balik yang berasal dari nilai-nilai Konfusianisme. Karena itu mereka tidak tunduk pada kontrak atau transaksi tetapi pada kepercayaan, ketulusan dan kesetiaan. Lagi, nilai pembangunan ekonomi Konfusianisme didasarkan pada hubungan baik yang terjalin lama dalam ketulusan dan kesetiaan.<sup>198</sup>

### **C. Kapital Konfusianisme**

Nilai-nilai harmoni Konfusianisme mendapatkan kapital budaya sangat tinggi di elit-elit politik Cina. Mulai dari presiden Cina yang pertama, Mao Zedong, sampai presiden Cina ketujuh, Xi Jinping, konfusianisme menjadi pengetahuan yang terspesialisasi dan terpluralisasi. Relasi hubungan kuasa

---

<sup>198</sup> David Clive Price, *4 Confucian Values for Doing Business in China* (daring).



budaya Konfusianisme dan kapital elit di arena politik berkontribusi besar terhadap pembentukan kapital budaya. Namun, implementasi Konfusianisme baru terlihat sejak Hu Jintao menjadi presiden. Teks kekuasaan budaya Konfusianisme merupakan kebenaran masyarakat Cina yang telah lama terkubur. Sekalipun, para elit politik adalah produk pengetahuan Konfusianisme, namun wacana ini mulai bangkit paska perang dingin.

Presiden Hu Jintao telah berusaha untuk menstabilkan arah moral Cina yang berputar pada konstruksi pengetahuan sosialis. Arah Cina di era Hu dikembalikan pada ajaran-ajaran Konfusius. Hal tersebut karena ia merasa memiliki hutang budaya lebih besar daripada Mao Zedong. Melalui tokoh terkemuka Zheng Bijian yang dikenal sebagai seorang pemikir dan ahli strategi sekaligus menjadi penasihat politik pemimpin Republik Rakyat Cina, Hu Jintao. Bijian mendeklarasikan bahwa dasar kebangkitan Cina kedepan adalah kebangkitan yang menjunjung nilai-nilai konfusianisme.

Selain kapital budaya konfusianisme yang melekat pada elit-elit politik, terdapat juga banyak cendekiawan yang terus memproduksi pengetahuan Konfusianisme. Misalnya, cendekiawan Martin Stuart Fox menyatakan bahwa, "Konfusius percaya bahwa tatanan sosial dan moral bertumpu

pada pengakuan universal dan penerimaan hierarki sosial dan politik. Sangat penting bahwa setiap orang harus mengetahui tempat mereka di dunia, menerima tugas dan tanggung jawab mereka, dan mengenali atasan dan bawahan mereka.” Selain itu, Tan See Seng dan Amitav Acharya mengatakan bahwa Konfusianisme adalah<sup>199</sup>

*Mutual trust (“huxin”, or non-hostility and non-suspicion sustained by regular, multiple-track dialogue and communications), mutual benefit (“huli”, or economic-integration–driven common security), equality (“pingdeng”, or equality of voice regardless of differences in wealth, size, and power, and respect for diversity of cultures and ideologies), and cooperation (“xiezu”, or non-exclusion, non-targeting of third parties, tolerance of differences, peaceful and equal consultation to resolve disputes and prevent military conflicts, and gradualism).”*

Selanjutnya nilai-nilai harmonisasi yang ada pada etika-etika di atas dipahami cendikiawan Na Chen dengan mengatakan bahwa “Konfusianisme telah menjadi bagian yang melekat secara *de facto* dari kehidupan sosial-budaya Tiongkok, kebangkitan kembali Konfusianisme datang secara spontan dan dalam beberapa kasus dilakukan tanpa menyadarinya. Kebangkitan kembali Konfusianisme disertai

---

<sup>199</sup> Tan See Seng and Amitav Acharya (ed). 2004. *Asia-Pacific Security Cooperation: National Interests and Regional Order*. New York: Routledge. P.61.

dengan pembangunan kembali identitas budaya Cina.” Melalui kapital yang dimiliki oleh teks Konfusianisme di atas, maka dapat diasumsikan bahwa Konfusianisme sebagai teks minor memiliki kekuatan wacana karena berelasi dengan elit-elit politik dan cendekiawan-cendekiawan. Pada tataran pengetahuan budaya, etika dan moral konfusianisme menempati nilai tertinggi dalam ilmu pengetahuan yang fokus pada perdamaian. Oleh karena itu, teks minor ini layak mendapat bagian dalam pertarungan-pertarungan wacana pada arena pertarungan sosial budaya, ekonomi, dan politik.

#### **D. Arena Pertarungan Konfusianisme**

Pada bagian ini Konfusianisme dihadapkan pada wacana-wacana dominan seperti kedaulatan. Narasi besar kedaulatan masih mendominasi kehidupan bernegara Cina. Misalnya peningkatan alutsista dan penguatan militer yang ditunjukkan sebelumnya adalah bukti bahwa kuasa teks kedaulatan menjadi pengetahuan Cina. Namun pada kenyataannya upaya-upaya Konfusian dengan menggunakan berbagai kapital dapat menjadi rival teks yang tangguh pada setiap arena pertarungan. Dalam diskusi kali ini, akan diuraikan tiga arena penting dalam pertarungan wacana kedaulatan negara dan Konfusianisme. Dewasa ini, negara bangsa berdaulat versi Westphalia memproduksi pengetahuan

ekonomi politik berbasis neoliberalisme aliran barat. Pemaksaan pengadopsian paham ini terjadi di seluruh belahan dunia. Ia bukan saja mempengaruhi politik negara bangsa, namun lebih menjadi kekuatan hegemoni budaya tentang gaya hidup modern.

Era kontemporer negara tidak berdaya lagi di mana kedaulatan negara menampakan wajah murahnya, lesu, tidak berdaya, lemas, bahkan seakan-akan kurang asupan vitamin. Namun, pada kenyataannya diam-diam bertarung pada target-target hegemoni seperti kultur, intelektual, dan moral. Cina adalah salah satu negara yang berbeda dalam memahami logika neoliberalisme. Negara mengendalikan setiap aspek kehidupan ekonomi rakyatnya atau sistem sentralistik. Karakter seperti ini tingkat hegemoni budaya lebih tinggi dibandingkan negara yang menganut desentralisasi. Lalu, apakah kedaulatan Cina melebur karena adanya budaya Konfusianisme ataukah lebih meningkat?. Pada pembahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa logika negara berdaulat adalah logika “ketakutan” akan keadaan tidak aman. Sehingga memerlukan legitimasi universal yang membenarkan tindakannya (tuhan & setan). Sedangkan logika Konfusianisme adalah logika harmonisasi, di mana tidak membenarkan penggemarnya melakukan tindakan kekerasan

dengan alasan apapun. Hal ini menjadi menarik jika ditelusuri pada arena diskursif budaya dan politik.

Pada arena budaya, dasar filsafat kehidupan Cina didasarkan pada ajaran-ajaran Konfusianisme. Melalui budaya, nilai-nilai moral dan etika Konfusianisme dikenalkan kepada masyarakat. Terdapat skema pemikiran yang melekat secara historis terhadap setiap masyarakat Cina. Kapital budaya ini mendorong kebangkitan Cina dengan nilai harmonis. Konfusianisme melalui pemerintahan Jintao, telah melakukan sukseksi dan subversi, misalnya Kurikulum pengajaran untuk sekolah menengah dimasukan pengajaran klasik Konfusianisme, dan beberapa sekolah eksperimental telah didirikan yang sebagian besar berfokus pada ajaran klasik konfusius. Di luar negeri, pemerintah telah mempromosikan Konfusianisme melalui cabang-cabang Institut Konfusius, pusat bahasa dan budaya Cina bersaing dengan *France's Alliance Française and Germany's Goethe Institute*.<sup>200</sup> Bagi pemerintah, promosi nilai-nilai Konfusianisme memiliki beberapa keunggulan. Di dalam negeri, penegasan harmoni dimaksudkan untuk

---

<sup>200</sup> The New York Times, *China's leaders rediscover Confucianism - Editorials & Commentary - International Herald Tribune* (daring), 14 September 2006, <<https://www.nytimes.com/2006/09/14/opinion/14iht-edbell.2807200.html>>, diakses pada 20 April 2019.

mencerminkan kepedulian partai yang berkuasa terhadap semua kelas. Di luar negeri, seruan untuk perdamaian dan harmoni dimaksudkan untuk melucuti kekhawatiran tentang peningkatan pesat Cina.

Pada arena politik terdapat perjuangan Konfusianisme untuk menjadi landasan pijakan politik luar negeri Cina yang damai dan harmonis. Misalnya dalam pidatonya Zheng Bijian mengemukakan bahwa, “Selama 10 hingga 20 tahun ke depan, atau mungkin bahkan sepanjang paruh pertama abad ke-21, Asia memiliki peluang unik secara historis untuk bangkit secara damai. Kebangkitan damai Cina hanyalah bagian dari kebangkitan damai Asia. Ini tidak hanya berarti bahwa proses modernisasi dan reformasi, dan kebangkitan Cina, secara langsung terkait dengan pengalaman dan perkembangan negara-negara Asia lainnya, lebih dari itu menandakan bahwa Cina sebagai bagian konstituen utama Asia akan memiliki efek yang semakin positif tentang perkembangan, kemakmuran, dan stabilitas negara-negara Asia lainnya, terutama negara-negara tetangga terdekatnya.”<sup>201</sup>

Pidato lanjutannya menguatkan pernyataan terminologi politik luar negeri Cina yaitu *peaceful rise* yang berasal dari nilai harmonis Konfusianisme, bahwa “Pertama dan terutama,

---

<sup>201</sup> Y. Zheng & S. K. Tok, ‘China’s Peaceful Rise’: *Concept and Practice*, China Policy Institute, London, 2005, p.4.

Cina berharap untuk bangkit bukan melalui ekspansi teritorial atau tantangan terhadap kekuatan lain tetapi sebagai hasil dari kerja kerasnya sendiri dan lingkungan internasional yang damai. Tidak seperti kekuatan yang meningkat di masa lalu, yang mengganggu tatanan internasional baik untuk memfasilitasi kebangkitan mereka atau sebagai akibatnya. Cina mencari jalan yang berbeda dan akan berupaya mengintegrasikan dirinya ke dalam tatanan dunia alih-alih menantanginya. Ini menuntut upaya berkelanjutan dari Cina untuk mencari dan mendukung saling ketergantungan, jalur pembangunan yang juga akan mengarahkan Tiongkok untuk mencari hubungan ekonomi dan keamanan yang kooperatif.”<sup>202</sup>

Bukan tidak ada perlawanan wacana, kekosongan moral sedang diisi oleh sekte-sekte Kristen, Falun Gong dan bentuk-bentuk nasionalisme yang ekstrem. Tetapi pemerintah menganggap bahwa alternatif semacam itu mengancam perdamaian dan stabilitas yang dimenangkan dengan susah payah yang menopang pembangunan Cina, sehingga telah mendorong kebangkitan kembali Konfusianisme. Oleh karena itu, pada februari 2015, Hu mengatakan harmonisasi yang

---

<sup>202</sup> Z. Bijian. China's Peaceful Rise: Speeches of Zheng Bijian 1997-2004, <<https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2012/04/20050616bijianlunch.pdf>>, diakses pada 20 April 2019

berasal dari Konfusianisme harus dihargai. Perjuangan pada arena-arena politik pun tambah gencar dilakukan melalui konservasi. Beberapa bulan kemudian, dia memerintahkan kader partai Cina untuk membangun "masyarakat yang harmonis." Mengusung tema Konfusianisme, Hu mengatakan Cina harus mempromosikan nilai-nilai seperti kejujuran dan persatuan, serta menjalin hubungan yang lebih erat antara orang-orang dan pemerintah.

Selain Hu, presiden Cina Xi Jinping melanjutkan memperjuangkan ajaran-ajaran Konfusianisme di institusi-institusi politik melalui pidato-pidato politiknya. Konfusius adalah bagian dari tim reformasi Xi. Selama 2.000 tahun, doktrin Konfusius menetapkan kode etik untuk perilaku yang baik di Cina. Pada tahun 2013, Xi mengeluarkan pernyataan bahwa "*China boasts a long traditional culture, and China will create a new glory of its culture. Confucian thought can play a positive role in China's development today.*"<sup>203</sup> Melalui pernyataan tersebut Xi meyakini Konfusianisme mampu memainkan peranan harmoninya dalam pembangunan Cina yang damai.

---

<sup>203</sup> M. Samaruga, 'The Influence of Confucianism in Chinese Foreign Policy (1971-2013)', *ResearchGate* (daring), December, 2013, <[https://www.researchgate.net/publication/262103770\\_The\\_influence\\_of\\_Confucianism\\_in\\_Chinese\\_Foreign\\_Policy\\_1971-2013](https://www.researchgate.net/publication/262103770_The_influence_of_Confucianism_in_Chinese_Foreign_Policy_1971-2013)>, diakses pada 25 April 2019.



Dia juga menghimbau kepada pejabat pemerintah agar memmanifestasikan nilai-nilai konfusianisme; *“Mr Xi’s point is both good policy and faithful to the Confucian tradition: If government officials expect the common people to “pay homage” to the government, it must be evident that they are trustworthy and are working for the well-being of the community as a whole. In other words, they must manifest the Confucian virtues of righteousness and benevolence.”*<sup>204</sup> Himbauan tersebut didasarkan pada konsep elit Konfusianisme yaitu "Jika massa tidak menyukai seseorang, Anda harus memeriksanya; jika massa menyukai seseorang, anda harus memeriksanya."<sup>205</sup> Dasar kebijakan Xi mengacu pada dua bagian penting yang disampaikan yaitu kebijakan yang baik dari elit-elit pemerintahan dan setia pada nilai-nilai harmoni Konfusianisme.

Dasar kebijakan Xi yang kedua adalah penentangannya terhadap "nilai-nilai Barat", Ia meyakini bahwa Konfusianisme lebih baik dibandingkan nilai-nilai liberal Amerika Serikat. Pernyataan ini dapat dikonfirmasi secara historis melalui pemikiran Jian Qing, yang menyatakan bahwa

---

<sup>204</sup> B.W. V. Norden, ‘The Confucian Roots of Xi Jinping’s Policies,’ *The Straits Time* (daring), Nov, 12, 2017, < <https://www.straitstimes.com/opinion/the-confucian-roots-of-xi-jinpings-policies>>, diakses pada 23 April 2019.

<sup>205</sup> B.W. V. Norden, ‘The Confucian Roots of Xi Jinping’s Policies,’ *The Straits Time* (daring)

*"constitutional Confucianism" is a more appropriate government system for China than Western liberal democracy.* Keuntungan Konfusianisme di arena pertarungan politik karena memiliki kapital yang ikut. Seperti kata Foucault, pengetahuan selalu berelasi dengan kekuasaan, sebaliknya kehidupan kekuasaan ditentukan oleh relasi pengetahuan. Pengetahuan tentang harmoni mendominasi budaya Cina melalui ajaran Konfusianisme, oleh karena paham ini juga membicarakan tentang kehidupan kolektif. Melalui nilai-nilai kolektif Konfusianisme maka kebijakan luar negeri Cina tentang hidup yang damai di bawah satu payung kehidupan manusia yang harmonis. Sejalan dengan Zhaohe Chen menguatkan pernyataan Xi di atas bahwa *The Chinese Cultural Root of the Community of Common Destiny for All Mankind*.<sup>206</sup>

Peran serta elit-elit politik dalam membangun wacana lokal Konfusianisme sebagai dasar politik luar negeri Cina mempengaruhi segala aspek arena pertarungan wacana, sehingga Konfusianisme menjadi pijakan kebijakan luar negeri Cina. Hal tersebut terlihat sejak Hu berkuasa dan mempromosikan *peaceful rise* yang berasal dari nilai harmoni

---

<sup>206</sup> Z. Cheng, 'The Root of Chinese Culture from the Common Fate Community for All Mankind' (daring), December, 2017, <<https://www.atlantis-press.com/proceedings/icelaic-17/25886367>>, diakses pada 24 April 2019.

Konfusianisme, dan berubah teks menjadi *peaceful development* pada 2015, hal ini karena situasi politik internasional melihat kebangkitan Cina sebagai ancaman tatanan global. Selanjutnya prinsip *peaceful development* menjadi landasan kebijakan Xi di dunia, khususnya di Laut Cina Selatan. Sehingga berdampak hegemoni diskursif dari pemerintah untuk menguniversalkan pengetahuan Konfusianisme.

#### **E. Implikasi Teks Konfusianisme di Laut Cina Selatan**

Kawasan Laut Cina Selatan meliputi perairan dan daratan dari gugusan kepulauan dua pulau besar, yakni Spratly dan Paracel, serta bantaran Sungai Macclesfield dan Karang Scarborough yang terbentang luas dari Selat Malaka sampai ke Selat Taiwan. Karena wilayah ini sangat luas dan memiliki sejarah penguasaan yang berganti-ganti, sering terjadi benturan kepentingan di wilayah ini. Dewasa ini, beberapa negara Asia Tenggara – Brunei Darussalam, Filipina, Vietnam, dan Malaysia – terlibat saling klaim dengan Cina dan Taiwan atas sebagian ataupun seluruh kawasan tersebut. Selain itu, Laut Cina Selatan memiliki berbagai kekayaan alam, misalnya cadangan minyak yang sangat banyak. Kekayaan alam di wilayah ini telah menimbulkan konflik multilateral. Kepentingan ekonomi politik memicu klaim

tumpang tindih dan menimbulkan isu keamanan tradisional yang berimplikasi pada kemungkinan perang terbuka antarnegara.

Sengketa terkait kedaulatan teritorial di Laut Cina Selatan sesungguhnya merujuk pada kawasan laut dan daratan di Kepulauan Paracel dan Spratly. Cina mengklaim bahwa kedua kepulauan ini adalah miliknya, sedangkan Vietnam dan Filipina juga mengklaim hal yang serupa. Malaysia hanya mengklaim sebagian dari Spratly berdasarkan ZEE, yang juga diikuti oleh Brunei. Konflik dan ketegangan di kawasan Laut Cina Selatan merupakan sengketa yang menyangkut kedaulatan teritorial negara-negara berdaulat, di mana penyelesaian sengketa dengan jalan diplomasi sejauh ini belum berhasil. Apa yang dikatakan oleh Sir Ernest Satow, “*diplomacy is the application of intelligence and tact to conduct of official relations between the government of independent state, the conduct of business between states by peaceful means,*”<sup>207</sup> tidak berhasil diterapkan di Laut Cina Selatan. Yang muncul di Laut Cina Selatan adalah kegagalan dalam mempraktikkan konsep diplomasi. Yang menarik, alternatif dari diplomasi, yaitu perang, juga tidak terjadi di

---

<sup>207</sup> L.T. Woods, *Asia-Pacific Diplomacy: Non Governmental Organizations and International Relations*, UBC Press, Canada, 1960, p.19.

kawasan. Menurut ahli strategi perang Carl von Clausewitz, “*where war is identified as a political instrument, a continuation of political activity by other means.*”<sup>208</sup> Clausewitz mengajarkan bahwa perang adalah sebuah instrumen politik yang merupakan kelanjutan dari kegiatan politik dengan cara lain. Ketika diplomasi gagal dijalankan atau upaya menempuh jalan damai tidak berhasil, maka perang menjadi jalan terakhir. Dengan kata lain, perang adalah implikasi dari diplomasi yang gagal. Namun demikian, yang disampaikan Clausewitz juga tidak terbukti di Laut Cina Selatan.

Situasi ini menciptakan keunikan di Laut Cina Selatan. Sekalipun terdapat konstelasi konflik dan ketegangan politik yang tinggi, juga kegagalan diplomasi yang memunculkan realita konflik yang berkepanjangan, namun perang terbuka antarnegara tidak terjadi. Yang hadir adalah konflik tanpa perang dalam situasi tegang. Berbagai kepentingan teritorial yang berbenturan di wilayah ini seharusnya bisa mendorong perang besar antarnegara untuk mendapatkan kepentingan-kepentingan nasional. Upaya penyelesaian damai yang gagal telah menimbulkan saling unjuk kekuatan (*show of force*) di wilayah tersebut.

---

<sup>208</sup> C. Von Clausewitz, *On War*, Princenton University Press, New Jersey, 1976, p.87.

Selain itu, juga muncul kompetisi dari negara-negara yang bersengketa untuk memodernisasi angkatan perang dan menambahkan anggaran belanja militer masing-masing. Walaupun upaya-upaya tersebut menghasilkan ketegangan politik dan keamanan, setiap negara tetap melakukannya. Cina memiliki personil militer yang banyak dan peralatan perang yang canggih, serta selalu meningkatkan anggaran militernya dalam beberapa tahun terakhir. Modernisasi angkatan perang negara-negara Asia Tenggara yang terlibat sengketa LCS dengan cara melakukan aliansi pertahanan dengan negara-negara luar kawasan disebut merupakan implikasi kuasa kedaulatan.

Secara faktual, Cina adalah Negara yang mampu bangkit menjadi figur pesaing utama kekuatan-kekuatan dunia dengan peningkatan kemampuan ekonomi dan pertahanan-keamanannya yang sangat fantastis. Kendati demikian, ide "*peaceful rise*" merupakan pijakan dasar yang selalu menjadi doktrin bagi kebangkitan dan perilaku politik luar negeri Cina di dalam kancah perpolitikan global. Preseden ini dibuktikan dalam banyak kasus politik luar negeri Cina yang cenderung *low profile* sambil membawa sebuah ide perdamaian daripada berkonotasi konfrontatif maupun agresif ketika berinteraksi dengan aktor-aktor internasional termasuk terhadap aktor-

aktor internasional yang menjadi rivalnya didalam kancah perpolitikan global.

Pada buku putih yang dikeluarkan pemerintah Cina pada tanggal 22 desember 2005 yang berjudul “*China's Peaceful Development Road*,” dijelaskan secara rinci mengenai terminologi “*peaceful rise*” dalam politik luar negeri Cina yang akan selalu berdasarkan lima basis kunci yaitu, pertama, pembangunan damai adalah cara yang tak terhindarkan untuk modernisasi Cina; kedua, mempromosikan perdamaian dunia dan pembangunan dengan pertumbuhan Cina sendiri; ketiga, pengembangan dengan mengandalkan kekuatannya sendiri; keempat, reformasi dan inovasi: mencari keuntungan bersama dan pembangunan bersama dengan negara lain; dan kelima, membangun dunia yang harmonis dari perdamaian berkelanjutan dan kemakmuran bersama.<sup>209</sup>Konsep *peaceful development* yang berasal dari nilai harmoni Konfusianisme menunjukkan sikap yang lebih fleksibel dan berpeluang besar tampil sebagai kuasa teks penyeimbang hasrat kedaulatan territorial di LCS. Implikasi *peaceful development* dapat dikonfirmasi melalui kebijakan luar negeri Cina yang aktif dalam pengembangan regionalisme ekonomi dan keamanan di

---

<sup>209</sup> State Council Information Office of China, *White Paper: China's Peaceful Development Road* (daring), <<http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/APCITY/UNPAN023152.pdf>>, diakses pada 24 April 2019.

LCS. Misalnya kerangka multilateral *ASEAN Plus Three* (APT).

Dalam mengevaluasi kerja sama 10 tahun pertama dan menyongsong kerja sama 10 tahun berikutnya, para pemimpin pemerintahan APT telah mengesahkan pernyataan kedua tentang kerja sama dan rencana kerja tahun 2007-2017 pada KTT ke-11 di Singapura tahun 2007. Terdapat lima bidang kerja sama di dalam pernyataan kedua ini, yaitu politik dan keamanan; ekonomi dan keuangan; energi, pembangunan, lingkungan hidup, perubahan iklim, dan pembangunan yang berkesinambungan; sosial-budaya dan pembangunan; serta dukungan institusional dan hubungan kerangka kerja sama yang lebih luas. Dalam pernyataan kedua ini juga disepakati pembentukan *ASEAN Plus Three Cooperation Fund* (APTCF) dengan kerangka acuan dana awal \$3 juta, dengan proporsi 9:1, yaitu Cina, Jepang dan Korea Selatan sebesar \$2,7 juta dan ASEAN secara keseluruhan sebesar \$300 ribu.<sup>210</sup> Kerja sama APT juga telah berhasil membentuk *Chiang Mai Initiative* (CMI), yang antara lain berisikan skema bilateral Pengaturan Penukaran (PP) antara negara-negara APT guna membantu likuiditas keuangan di kawasan sehingga krisis

---

<sup>210</sup> ASEAN Plus Three, 'Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (daring).



keuangan di kawasan dapat dihindari. Secara politis, CMI merupakan keberhasilan yang nyata dari kerja sama APT.

Pada pertemuan menteri keuangan APT di Phuket, Thailand, tanggal 22 Februari 2009, disepakati beberapa hal, termasuk (1) penetapan jumlah dana *Chiang Mai Initiative Multilateralisation* (CMIM) dari \$80 milyar menjadi \$120 milyar dengan rasio kontribusi APT adalah 20:80; (2) *Regional Surveillance Unit* yang independen akan dibentuk; (3) Setelah berfungsinya mekanisme RSU, jumlah pinjaman yang dapat ditarik tanpa keterlibatan IMF (*International Monetary Fund*) dalam CMIM dapat ditingkatkan di atas batas yang berlaku sekarang sebesar 20%. Kemudian, pada KTT ke-12 APT di Thailand pada tahun 2009 telah dibahas isu krisis keuangan global, pangan dan keamanan energi, meninjau dua dokumen pernyataan kerja sama ketahanan pangan, serta pengembangan bioenergi dan pernyataan pers bersama. Selain itu, para menteri keuangan APT mengadakan pertemuan ke-13 di Tashkent, Uzbekistan, pada tanggal 2 Mei 2010 mengumumkan bahwa CMIM sudah diberlakukan sejak tanggal 24 Maret 2010, dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa seluruh elemen kunci untuk unit pengawasan mikro-ekonomi kawasan berpusat di Singapura. Pada pertemuan di Chiang Mai, Thailand, tanggal 2-4 November 2009 sudah disampaikan draf usulan Thailand sebagai pemimpin program

perencanaan pendidikan APT tahun 2010-2017. APT juga dikembangkan pada upaya penyusunan rencana utama konektivitas.<sup>211</sup>

Konsep *peaceful development* telah membawa Cina pada investasi ekonomi di Asia Tenggara dalam kerangka APT. Peranan Cina sangatlah besar di APT, sedangkan negara-negara Asia Tenggara telah membuka pintu seluas-luasnya bagi Cina untuk melakukan investasi ekonomi. Seperti terlihat pada pertemuan-pertemuan APT, dapat diasumsikan bahwa sistem intrusif yang dijalankan Cina di Asia Tenggara mengalami kemajuan yang signifikan. APT telah membuka peluang Cina untuk menanamkan investasi ekonomi di sepuluh negara Asia Tenggara.

Pada beberapa kasus perilaku politik luar negeri Cina yang berkaitan dengan organisasi-organisasi internasional dan regional seperti WTO sebagai organisasi dagang dunia hasil produksi Negara-negara barat, semenjak tahun 2001, Cina secara resmi mulai mengakui dan menjadi anggota WTO hingga berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2002.<sup>212</sup> Kemudian, Cina juga mulai bergabung aktif dalam organisasi-

---

<sup>211</sup> 'ASEAN Plus Three,' *Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia* (daring).

<sup>212</sup> J. Yue, *Peaceful Rise of China: Myth or Reality?*, Journal Palgrave Macmillan, London, 2008, p.439.

organisasi regional semisal, G-20, OPEC maupun *Asia-Pacific Economic Cooperation* (APEC).<sup>213</sup> Begitu pula pada organisasi regional ASEAN, Cina dengan damai dan memahami sensitifitas negara-negara Asia Tenggara melalui upaya-upaya pendekatan dialog kemitraan seperti *Treaty of Amity and Cooperaton* (TAC), *ASEAN regional forum* (ARF) sampai *penandatanganan Declaration on The Conduct of Parties in the South Cina Sea* sehingga menumbuhkan kepercayaan Negara-negara ASEAN terhadap Cina terkait sengketa di Laut Cina Selatan.<sup>214</sup> Langkah ini kemudian diikuti dengan penandatanganan usaha perdagangan bebas antara Cina dan ASEAN dalam kerangka ASEAN-Cina *Free Trade Area* (ACFTA) dengan nilai transaksi mencapai angka 200 milyar dollar.<sup>215</sup>

ACFTA mempunyai empat tujuan penting: memperkuat dan meningkatkan kerjasama ekonomi, perdagangan, dan investasi antara negara-negara anggota; meliberalisasi secara progresif dan meningkatkan perdagangan barang dan jasa serta menciptakan suatu sistem yang transparan untuk mempermudah investasi; menggali bidang-bidang kerjasama

---

<sup>213</sup> S. Hadi, 'Indonesia, ASEAN, and the Rise of China: Indonesia in the Midst of East Asia's Dynamics in the Post-Global Crisis World,' *International Journal of China Studies*, vol. 3, no. 2, p.151.

<sup>214</sup> Hadi, p.158-159.

<sup>215</sup> Hadi, p.152

yang baru dan mengembangkan kebijakan yang tepat dalam rangka kerjasama ekonomi antara negara-negara anggota; memfasilitasi integrasi ekonomi yang lebih efektif dari anggota-anggota terbaru ASEAN – Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam – dan menjembatani kesenjangan pembangunan ekonomi di antara negara-negara anggota.<sup>216</sup>

Selain itu, kebijakan luar negeri yang didasarkan kepada nilai Konfusianisme termanifestasikan pada kebijakan *Belt on Road Initiative* (BRI). Di mana Xi merumuskan strategi pembangunan yang berfokus pada konektivitas dan kerja sama negara-negara Eurasia, sabuk perdagangan jalur sutra yang terdiri dari jalur sutra daratan dan jalur sutra maritim. Mengutip Asif dan Yang Bo Ling dalam penelitian mereka yang berjudul *Belt and Road Initiative: A Spirit of Chinese Cultural Thought*. Penelitian mereka menunjukkan bahwa pijakan model pembangunan BRI adalah berasal dari nilai-nilai Konfusianisme:<sup>217</sup>

*“The “harmony” is a harmonious relationship between a self and its object. This relationship could be spread through the aspect of harmonious coexistence among the people of*

---

<sup>216</sup> ASEAN- China Free Trade Area, 'Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (daring), <<http://ditjenkpi.kemendag.go.id/Umum/Regional/Win/ASEAN%20-%20China%20FTA.pdf>>, diakses pada 26 Maret 2019.

<sup>217</sup> M. Asif & Y.B.Ling, 'Belt and Road Initiative: A Spirit of Chinese Cultural Thought,' *International Journal of Business and Management*, Vol. 13 no. 12, 2018, p.9.

*BRI nations and their social environment.” Belt and Road Initiative is a mega project that announced by Chinese President Xi, which connect will play a vital role among all countries and enhanced trade and economic cooperation in the region. Through BRI will boost people-to-people contact and infrastructure being more improve in the whole region, and 69 countries have become the part of BRI projects. Therefore, understanding between various countries will create peace and harmony as a result trade will growth automatically. It will bring prosperity and remove poverty in other words BRI spreading a message of “Peace, Harmony and Prosperity”*

Mengacu pada temuan tersebut, diargumentasikan BRI berdasar pada nilai-nilai Konfusianisme yang dirumuskan dalam model pembangunan damai yang menyatukan jalur sutra daratan maupun jalur sutra maritim. Hal ini menjadikan Laut Cina Selatan sebagai jalur BRI atau jalur pembangunan damai. Kerja sama yang dilakukan melalui BRI diyakini mampu mengimplementasikan model pembangunan ekonomi Konfusianisme yaitu ekonomi “keluarga.” Di mana setiap negara yang tergabung dalam BRI dianggap sebagai “keluarga Cina.” Hal ini akan memberikan dampak kesejahteraan dan kemakmuran. Dengan argumen lain bahwa payung pembangunan BRI yang merupakan semangat Konfusianisme akan memberikan rasa aman bagi negara-negara tergabung.

Hal tersebut dikonfirmasi kembali oleh prof. Mahesh Ranjan Debata pada diskusi *the 1<sup>st</sup> international conference on Asia Pacific 2019* bahwa: *The objective of BRI include enhancing policy coordination across the Asian Continent, trade liberalization, financial integration, and connectivity through typical Chinese soft power strategy of people to people contact.*<sup>218</sup> Ia mengatakan bahwa BRI adalah diskursus China dengan tujuan setiap jalur perdagangan BRI dapat akan memiliki dampak kemakmuran yang sama. Dalam diskusi tersebut ia juga menambahkan bahwa:

*This Chinese initiative (Belt and Road) can open up new frontiers of cooperation, development and growth besides boosting regional cooperation. It will link different regions in Eurasia, enable the convergence of their different interest for complementary advantages, and sharing of development opportunities to achive common goal. And at large, it will help achieving peace, progress and prosperity aof the entire region, creating a win-win situation.*

Interviu pribadi terhadap Prof, Debata dilakukan setelah selesai menyampaikan hasil penelitiannya. Kali ini fokus pertanyaannya adalah apakah diskursus China tentang BRI

---

<sup>218</sup> Prof. M.R. Debata, *Belt and Road Initiative and the Indo-Pacific*, Proceeding The 1<sup>st</sup> International Conference on Asia Pacific: Ethnology and Anthropology, Kunming, China, 2019, p.176.

adalah manifestasi dari diskursus lokal yang menjunjung nilai harmoni?, Dia membenarkan bahwa liberalisme Cina bukanlah diskursus liberalisme barat, namun BRI merupakan manifestasi dari diskursus Konfusianisme. Dia melanjutkan bahwa sekalipun Konfusianisme telah mendominasi arena politik luar negeri Cina, namun masih terdapat diskursus lain yang akan menjadi saingannya.<sup>219</sup> Mengenai diskursus lain tidak akan dibahas pada paper ini, akan didiskusikan pada bagian lain. Dampak Konfusianisme yang diimplementasikan melalui BRI yang melewati jalur perdagangan internasional di Laut Cina Selatan memberikan dampak perdamaian karena memiliki nilai-nilai harmoni dan kemakmuran bersama. Sabuk perdagangan ini berkembang di Malaysia era Mahathir Mohamad, dalam pidatonya pada 20 Agustus 2018, ia meminta Cina membantu Malaysia karena keduanya memiliki perjanjian untuk mendorong dan mempromosikan hubungan bilateral. Mengutip pidatonya yang diberitakan oleh *The Straits Times*:<sup>220</sup>

---

<sup>219</sup> Prof. M.R. Debata, *International conference on Asia Pacific: Ethnology and Anthropology*, Kunming, China, Interview, 21 Mei 2019.

<sup>220</sup> D. Cheong, 'Mahathir calls on China to help Malaysia with its 'internal fiscal problems,' *The Straits Times* (daring), <<https://www.straitstimes.com/asia/east-asia/chinas-premier-li-keqiang-says-willing-to-push-bilateral-ties-with-malaysia>>, diakses pada 22 Juni 2019.

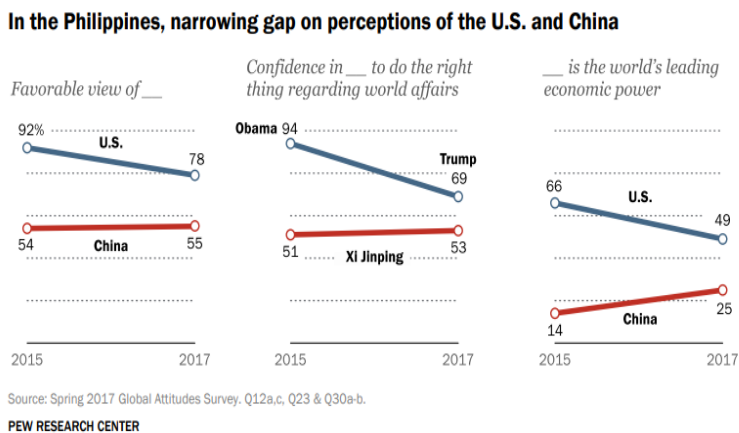
*"We hope also to get China to understand the problems being faced by Malaysia today. I believe that China will look sympathetically towards a problem that we have to resolve, and perhaps help us in resolving some of our internal fiscal problems," said Dr Mahathir, who has pushed for a review of two major Chinese infrastructure projects in Malaysia citing their costs and viability.*

Setelah berpidato, ia menyatakan bahwa Malaysia akan tetap terbuka untuk berpartisipasi dalam BRI karena Cina menganggap Malaysia sebagai negara mitra di jalur perdagangan tersebut. Pernyataan ini didukung hasil interviu pada saat paper ini disampaikan dalam diskusi *the 1<sup>st</sup> international conference on Asia Pacific* 21 Mei 2019. Interviutujuan kepada Paul D'Arcy, *Associate Professor, Department of Pacific Affairs, Australian National University* yang adalah *keynote speaker* pada konferensi tersebut. Menurut anda apakah BRI berdampak pada Malaysia terkait konflik Laut Cina Selatan? Apakah berdampak pada perdamaian di Laut Cina Selatan?. Dalam diskusi tersebut dia berargumen bahwa "paper anda sejalan dengan pembangunan damai Cina yang berakar pada Konfusianisme. Lanjutnya, manifestasi Konfusianisme pada BRI telah mendorong Malaysia dan Filipina mengarahkan kebijakannya pada Cina. Hal ini karena Cina bangkit menjadi kekuatan ekonomi dengan model yang berbeda dengan model pembangunan



liberalisme barat. Dengan adanya Malaysia dan Filipina yang menjadi Mitra Cina maka berdampak pada tidak terjadi perang dalam konflik Laut Cina Selatan.”<sup>221</sup>

Dampak lain terlihat pada kebijakan Filipina di era Duterte yaitu “*pivot to China*.” Kebijakan pembangunan damai oleh Cina mempengaruhi kebijakan luar negeri Filipina yaitu adanya pergeseran kebijakan yang secara historis mengarah pada Amerika Serikat, namun di era Duterte mengarah ke Cina. Persepsi Cina terhadap Cina semakin bersahabat di bawah politik luar negeri Duterte (lihat gambar 8).



Gambar 8. Persepsi Filipina terhadap Amerika Serikat dan Cina

<sup>221</sup> P. D’Arcy, *International conference on Asia Pacific: Ethnology and Anthropology*, Kunming, China, Interview, 21 Mei 2019.

Data di atas memperlihatkan bahwa Konfusianisme yang termanifestasikan dalam pembangunan damai berdampak pada pemerintahan Duterte di Filipina, sehingga mengurangi hasrat negara dengan konsep kedaulatan untuk memikirkan nafsu territorial di Laut Cina Selatan. Hal tersebut berbeda dengan Pemerintahan Filipina sebelumnya dipimpin oleh Presiden Benigno Simeon Aquino III pada 2011-2016 dengan model kebijakan penyeimbangan (*balancing*) terhadap Cina. Di mana Filipina mendorong kerja sama keamanan yang lebih dekat dengan AS.

Mengutip *Foreign Policy Community Indonesia* (FPC) bahwa: Kebijakan presiden Aquino menentang Cina karena perilaku agresif di Laut Cina Selatan. Presiden Aquino memerintahkan Angkatan Bersenjata Filipina untuk berfokus pada mempertahankan teritori, memperdalam kerja sama keamanan Filipina-AS, membeli alutsista dari AS dan meminta jaminan keamanan sepenuhnya dari AS berdasarkan Mutual Defense Treaty atau MDT 1951. Implikasi paling signifikan dari kebijakan luar negeri itu adalah lahirnya Enhanced Defense Cooperation Agreement (EDCA) yang menyediakan jaminan keamanan strategis bagi Filipina.

Persetujuan tersebut juga dibuat untuk mencegah ekspansi militer Cina di Laut Cina Selatan.<sup>222</sup>

Hasrat Filipina sebelum pemerintahan Duterte dapat dilihat pada sistem instrusif Amerika Serikat di Filipina. Amerika Serikat menempatkan pasukan militernya di Filipina untuk memperkuat angkatan perang Filipina. Melalui *The Military Bases Agreement*, kedua negara bersepakat untuk menghadirkan intervensi militer AS di kawasan, khususnya Filipina, secara legal. Kehadiran militer AS di Filipina telah mempengaruhi perilaku-perilaku negara lain yang terlibat dalam sengketa Laut Cina Selatan. Latihan bersama antara AS dan Filipina di wilayah Laut Cina Selatan merupakan pertunjukan kekuatan militer sekaligus deterrence bagi pengklaim-pengklaim lainnya.<sup>223</sup> Filipina dan AS mengadakan latihan bersama di sebuah pangkalan angkatan laut Filipina yang menghadap di Laut Cina Selatan pada tahun 2013 melibatkan sekitar 2.300 marinir dari kedua negara.

---

<sup>222</sup> 'Perubahan Kebijakan Filipina dalam Konflik Laut Cina Selatan melalui Konsep Realpolitik,' *Foreign Policy Community Indonesia* (daring), Aug, 30, 2018, <<https://medium.com/over-the-world/perubahan-kebijakan-filipina-dalam-konflik-laut-cina-selatan-melalui-konsep-realpolitik-346f3b4c939b>>, diakses pada 20 Juli 2019.

<sup>223</sup> 'Filipina-AS Tandatangani Kesepakatan Pertahanan,' *Sumber.AntaraNews.Com* (daring), 28 April 2014, <<http://www.antarasumber.com/berita/95465/filipina-as-tandatangani-kesepakatan-pertahanan.html>>, diakses pada 20 Maret 2019.

Kehadiran militer AS di Filipina ini akan dilakukan secara rutin,<sup>224</sup> termasuk program tahunan *Cooperation Afloat Readiness and Training* (CARAT) yang melibatkan hampir seribu tentara kedua negara. Untuk mengimbangi kekuatan Cina dan Vietnam yang memiliki kekuatan militer lebih besar dibandingkan Filipina, AS hadir sebagai negara berkekuatan besar dalam kerangka kerja sama bilateral dengan Filipina. Sistem intrusif yang dijalankan Amerika Serikat di Filipina berdampak pada keseimbangan kekuatan di Laut Cina Selatan.

Hasrat kedaulatan teritorial yang diperjuangkan Filipina di Laut Cina Selatan mengurang di era pemerintahan Duterte. Dalam pidatonya di Cebu, Filipina tanggal 19 Mei 2018. Duterte mengakui bahwa “kekuatan militer Cina lebih tangguh dibandingkan Filipina dan jika terjadi perang terbuka maka Filipina akan kalah telak, serta Amerika Serikat tidak mungkin berpihak lagi terhadap Filipina. Oleh karena itu, ia menawarkan sebuah solusi eksplorasi bersama atau *joint exploration pact* antara Cina dan Filipina dalam mengelolah

---

<sup>224</sup> AS & Filipina gelar latihan perang di dekat Laut Cina Selatan, ' *SindoNews.com* (daring), 19 September 2013, <<http://international.sindonews.com/read/784850/40/as-filipina-gelar-latihan-perang-di-dekat-laut-cina-selatan-1379536628>>, diakses pada 20 Juli 2019.

sumber daya alam di Laut Cina Selatan.”<sup>225</sup> Pernyataan Duterte di atas dapat dikonfirmasi melalui wawancara pribadi kepada prof. Mathews Gordon, dia mengakui bahwa “populisme Duterte telah berimplikasi pada keharmonisan Filipina dan Cina di Laut Cina Selatan.”<sup>226</sup> Hal ini membawa Filipina pada payung Konfusianisme Cina yaitu hubungan keluarga yang makmur dan harmoni.

Pandangan realisme klasik yang mengatakan bahwa politik internasional merupakan sesuatu yang sama dengan politik lainnya yaitu perebutan kekuasaan. Hal tersebut berdampak pada perebutan teritorial di Laut Cina Selatan. Kuasa diskursus Confusianisme telah memberikan dampak pada politik internasional di Laut Cina Selatan yang berbeda. Di mana hasrat negara masih tetap ada dalam logika “ketakutan” akan keamanan, namun dapat dileburkan dengan memandang bahwa politik adalah aktivitas keluarga pada sebuah rumah. Dengan demikian perang tidak relevan lagi dalam keluarga. Hal ini dipertegas dalam wawancara yang dilakukan saat *the 1<sup>st</sup> international conference on Asia Pacific* di Yunnan University, Kunming, Cina, kepada ahli

---

<sup>225</sup> ‘Perubahan Kebijakan Filipina dalam Konflik Laut Cina Selatan melalui Konsep Realpolitik,’ *Foreign Policy Community Indonesia* (daring)

<sup>226</sup> Prof. M. Gordon, *International conference on Asia Pacific: Ethnology and Anthropology*, Kunming, China, Interview, 21 Mei 2019.

antropologi Cina, prof. MA Teng Yueh bahwa “nilai-nilai Konfusianisme sudah melekat dan menjadi dasar setiap aspek sosial, budaya, ekonomi, kemananan, lingkungan, maupun politik. Sehingga politik internasional Cina di Laut Cina Selatan dipenuhi kebijakan harmoni.”<sup>227</sup>

Melalui kebijakan luar negeri *peaceful development*, Hu dan Xi telah mengimplementasikan kebijakan harmoni Konfusianisme di LCS. Diskursus Konfusianisme yang terskemakan dalam pemikiran masyarakat Cina yang menyejarah diangkat sebagai kerangka berpikir elit-elit politik dalam melakukan hubungan internasional, lebih spesifik adalah hubungan antartekstual harmoni. Terbukti relasi kuasa dan teks Konfusianisme mampu memenangkan pertarungan wacana dalam arena ekonomi, budaya, dan politik. Ia berbekal kapital elitis tangguh yaitu Hu dan Xi. Konfusianisme menjadi sebuah gerakan sosial bersama untuk mencapai perdamaian dengan semua orang. Pada konteks politik luar negeri, kuasa teks Konfusianisme diimplementasikan melalui kebijakan *peaceful development*. Hal inilah yang menyebabkan politik luar negeri Cina di LCS lebih fleksibel dan kooperatif melalui kerangka perdamaian multilateral maupun bilateral.

---

<sup>227</sup> Prof. MA, *International conference on Asia Pacific: Ethnology and Anthropology*, Kunming, China, Interview, 21 Mei 2019.

Ini bukanlah kemenangan mutlak Konfusianisme. Ia selalu berhadap-hadapan dengan logika kedaulatan negara di LCS. Cina sendiri, sekalipun mengklaim LCS dari aspek histori, namun implikasi diskursus kedaulatan territorial di LCS masih terjadi. Oleh karena itu, diskursus Konfusianisme harus menjadi kuasa teks penyeimbang yang selalu hadir pada arena-arena pertarungan wacana. Konfusianisme hanya dapat bertahan jika ada aliansi kelas yang terhegemoni untuk mempertahankan diskursus Konfusianisme. Meminjam Laclau dan Mouffe, “hubungan hegemonik sendiri memang hanya bisa dibangun ketika perbedaan-perbedaan menyatu.”

**[Halaman Ini Sengaja Dikosongkan]**



## **BAB VII**

### **KESIMPULAN**

Asia Tenggara merupakan kawasan yang memiliki potensi konflik di masa kini maupun akan datang. Konflik perbatasan seringkali mewarnai dinamika hubungan antarnegara di kawasan ini. Konflik terjadi akibat ketidaksesuaian pandangan satu negara dengan negara lain mengenai suatu wilayah atau hak-hak yang diperoleh di sekitar wilayah negara lain. Hampir seluruh negara dalam kawasan ini memiliki konflik yang serupa, yakni konflik teritorial. Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, dan Vietnam dihadapkan pada banyak ketegangan berkaitan dengan klaim wilayah di Laut Cina Selatan. Indonesia dan Malaysia pernah berkonflik mengenai kepulauan Sipadan dan Ligitan, yang akhirnya dimenangkan oleh Malaysia dalam penyelesaian multilateral. Demikian pula, saling klaim kedua negara pada segmen Ambalat, yang diyakini Indonesia sebagai wilayahnya, telah memunculkan ketegangan antara kedua negara. Hal yang serupa juga terjadi pada Singapura dan Malaysia, Malaysia dan Filipina, Thailand dan Kamboja, serta beberapa konflik perbatasan lainnya.

Menguatnya konflik dan ketegangan di Asia Tenggara membuktikan bahwa isu keamanan tradisional masih

menduduki urutan penting dalam permasalahan global kontemporer. Konflik dan ketegangan di Asia Tenggara merupakan persoalan yang sukar diselesaikan. Pada situasi tersebut pertunjukan kekuatan militer dan modernisasi alat perang menjadi pilihan negara-negara kawasan. Namun, terdapat juga negara-negara yang juga tidak melakukan peningkatan anggaran pertahanan dan modernisasi alutsista. Perjalanan panjang mengenai dinamika stabilitas keamanan di kawasan Asia Tenggara tidak dapat dikatakan berada pada level aman dan damai sepenuhnya. Konstelasi hubungan politik antarnegara di kawasan Asia Tenggara sangat erat kaitannya dengan berbagai ketegangan dengan tingkat determinasi yang tinggi.

Konflik dan ketegangan di Asia Tenggara pada level tertentu sangat berbahaya, terkesan sensitif, dan dapat menjadi pemicu utama bagi perang terbuka. Namun, konflik dan ketegangan tersebut tidak menimbulkan perang antarnegara, melainkan menghadirkan keamanan di kawasan. Tidak ada sekali pun benturan kekerasan secara besar-besaran oleh militer antarnegara terjadi secara faktual. Asia Tenggara dapat diargumentasikan sebagai suatu kawasan yang sarat akan nilai-nilai keamanan. Sekalipun ia tidak dapat dikatakan sebagai seratus persen aman, tetapi dalam beberapa dekade ini

Asia Tenggara merupakan salah satu kawasan yang cenderung bebas perang.

Penulis meyakini bahwa anomali keamanan Asia Tenggara ini merupakan implikasi dari sistem intrusif negara kuat luar kawasan yang terlibat di kawasan. Negara-negara yang terlibat dalam politik internasional kawasan adalah Amerika Serikat, Cina, dan Australia. Ketiga negara tersebut telah menciptakan keseimbangan kekuatan negara-negara kawasan. Dinamika keamanan ini merupakan sesuatu yang unik, di mana pertunjukan kekuatan, peningkatan anggaran pertahanan, dan modernisasi alutsista perang – sebagai dampak dari kekuatan intrusif – memberikan kestabilan keamanan kepada kawasan.

Di antara negara-negara Asia Tenggara, hanya Singapura, Filipina, dan Thailand yang menunjukkan kedekatan dalam hal pertahanan dengan Amerika Serikat. Hubungan Amerika Serikat dengan Filipina, yang sempat melemah hingga penarikan militer Amerika Serikat dari Filipina, telah mengalami penguatan sejak 1990-an. Kini kedua negara telah memiliki kerja sama pertahanan yang menghadirkan militer Amerika Serikat di Filipina. Selain itu, sejak tahun 1990-an, kerja sama bilateral paling intensif dilakukan oleh Amerika Serikat dan Singapura, yang menyediakan pangkalan dan transportasi bagi militer Amerika

Serikat di kawasan. Amerika Serikat juga melakukan latihan militer bersama secara rutin dengan Thailand. Sementara itu, Indonesia dan Malaysia, dua negara dengan penduduk mayoritas Muslim, tidak terlalu dekat dengan Amerika Serikat, mengingat pemerintah kedua negara sangat membutuhkan dukungan pemilih Muslim untuk kebijakan domestik maupun internasional mereka. Meski demikian, Malaysia dan Indonesia terlibat dalam perjanjian MSSSI – yang juga melibatkan Amerika Serikat – untuk mengamankan Selat Malaka. Malaysia juga menjadi anggota pakta militer dengan salah satu sekutu Amerika Serikat, yaitu Australia, dalam kerangka FPDA. Indonesia sendiri sekarang sedang menjalin hubungan dengan Cina dalam hal perdagangan alutsista.

Cina terus melakukan pendekatan dengan ASEAN dan beberapa negara Asia Tenggara, seperti penandatanganan *treaty of amity and cooperation* dalam kerangka *ASEAN Plus Three*, aktif mendukung ARF yang melibatkan pejabat-pejabat senior pertahanan Beijing, dan menyepakati *ASEAN-China Strategic Partnership for Peace and Security* pada tahun 2003. Selain itu, Cina juga menjalin hubungan ekonomi dan kerja sama militer dengan Kamboja, Laos, dan Myanmar. Langkah Cina ini telah mengubah paradigma negara-negara Asia Tenggara terhadap kebangkitan Cina secara ekonomi maupun militer.

Kemajuan Cina di ASEAN sudah tentu tidak lepas dari perhatian sekutu AS, yaitu Australia. Australia bukan anggota ASEAN yang memanfaatkan hubungan keamanan di Asia Tenggara dengan berkembangnya isu keamanan di kawasan. Sebagaimana yang dilakukan Amerika Serikat, Australia juga tidak menjalin hubungan militer ke semua negara kawasan Asia Tenggara. Dalam pandangan Australia, meningkatkan kerja sama tradisional FPDA adalah hal yang penting untuk merespon konflik di kawasan Asia Tenggara.

Implikasi yang ditimbulkan sistem intrusif pada keamanan kawasan Asia Tenggara terdiri dari tiga hal penting: level kekuatan (kekuatan militer dan ekonomi), kohesi (politik, ekonomi dan organisasi), dan struktur hubungan. Semua hal tersebut menciptakan dinamika keamanan yang positif (stabilitas), sehingga negara-negara di Asia Tenggara, sekalipun memiliki sejarah kelim konfrontasi, konflik perbatasan dan benturan kepentingan, namun dapat menjalin hubungan internasional intra-kawasan dengan aman. Sistem intrusif ini memberikan kontribusi bagi ASEAN dalam menata keamanan di kawasan. Kekuatan intrusif menghadirkan realita keamanan yang mengikat setiap anggota ASEAN lewat pengaturan pakta keamanan multilateral atau bilateral, intervensi militer secara legal berdasarkan perjanjian internasional, dan investasi ekonomi.

Kekuatan intrusif Amerika Serikat di Singapura berdampak pada level kekuatan militer dan ekonomi yang dimiliki Singapura. Hal ini telah menimbulkan *deterrence* pada negara-negara lain di kawasan. Sedangkan Malaysia terikat dalam pakta militer FPDA yang melibatkan Australia, sehingga mempengaruhi perilaku Indonesia dan negara tetangga lainnya untuk bersikap terhadap Malaysia. Kekuatan intrusif Amerika Serikat di Filipina juga mempengaruhi keamanan di Laut Cina Selatan. Dalam semua bentuk sistem intrusif ini, yang terjadi adalah pertunjukan kekuatan militer, latihan militer bersama, transfer teknologi perang, dan investasi ekonomi – yang diyakini mampu meredam perang terbuka.

Penempatan militer Amerika Serikat di Singapura dan Filipina dalam kerangka hukum internasional bertujuan untuk mengimbangi kekuatan Cina di Asia Tenggara. Sebaliknya, penempatan militer Cina di Laut Cina Selatan dan investasi ekonomi di kawasan telah mengimbangi kekuatan Amerika Serikat. Di samping itu, Cina juga telah memperkuat struktur hubungan dengan tiga negara Asia Tenggara Daratan, yakni Laos, Kamboja, dan Myanmar. Hubungan dengan Cina menjadikan ketiga negara itu dapat mempertahankan eksistensi kedaulatannya dan menghindari ancaman dari pihak lain, sekalipun tidak berdampak pada level kekuatan militer.

Pada tataran yang lain, kekuatan intrusif di kawasan berdampak pada kohesi yang dapat dilihat dari pengaturan MSSSI di Selat Malaka antara negara pengguna (khususnya Amerika Serikat, Cina, dan Australia) dengan negara pantai (Indonesia, Malaysia, dan Singapura). Kohesi di Selat Malaka dapat diargumentasikan sebagai “hampir sempurna,” karena meliputi kohesi sosial, ekonomi, politik, dan organisasi. Kohesi sosial adalah bantuan teknis dalam bentuk pelatihan militer-militer negara pantai oleh negara-negara pengguna. Kohesi ekonomi merupakan keserasian dalam meningkatkan keuntungan material, sedangkan kohesi politik menyangkut upaya mempertemukan kepentingan politik di Selat Malaka, seperti batas teritorial dan keamanan maritim. Selain itu, MSSSI memiliki kohesi organisasi yang tinggi karena tidak memberikan peluang untuk intervensi (militer) secara langsung dari pihak pengguna di Selat Malaka. Sekalipun lebih mengatur hal-hal menyangkut keamanan non-tradisional, MSSSI telah memberikan implikasi pada keamanan tradisional. Hal ini terlihat pada peningkatan kerja sama antara Indonesia, Malaysia, dan Singapura di Selat Malaka.

Level kekuatan, kohesi dan struktur hubungan dari sistem intrusif ini harus tetap dijaga eksistensinya agar tidak ada upaya memenangkan persaingan kekuatan dengan motivasi level kekuatan lain, misalnya ideologi. Pemaksaan

level kekuatan yang bercirikan ideologi akan berdampak pada dua hal, yaitu kooperasi (positif) dan konflik besar (negatif). Kekuatan intrusif dengan ideologi tertentu biasanya memaksa negara lain untuk menerima ideologinya. Negara yang menerima pemaksaan itu akan kooperatif, sedangkan yang menolak akan membuka peluang untuk perang. Penelitian ini menemukan bahwa tidak terdapat upaya kekuatan intrusif untuk memaksa negara lain menerima ideologinya. Keterlibatan politik, ekonomi, dan militer Amerika Serikat, Cina, dan Australia di kawasan tidak memberikan dampak pemaksaan pada level kekuatan ideologi. Oleh sebab itu, penulis dengan yakin berargumen bahwa sistem intrusif di Asia Tenggara telah berdampak positif (stabilitas).

Sistem intrusif yang dijalankan Amerika Serikat, Cina, dan Australia adalah instrumen politik dalam kerangka hukum internasional. Hukum internasional merupakan aturan yang mengatur hubungan antarnegara kawasan dan kekuatan intrusif baik secara bilateral, trilateral maupun multilateral. Dalam pandangan realisme, hukum internasional merupakan instrumen politik yang digunakan oleh pemerintahan suatu negara untuk mencapai tujuan nasionalnya. Dapat diargumentasikan di sini bahwa kekuatan intrusif di Asia Tenggara tidak hanya sebatas kerja sama, namun merupakan



instrumen politik untuk mencapai keseimbangan kekuatan di Asia Tenggara.

Sekalipun memberikan dampak positif (stabilitas) di kawasan, tetapi sistem intrusif memiliki kelemahan yang harus diwaspadai oleh negara-negara Asia Tenggara. Kelemahan tersebut adalah bahwa sistem intrusif tidak mampu memprediksi sampai kapan keamanan bebas perang ini terjadi. Selain itu, yang juga harus diwaspadai adalah bahwa sistem intrusif ini dapat juga memberikan dampak negatif (instabilitas), berupa terbukanya potensi perang besar antarnegara intra-kawasan maupun antarnegara kekuatan intrusif. Kecenderungan tersebut bisa saja terjadi karena struktur hubungan yang rusak dan pertarungan kekuatan ideologi. Oleh sebab itu, pendekatan intrusif tidak dapat berdiri sendiri. Ia juga harus memperhatikan pendekatan keamanan lain, seperti kerangka keamanan dalam lingkup ASEAN, agar dapat menghadirkan keamanan dan perdamaian sepenuhnya.

Sistem intrusif bukanlah satu-satunya jaminan bahwa Asia Tenggara akan terus aman atau bebas dari perang; perang bisa saja terjadi pada masa yang akan datang. Untuk menghindari hal tersebut, maka masyarakat Asia Tenggara harus bersama-sama menjaga struktur hubungan kawasan dari negara-negara kuat ini agar tetap ada keseimbangan. Selama

sistem intrusif tidak diwarnai oleh pertarungan ideologi, perang di kawasan dapat dihindari. Kecenderungan lain yang mengakibatkan sistem intrusif berdampak negatif adalah bila sebuah negara eksternal kalah dalam persaingan hingga menarik diri dari kawasan Asia Tenggara dan perubahan struktur hubungan dengan motivasi meninggalkan struktur hubungan lama. Kekuatan intrusif ketiga negara eksternal harus dipertahankan agar tetap memberikan struktur hubungan kawasan yang efektif untuk menjaga keamanan Asia Tenggara. Dapatlah dikatakan bahwa sistem intrusif berperan besar dalam membangun sebuah “*negative peace*” yang lebih menekankan pada aspek meniadakan perang belaka. Dengan kata lain, sistem intrusif hanya berdampak pada tidak terjadinya perang besar di kawasan, namun tidak menghadirkan perdamaian sepenuhnya di Asia Tenggara.

Buku ini menemukan bahwa perang terbuka di Asia Tenggara – yang memiliki konflik dan ketegangan sangat tinggi – tidak terjadi karena keterlibatan negara-negara eksternal (sistem intrusif) di kawasan, sehingga menimbulkan *deterrence* dan keseimbangan kekuatan kawasan. Dapat ditambahkan pula beberapa hal menarik untuk diteliti lebih lanjut dari sistem intrusif ini. Pertama, sistem intrusif dapat diteliti dalam kaitannya dengan isu-isu keamanan non-tradisional di Asia Tenggara, misalnya terorisme. Kedua, akan

sangat menantang untuk meneliti sistem intrusif dengan memakai metode studi perbandingan, misalnya membandingkan sistem intrusif di Asia Tenggara dan Timur Tengah. Dalam konteks ini, pertanyaan penelitian yang diajukan misalnya mengapa sistem intrusif di Asia Tenggara berdampak positif (stabilitas), tetapi di kawasan Timur Tengah berdampak negatif (instabilitas). Ketiga, penelitian tentang implikasi dari mundurnya sistem intrusif dari Asia Tenggara atau kawasan lain. Ketiga hal tersebut dapat dikembangkan dengan berangkat dari hasil temuan buku ini, yaitu bahwa sistem intrusif telah berperan signifikan dalam memberikan dampak stabilitas terhadap kawasan Asia Tenggara.

Kedaulatan adalah kontradiksi. Ia merupakan wacana otoritatif yang lahir karena desakan para Raja Prancis, Raja Swedia dan sekutunya serta Raja Agung Romawi untuk mengakhiri perang 30 tahun. Kelahirannya dinilai spektakuler dan berdampak pada eksistensi Raja-Raja tersebut. Melalui kelahiran kedaulatan Westphalia, Raja-Raja tetap berkuasa. Hal ini membuktikan bahwa kekuasaan adalah implikasi dari wacana. Sejak 1648 hingga era kontemporer, pemaknaan teks kedaulatan tetap bertahan dengan menunjukkan implikasi-implikasinya pada hubungan internasional, khususnya di Laut Cina Selatan. Produksi wacana kedaulatan berimplikasi pada

perilaku berkonflik negara-negara berkonflik di Laut Cina Selatan karena hasrat territorial atau daerah batas laut. Bernaungnya kedaulatan dalam tubuh negara membangkitkan potensi konflik tanpa akhir. Kelahiran kedaulatan adalah sebuah skandal Westphalia. Dengan demikian, wacana atau pengetahuan adalah implikasi dari kekuasaan.

Selain mengungkap wacana kedaulatan sebagai akar konflik di Laut Cina Selatan, ditunjukkan juga Konfusianisme sebagai wacana lokal Cina berimplikasi pada kebijakan luar negeri Cina yang harmoni. Ia dimanifestasikan pada kebijakan Cina yang cemerlang yaitu *peaceful development*. Deklarasi Konfusianisme sebagai dasar pijakan seluruh aspek kehidupan Cina dimulai sejak berkuasanya Hu dan dilanjutkan oleh Xi. Berbekal kapital elitis yang kuat, maka Konfusianisme menjadi wacana dominan di Cina (wacana minor dalam politik global). Ia memenangkan pertarungan wacana di arena budaya, ekonomi, dan politik. Sehingga terwujudnya kuasa wacana Konfusianisme yang diimplementasikan melalui “pembangunan damai” Cina. Implikasi yang ditimbulkan di Laut Cina Selatan adalah kehidupan tanpa perang. Cina bertindak sangat fleksibel melalui berbagai kerangka kerja sama multilateral dan bilateral.

Sekalipun konflik dan tendensi politik menyangkut perebutan kedaulatan territorial di LCS sangat tinggi, namun

tidak menimbulkan perang terbuka antarnegara. Memperhatikan kekuatan militer Cina yang kuat dan besar berpotensi menciptakan perang besar di LCS. Selain itu, upaya diplomasi tidak membuahkan hasil damai yang diinginkan. Namun, alternative diplomasi yaitu perang juga tidak terjadi. Riset ini mengklaim bahwa tidak terjadinya perang di LCS karena penerapan nilai-nilai harmoni Konfusianisme yang termanifestasi pada *peaceful development*. Dengan kata lain, perang tidak terjadi karena kuasa wacana Konfusianisme.

## DAFTAR PUSTAKA

### Artikel Jurnal

- Asif, M & Ling, B.Y., 'Belt and Road Initiative: A Spirit of Chinese Cultural Thought,' *International Journal of Business and Management*, Vol. 13 no. 12, 2018, hal. 9-17.
- Borrel, B., 'The Battle Over Preah Vihear,' *Archaeological Institute of America*, vol. 66, no. 2, 2013, pp. 53-60.
- Buszynski, L., 'Rising Tensions in the South China Sea: Prospects for a Resolution of the Issue,' *Security Challenges*, vol. 6, no. 2, 2010, pp. 85-104.
- Castro, D.C.R., 'Special Relations and Alliance Politics in Philippine-U.S. Security Relations, 1990-2002,' *Asian Perspective*, vol. 27, no. 1, 2003, pp. 137-164.
- Chong, I.J., 'The South China Sea Disputes: Documents and Context,' *Chinese Law & Government*, vol. 46, no. 3, 2013, pp. 10-170.
- Fernandez, S.E., 'Philippine/Malaysia dispute offer Sabah: a bibliographic survey,' *Asia Pacific Social Science*, vol. 7, no. 2, 2007, pp. 54-64.
- J. Mueller, 'War Has Almost Ceased to Exist: An Assessment,' *Political Science Quarterly*, vol. 124, no. 2, 2009, hal. 297-321.
- Kei He, 'Institutional Balancing and International Relations Theory: Economic Interdependence and Balance of Power Strategies in Southeast Asia,' *European Journal of International Relations*, vol. 14, no. 3, 2013, pp. 489-518.

- Lee, T. & McGahan, K., 'Norm subsidiarity and institutional cooperation: explaining the straits of Malacca anti-piracy regime,' *The Pasific Review*, vol. 28, no. 4, 2015, pp. 529-552.
- Liss, C., 'The privatisation of maritime security in Southeast Asia: the impact on regional security cooperation,' *Australian Journal of International Affairs*, vol. 68, no. 2, 2013, pp. 194-209.
- Roach, A.J., 'Enhancing Maritime Security in the Straits of Malacca and Singapore,' *Journal of International Affairs*, vol. 59, no. 1, 2005, pp. 97-116.
- Roza, R., 'Konflik Sulu-Malaysia: Ancaman Terhadap Keamanan Kawasan?', *P3DI*, vol. 5, no. 5, 2013, pp. 5-8.
- Scott, D., 'Conflict Irresolution in the South China Sea,' *Asian Survey*, vol. 52, no. 6, 2012, pp. 1019-1042.
- Simon, W.S., 'Security prospects in Southeast Asia: Collaborative efforts and ASEAN regional forum,' *The Pacific Review*, vol. 11, no. 2, 2007, pp. 195-212.
- Sun, Y., 'China's Strategic Misjudgement on Myanmar,' *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, vol. 31, no. 1, 2012, pp. 73-96.
- Thao, H.N., 'Vietnam and the Code of Conduct for the South China Sea,' *Ocean Development & International Law*, vol. 32, no. 2, 2001, pp. 105-130.

## **Buku**

- Akiyama, M., *OPRF Blueprint for a New Cooperative Framework on the Straits of Malacca and Singapore*, Ocean Policy Research Foundation, Tokyo, 2006.
- Barash, P.D., *Approaches to Peace: A Reader in Peace Studies*, Oxford University Press, New York, 2000.
- Cantori, J.L. & Spiegel, L.S., *The International Politics of Regions*, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, 1970.
- Cipto, B., *Hubungan Internasional di Asia Tenggara*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007.
- Clausewitz, V.C. (ed.), *On War*, Princenton University Press, New Jersey, 1976.
- Departemen Luar Negeri RI, *ASEAN Selayang Pandang*, Direktorat Jenderal Kerja sama ASEAN, Jakarta, 2012.
- Departemen Luar Negeri, *Penetapan Batas Maritim Dengan Malaysia Sudah dilakukan Sejak Tahun 1969*, Direktorat Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri RI & Pilar Indo Meditama, Jakarta, 2010.
- Djelantik, S., *Asia Pasifik: Konflik, Kerja Sama, dan Relasi Antarkawasan*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2015.
- Foucault, M., *Il Faut Défendre La Société*, English Edition *Society Must be Defended*, translate by David Macey, picador, New York, 1975-76.
- Foucault, M., *Power/Knowledge*, edisi Bahasa Indonesia *Wacana Kuasa/Pengetahuan*, diterjemahkan oleh Yudi Santoso, narasi/pustaka promethean, Yogyakarta, 2017.
- Foucault, M., *The Archaeology of Knowledge*, edisi Bahasa Indonesia *Arkeologi Pengetahuan*, diterjemahkan oleh Inyik Ridwan Muzir, IRCiSoD, Yogyakarta, 2012.



- Gramsci, A., (eds), *Selection From The Prison Notebooks*, International Publishers, New York, 1971.
- Hall, E.G.D., *Sejarah Asia Tenggara*, Usaha Nasional, Surabaya-Indonesia, 1988.
- Haryono, D.I., *Konflik dan Perbatasan Negara di Kawasan Asia Pasifik*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013.
- Hobbes, T., *Leviathan or the Matter, Forme, & Power of a Common wealth Ecclesiastical and Civil*, Thomas Hobbes, Malbesbury, 1651, p.106.
- Khalid, N., *To Serve And To Be Protected: A Comprehensive Perspective on Security in The Strait of Malacca*, Maritime Institute of Malaysia, Kuala Lumpur, 2008.
- Kresner, D.S., International Rezim, *Cornell University Press*, New York, 1983.
- Kusumaatmadja, M., *Hukum Laut Internasional*, Trimitra Mandiri, Jakarta, 1999.
- Montesano, J.M. & Onn, P.L. (eds.), *Regional Outlook Southeast Asia*, ISEAS, Singapore, 2012.
- Morgenthau, J.H., (ed.), *Politik AntarBangsa*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2010.
- Polimpung, Y.H., *Asal Usul Kedaulatan*, Kepik, Depok, 2014.
- Roberts, B.C. & Habir, D.A., *Australia's relations with Indonesia: Progress despite economic and socio-cultural constraints?*, National Security College Issue Brief, no. 11, Canberra, 2014.
- Sekretariat Dewan Kelautan Indonesia, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Kelautan*, Dewan Kelautan Indonesia, Jakarta, 2009.
- Tan See Seng and Amitav Acharya (ed), *Asia-Pacific Security Cooperation: National Interests and Regional Order*, routledge, New York, 2004.

- Tang, S.S., 'ASEAN, the United Nations and the Security of Southeast Asia: Problem, Prospect and Paradox,' dalam P.D. Lombaerde, F. Baer & T. Felicio (eds.), *The United Nations and The Regions*, Springer, London, 2012, pp. 157-163.
- Thayer, A.C., *The Cambodian People's Party Consolidates Power*, ISEAS, Singapore, 2009.
- Wong, J., *Politik Perdagangan Cina di Asia Tenggara*, Bumi Aksara, Jakarta, 1987.
- Woods, T.L., *Asia-Pacific Diplomacy: Non Governmental Organizations and International Relations*, UBC Press, Canada, 1960.
- Woods, T.L., *Asia-Pacific Diplomacy: Non Governmental Organizations and International Relations*, UBC Press, Canada, 1960.
- Zheng, Y & Tok, K.S., 'China's 'Peaceful Rise': Concept and Practice,' China Policy Institute, London, 2005.

### **Artikel Daring**

- 'Agreement between Australia and the Republic of Indonesia on the Framework for Security Cooperation,' *Australian Parliament* (daring), 2006, <[http://www.aph.gov.au/parliamentary\\_business/committees/house\\_of\\_representatives\\_committees?url=jsct/6december2006/treaties/indonesia\\_nia.pdf](http://www.aph.gov.au/parliamentary_business/committees/house_of_representatives_committees?url=jsct/6december2006/treaties/indonesia_nia.pdf)>, diakses pada 12 November 2015.
- 'Amerika Serikat Perjanjian Perdagangan Bebas,' *EENI* (daring), 2015, <<http://id.reingex.com/United-States-FTA-Agreements.shtml>>, diakses pada 23 Maret 2016.

- 'Armed Class in the South China sea, 'Vietnam: Socio Economics Historys (daring), 2012, <<https://socioecohistory.wordpress.com/tag/vietnam/>>, diakses pada 1 April 2016.
- 'AS & Filipina gelar latihan perang di dekat Laut Cina Selatan, 'SindoNews.com (daring), 19 September 2013, <<http://international.sindonews.com/read/784850/40/as-filipina-gelar-latihan-perang-di-dekat-laut-cina-selatan-1379536628>>, diakses pada 30 Maret 2016.
- 'AS & Filipina gelar latihan perang di dekat Laut Cina Selatan,' SindoNews.com (daring), 19 September 2013, <<http://international.sindonews.com/read/784850/40/as-filipina-gelar-latihan-perang-di-dekat-laut-cina-selatan-1379536628>>, diakses pada 20 Juli 2019.
- 'AS & Filipina gelar latihan perang di dekat Laut Cina Selatan,' SindoNews.com (daring), 19 September 2013, <<http://international.sindonews.com/read/784850/40/as-filipina-gelar-latihan-perang-di-dekat-laut-cina-selatan-1379536628>>, diakses pada 20 Juli 2019.
- 'AS dan Filipina Teken Pakta Pertahanan, 'Berita Satu.com (daring), 28 April 2014, <<http://www.beritasatu.com/dunia/180796-as-dan-filipina-teken-pakta-pertahanan.html>>, diakses pada 23 Maret 2016.
- 'AS Siapkan Bomber B-1 di Australia Untuk Urusan Laut Cina Selatan, 'Jakarta Greater (daring), 15 May 2015, <<http://jakartagreater.com/as-siapkan-bomber-b-1-di-australia-untuk-urusan-laut-china-selatan/>>, diakses pada 29 Maret 2016.
- 'ASEAN Australia New Zealand FTA (AANZFTA), 'New Zealand Ministry of Foreign Affairs and Trade (daring), <<https://www.mfat.govt.nz/en/trade/free-trade->

- [agreements/ free-trade-agreements-in-force/aanzfta-asean-australia-new-zealand-fta/](#)>, diakses pada 29 Maret 2016.
- ‘ASEAN- China Free Trade Area,’ *Kementerian Perdagangan Republik Indonesia* (daring), <<http://ditjenkpi.kemendag.go.id/Umum/Regional/Win/ASEAN%20-%20China%20FTA.pdf>>, diakses pada 26 Maret 2016.
- ‘ASEAN- China Free Trade Area,’ *Kementerian Perdagangan Republik Indonesia* (daring), <<http://ditjenkpi.kemendag.go.id/Umum/Regional/Win/ASEAN%20-%20China%20FTA.pdf>>, diakses pada 26 Maret 2019.
- ‘ASEAN Plus Three,’ *Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia* (daring), <<http://www.kemlu.go.id/ptri-asean/en/Pages/ASEAN-Plus-Three.aspx>>, diakses pada 26 Maret 2016.
- ‘ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Agreement,’ *Australian Government: Department of Foreign Affairs and Trade* (daring), <<http://dfat.gov.au/trade/agreements/aanzfta/pages/asean-australia-new-zealand-free-trade-agreement.aspx>>, diakses pada 29 Maret 2016.
- ‘ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area,’ *Kementerian Perdagangan Republik Indonesia* (daring), <<http://ditjenkpi.kemendag.go.id/Umum/Regional/Win/ASEAN%20-%20ANZ%20FTA.pdf>>, diakses pada 29 Maret 2016.
- ‘AS-Filipina Gelar Patroli Bersama di Laut Cina Selatan,’ *Berita Satu.com* (daring), 2016, <<http://www.beritasatu.com/dunia/360152-asfilipina->

- [gelar-patrol-bersama-di-laut-china-selatan.html](#)>, diakses pada 18 April 2016.
- 'AS-Filipina Latihan Perang Dekat Perairan Sengketa,' *SindoNews.com* (daring), 20 Juni 2014, <<http://international.sindonews.com/read/875562/40/as-filipina-latihan-perang-dekat-perairan-sengketa-1403270300>>, diakses pada 30 Maret 2016.
- 'China's Maritime Ambitions: Implications for Regional Security,' *Srilanka Guardian* (daring), <<http://www.srilankaguardian.org/2011/01/chinas-maritime-ambitions-implications.html>>, diakses pada 28 Maret 2016.
- 'China's Myanmar Strategy: Elections, Ethnic Politics and Economics,' *International Crisis Group* (daring), 21 September 2010, <<http://www.crisisgroup.org/~media/Files/asia/northeastasia/B112%20Chinas%20Myanmar%20Strategy%20%20Elections%20Ethnic%20Politics%20and%20Economics.pdf>>, diakses pada 28 Maret 2016.
- 'Comparisons of World Military Strengths,' *Globalfirepower.com*, <<http://www.globalfirepower.com/countries-comparison.asp>>, diakses pada 7 Juni 2015.
- 'East Asia & Pacific (developing only),' *The World Bank* (daring), <<http://data.worldbank.org/region/EAP>>, diakses pada 4 April 2016.
- 'Embargo Militer : Masa Suram Alutsista Militer Indonesia,' *AnalisisMiliter.com* (daring), 14 April 2012, <[http://analisismiliter.com/artikel/part/8/Embargo Militer Masa Suram Alutsista Militer Indonesia](http://analisismiliter.com/artikel/part/8/Embargo_Militer_Masa_Suram_Alutsista_Militer_Indonesia)>, diakses pada 3 April 2016.

- 'Factsheet - The Strategic Framework Agreement, 'Ministry of Defense Singapore (daring), <[http://www.mindef.gov.sg/imindef/press\\_room/official\\_releases/nr/2005/jul/12jul05\\_nr/12jul05\\_fs.html#.VnuBHdKqqko](http://www.mindef.gov.sg/imindef/press_room/official_releases/nr/2005/jul/12jul05_nr/12jul05_fs.html#.VnuBHdKqqko)>, diakses pada 24 Desember 2015.
- 'Factsheet - The Strategic Framework Agreement, 'Singapore Government (daring), 12 July 2005, <[http://www.mindef.gov.sg/imindef/press\\_room/official\\_releases/nr/2005/jul/12jul05\\_nr/12jul05\\_fs.html#.VxTLv9R97IV](http://www.mindef.gov.sg/imindef/press_room/official_releases/nr/2005/jul/12jul05_nr/12jul05_fs.html#.VxTLv9R97IV)>, diakses pada 18 April 2016.
- 'Fiery Cross Reef, 'Asia Maritime Transparency Initiative (daring), 15 November 2014, <<http://amti.csis.org/mischief-reef/>>, diakses pada 24 Maret 2016.
- 'Fiery Cross Reef,' Asia Maritime Transparency Initiative (daring), <<http://amti.csis.org/mischief-reef/>>, diakses pada 24 Maret 2019.
- 'Filipina Buka Kembali Pangkalan Militer AS, 'Republika (daring), 13 Agustus 2013, <<http://www.republika.co.id/berita/internasional/asean/13/08/13/mrfzqf-filipina-buka-kembali-pangkalan-militer-as>>, diakses pada 24 Desember 2015.
- 'Filipina-AS Tandatangani Kesepakatan Pertahanan,' Sumbar.AntaraNews.Com (daring), 28 April 2014, <<http://www.antarasumbar.com/berita/95465/filipina-as-tandatangani-kesepakatan-pertahanan.html>>, diakses pada 23 Maret 2016.
- 'Filipina-AS Tandatangani Kesepakatan Pertahanan,' Sumbar.AntaraNews.Com (daring), 28 April 2014, <<http://www.antarasumbar.com/berita/95465/filipina-as-tandatangani-kesepakatan-pertahanan.html>>, diakses pada 20 Maret 2019.

- 'Filipina-AS Tandatangani Kesepakatan Pertahanan,' *Sumbar.AntaraNews.Com* (daring), 28 April 2014, <<http://www.antarasumbar.com/berita/95465/filipina-as-tandatangani-kesepakatan-pertahanan.html>>, diakses pada 20 Maret 2019.
- 'Five Power Defence Arrangements (FPDA), ' *Global Security* (daring), <<http://www.globalsecurity.org/military/world/int/fpda.htm>>, diakses pada 28 Maret 2016.
- 'Forum Kerja Sama Moneter Kawasan Sub-Regional Sungai Mekong Digelar Setiap Tahun, ' *Elshinta.com* (daring), 14 Juni 2015, <<http://elshinta.com/news/15298/2015/06/14/forum-kerja-sama-moneter-kawasan-sub-regional-sungai-mekong-digelar-setiap-tahun>>, diakses pada 6 April 2016.
- 'GAM Belum Lepas Sandera Kru Kapal Tri Samudra, ' *Detik* (daring), 2005, <<http://news.detik.com/read/2005/03/19/171951/321279/10/gam-belum-lepas-sandera-kru-kapal-tri-samudra?nd771104bcj>>, diakses pada 15 Desember 2015 .
- 'Indonesia dan Cina Sepakat Produksi Bersama Rudal C-705 dan Kembangkan Radar, ' *Militer Hankam* (daring), <<http://www.militerhankam.com/2015/09/indonesia-dan-china-sepakat-produksi.html>>, diakses pada 24 Desember 2016.
- 'Indonesia, ASEAN dan Australia Mendorong Maju Penyatuan Ekonomi, ' *Kedutaan Besar Australia* (daring), 13 Juni 2008, <[http://indonesia.embassy.gov.au/jaktindonesian/PB08\\_ASEAN.html](http://indonesia.embassy.gov.au/jaktindonesian/PB08_ASEAN.html)>, diakses pada 29 Maret 2016.

- 'Indonesia, Singapura, dan Malaysia Bahas Kerja Sama Keamanan Laut,' *Aksara Pura* (daring), 26 September 2014, <<http://beritatrans.com/2014/09/26/indonesia-singapura-dan-malaysia-bahas-kerjasama-keamanan-laut/>>, diakses pada 6 April 2016.
- 'Kapal Selam Kilo, Amur dan Rudal C-705 dari Saudara Tua,' *Jakarta Greater* (daring), 16 Desember 2013, <<http://jakartagreater.com/kapal-selam-kilo-amur-dan-rudal-c-705-dari-saudara-tua/>>, diakses pada 24 Maret 2016
- 'Kemitraan Trans Pasifik (TPP): Membangun Ekonomi Amerika Serikat dan Kemitraan Strategis di Asia Pasifik,' *Embassy of the United States in Jakarta*, (daring), <[http://indonesian.jakarta.usembassy.gov/news/fact\\_130913id.html](http://indonesian.jakarta.usembassy.gov/news/fact_130913id.html)>,diakses pada 23 Maret 2016.
- 'Kerja Sama Sungai Lancang-Mekong Bawa Manfaat Bagi Berbagai Negara,' *Elshinta.com* (daring), 23 Maret 2016, <<http://elshinta.com/news/53699/2016/03/23/kerja-sama-sungai-lancang-mekong-bawa-manfaat-bagi-berbagai-negara>>, diakses pada 6 April 2016.
- 'Kerja Sama Sungai Lancang-Mekong Bawa Manfaat Bagi Berbagai Negara,' *Elshinta.com* (daring), 23 Maret 2016, <<http://elshinta.com/news/53699/2016/03/23/kerja-sama-sungai-lancang-mekong-bawa-manfaat-bagi-berbagai-negara>>, diakses pada 6 April 2016.
- 'Konflik Kawasan Asia Tenggara', <<http://m.maritimemagz.com/2014/11/15/konflik-maritim-asia-indonesia-harus-siaga/>>, diakses pada 2 April 2016.



- 'KTT ASEAN Dibuka di Tengah Krisis Laut China Selatan,' *Wn.com* (daring), 2012, <<http://www.antaraneews.com/print/344033/ktt-asean-di-tengah-krisis-laut-china-selatan>>, diakses pada 24 Desember 2016.
- 'KTT ASEAN Dibuka di Tengah Krisis Laut China Selatan,' *Wn.com* (daring), 2012, <<http://www.antaraneews.com/print/344033/ktt-asean-di-tengah-krisis-laut-china-selatan>>, diakses pada diakses pada 24 Desember 2016.
- 'Laos-Cina Tingkatkan Hubungan Militer,' *Intelijen* (daring), <<http://www.intelijen.co.id/laos-cina-tingkatkan-hubungan-militer/>>, diakses pada 24 Desember 2016.
- 'Latihan Multinasional Cobra Gold 2013,' *Artileri* (daring), 2013, <<http://www.artileri.org/2013/02/latihan-multinasional-cobra-gold-2013.html>>, diakses pada 18 April 2016.
- 'Malaysia Kritik 'Provokasi 'China di Laut China Selatan,' *CNN Indonesia* (daring), 18 Oktober 2015, <<http://www.cnnindonesia.com/internasional/20151018161659-106-85633/malaysia-kritik-provokasi-china-di-laut-china-selatan/>>, diakses pada 24 Desember 2015.
- 'Maritime Shipping Routes and Strategic Locations,' (daring), <[https://people.hofstra.edu/geotrans/eng/gallery/Map\\_Strategic\\_Passages.pdf](https://people.hofstra.edu/geotrans/eng/gallery/Map_Strategic_Passages.pdf)>, diakses pada 27 Desember 2015.
- 'Memperkuat kerja sama antara Vietnam dengan Malaysia dan Singapura,' *VOV5* (daring), 7 Agustus 2015, <<http://vovworld.vn/id-ID/Ulasan-Berita/Memperkuat-kerjasama-antara-Vietnam-dengan-Malaysia-dan-Singapura/357574.vov>>, diakses pada 4 April 2016.

- 'Mengapa Indonesia Menambah Kekuatan Militer di Natuna,' *BBC Indonesia* (daring), 1 Januari 2016, <[http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/12/151230\\_dunia\\_indonesia\\_natuna](http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/12/151230_dunia_indonesia_natuna)>, diakses pada 26 Maret 2016.
- 'Mengapa Indonesia Menambah Kekuatan Militer di Natuna,' *BBC Indonesia* (daring), 1 Januari 2016, <[http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/12/151230\\_dunia\\_indonesia\\_natuna](http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/12/151230_dunia_indonesia_natuna)> dan 'Review Artikel: ASEAN Diuji Hadapi Sengketa Wilayah,' *Kompasiana* (daring), 2013, <[http://www.kompasiana.com/www.nokjannah.com/review-artikel-asean-diuji-hadapi-sengketa-wilayah\\_5528d8896ea834a47f8b45a0](http://www.kompasiana.com/www.nokjannah.com/review-artikel-asean-diuji-hadapi-sengketa-wilayah_5528d8896ea834a47f8b45a0)>, diakses pada 26 Maret 2019.
- 'Pangkalan Militer Paling Mematikan di ASEAN,' *IndonesianReview.com* (daring), 1 Februari 2015, <<http://indonesianreview.com/gigin-pragianto/pangkalan-militer-paling-mematikan-di-asean>>, diakses pada 24 desember 2015.
- 'Patroli Australia di Laut China Selatan Mendapat Tantangan dari Militer China,' *JPNN.com* (daring), 3 Februari 2016, <<http://www.jpnn.com/read/2016/02/03/354602/Patroli-Australia-di-Laut-China-Selatan-Mendapat-Tantangan-dari-Militer-China->>, diakses pada 29 Maret 2016.
- 'PDB Triwulanan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha,' *Badan Pusat Statistik* (daring), <<http://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/827>>, diakses pada 5 April 2016.

- 'Pemerintah Vietnam Selalu Menciptakan Syarat Kepada Badan-Badan Usaha Filipina Untuk Melakukan Investasi dan Bisnis Secara Efektif di Vietnam, 'VOV5 (daring), 22 Oktober 2015, <<http://vovworld.vn/id-ID/Berita/Pemerintah-Vietnam-selalu-menciptakan-syarat-kepada-badanbadan-usaha-Filipina-untuk-melakukan-investasi-dan-bisnis-secara-efektif-di-Vietnam/378297.vov>>, diakses pada 4 April 2016.
- 'Penangkapan Kapal Malaysia, Percepat Penyelesaian Tapal Batas, 'Wilayah Perbatasan, 2011, <<http://www.wilayahperbatasan.com/penangkapan-kapal-malaysia-percepat-penyelesaian-tapal-batas/>>, diakses pada 1 April 2016.
- 'Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2011-2025, 'Badan Nasional Pengelola Perbatasan RI (daring), 2011, <<http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/134109-%5BKonten%20C9494.pdf>>, diakses pada 5 April 2016.
- 'Pengertian Pendapatan Nasional, 'Badan Pusat Statistik (daring), <<https://www.bps.go.id/Subjek/view/id/11>>, diakses pada 19 April 2016.
- 'Perkembangan Kerja Sama Rudal C-705 China-Indonesia, 'Jakarta Greater (daring), 22 Agustus 2013, <<http://jakartagreater.com/perkembangan-kerjasama-rudal-c-705-china-indonesia/>>, diakses pada 24 Maret 2016.
- 'Perubahan Kebijakan Filipina dalam Konflik Laut Cina Selatan melalui Konsep Realpolitik,' *Foreign Policy Community Indonesia* (daring), Aug, 30, 2018, <<https://medium.com/over-the-world/perubahan-kebijakan-filipina-dalam-konflik-laut-cina-selatan>>

- [melalui-konsep-realpolitik-346f3b4c939b](#)>, diakses 20 Juli 2019.
- 'Perubahan Kebijakan Filipina dalam Konflik Laut Cina Selatan melalui Konsep Realpolitik,' *Foreign Policy Community Indonesia* (daring), Aug, 30, 2018, <<https://medium.com/over-the-world/perubahan-kebijakan-filipina-dalam-konflik-laut-cina-selatan-melalui-konsep-realpolitik-346f3b4c939b>>, diakses 20 Juli 2019.
- 'Preah Vihear Dispute Border,' *Preah-Vihear* (daring) <<http://preah-vihear.com/home/mapsphotos/>>, diakses pada 27 Desember 2015.
- 'Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha,' *Badan Pusat Statistik* (daring), <[http://www.bps.go.id/tab\\_sub/view.php?tabel=1&daftar=1&id\\_subyek=11&notab=1](http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?tabel=1&daftar=1&id_subyek=11&notab=1)>, diakses pada 5 April 2016.
- 'Provokasi Perbatasan Indonesia, By Design?,' *Kompasiana* (daring), 10 Februari 2014, <[http://www.kompasiana.com/ridwan78/provokasi-perbatasan-indonesia-by-design\\_5529b3b66ea834b961552cff](http://www.kompasiana.com/ridwan78/provokasi-perbatasan-indonesia-by-design_5529b3b66ea834b961552cff)>, diakses pada 24 Desember 2015.
- 'Remarks by Chief of Defence Force LG Ng Yat Chung at the Malacca Straits Patrol (MSP) Joint Coordinating Committee Terms of References and Standard Operating Procedure Signing Ceremony,' *Ministry of Defense Singapore*, 2006, <[http://www.mindef.gov.sg/imindef/press\\_room/official\\_releases/nr/2006/apr/21apr06\\_nr.print.img.html](http://www.mindef.gov.sg/imindef/press_room/official_releases/nr/2006/apr/21apr06_nr.print.img.html)>, diakses pada 21 Maret 2016.

- 'Review Artikel: ASEAN Diuji Hadapi Sengketa Wilayah,' *Kompasiana* (daring), 2013,  
<[http://www.kompasiana.com/www.nokjannah.com/review-artikel-asean-diuji-hadapi-sengketa-wilayah\\_5528d8896ea834a47f8b45a0](http://www.kompasiana.com/www.nokjannah.com/review-artikel-asean-diuji-hadapi-sengketa-wilayah_5528d8896ea834a47f8b45a0)>, diakses pada 26 Maret 2016.
- 'Sovereignty over Pulau Ligitan and Pulau Sipadan (Indonesia/Malaysia),' *International Court of Justice* (daring), 2002,  
<<http://www.icj-cij.org/docket/files/102/7714.pdf>>, diakses pada 16 Maret 2016.
- 'Terkait Dampak Krisis Ekonomi Global, PT Pelabuhan I Cab. Belawan akan Naikkan Jasa Kepelabuhan,' *BUMN* (daring), 2008,  
<<http://www.bumn.go.id/pelindo1/en/berita/498/terkait.dampak.krisis.ekonomi.global.pt.pelabuhan.i.cab...belawan.akan.naikkan.jasa.kepelabuhan>>, diakses pada 4 April 2016.
- 'The SIPRI Military Expenditure Database,' *SIPRI*, <<http://milexdata.sipri.org/result.php4>>, diakses pada 7 Juni 2015.
- 'Tiga Perompak Tanker Pertamina Tewas Ditembak,' *Liputan 6* (daring), 2004,  
<<http://news.liputan6.com/read/80118>>, diakses pada 15 Desember 2015.
- 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia,' *Elsam* (daring), <<http://referensi.elsam.or.id/2014/10/uu-nomor-34-tahun-2004-tentang-tentara-nasional-indonesia/#sthash.SS4EV2fQ.dpuf>>, diakses pada 5 April 2016.

- 'World Oil Transit Chokepoints,' *U.S. Energy Information Administration* (daring), 2012, <[http://www.eia.gov/cabs/world oil transit chokepoints/Full.html](http://www.eia.gov/cabs/world%20oil%20transit%20chokepoints/Full.html)>, diakses pada 15 Desember 2015.
- A.J.Maya, Anomali Keamanan di Asia Tenggara Pasca Perang Dingin, *Thesis*, UGM Yogyakarta, 2016, pp. 1-87, < [http://lib.ugm.ac.id/ind/?page\\_id=248](http://lib.ugm.ac.id/ind/?page_id=248)>, diakses pada 20 Juni, 2019.
- Alesina, A. & Spolaore, E., 'War, peace, and the size of countries,' *Journal of Public Economics*, vol. 89, 2005, pp. 1333-1354, <[http://scholar.harvard.edu/files/alesina/files/war peace and the size of countries.pdf](http://scholar.harvard.edu/files/alesina/files/war%20peace%20and%20the%20size%20of%20countries.pdf)>, diakses pada 6 Mei 2016.
- B.W. V. Norden, 'The Confucian Roots of Xi Jinping's Policies,' *The Straits Time* (daring), Nov, 12, 2017, < <https://www.straitstimes.com/opinion/the-confucian-roots-of-xi-jinpings-policies>>, diakses pada 23 April 2019.
- Bateman, S., *Regional maritime security: threats and risk assessments*, Faculty of Law, University of Wollongong, 2010, <<http://ro.uow.edu.au/lawpapers/411/>>, diakses pada 19 Oktober 2015.
- Comparisons of World Military Strengths , "Global fire power" <<https://www.globalfirepower.com/countries-comparison.asp>>, diakses pada 18 April 2019.
- D. Cheong, 'Mahathir calls on China to help Malaysia with its 'internal fiscal problems,' *The Straits Times* (daring), <<https://www.straitstimes.com/asia/east-asia/chinas->

- [premier-li-keqiang-says-willing-to-push-bilateral-ties-with-malaysia](#)>, diakses pada 22 Juni 2019.
- David Clive Price, '4 Confucian Values for Doing Business in China' (daring), <<http://davidcliveprice.com/4-confucian-values-business-china/>>, diakses pada 20 April 2019.
- Defence Procurement in Southeast Asia*, Singapore, 2008, <[http://ipf-ssg.sea.net/5th\\_WS/defence\\_procurement\\_overview\\_Tim+Huxley.pdf](http://ipf-ssg.sea.net/5th_WS/defence_procurement_overview_Tim+Huxley.pdf)>, diakses pada 8 Juni 2015.
- Dwidayasa, J., 'Sengketa Laut China Selatan dinilai Picu Perlombaan Senjata,' *Okezone.com*, 15 Desember 2015, <<http://news.okezone.com/read/2015/12/15/18/1268309/sengketa-laut-china-selatan-dinilai-picu-perlombaan-senjata>>, diakses pada 24 Desember 2015.
- Dwidayasa, J., 'Sengketa Laut China Selatan dinilai Picu Perlombaan Senjata,' *Okezone.com*, 15 Desember 2015, <<http://news.okezone.com/read/2015/12/15/18/1268309/sengketa-laut-china-selatan-dinilai-picu-perlombaan-senjata>>, diakses pada 24 Desember 2015.
- Five Power Defence Arrangements: A New Zealand Perspective* (daring), 2013, <[http://www.victoria.ac.nz/hppi/centres/strategic-studies/documents/09\\_Five-Power-Defence-Arrangements\\_Strategic-Background-Paper\\_10.2013.pdf](http://www.victoria.ac.nz/hppi/centres/strategic-studies/documents/09_Five-Power-Defence-Arrangements_Strategic-Background-Paper_10.2013.pdf)>, diakses pada 28 Maret 2016.
- Greene, A., 'Patroli Australia di Laut China Selatan Mendapat Tantangan dari Militer China,' *ABC Radio Australia* (daring), 4 February 2016, <<http://www.radioaustralia.net.au/indonesian/2016-02-04/patroli-australia-di-laut-china-selatan-mendapat-tantangan-dari-militer-china/1543438>>, diakses pada 29 Maret 2016.

- Jenne, N., *State formation and territorial conflict: A framework for analysis*, Second Oceanic Conference on International Studies, University of Melbourne, 9-11 July 2014, <<http://www.ocis.org.au/files/pdf/full-papers/ocis14final00248.pdf>>, diakses pada 20 Oktober 2015.
- Juwana, H., 'Hukum Internasional Sebagai Instrumen Politik: Beberapa Pengalaman Indonesia Sebagai Studi Kasus,' (daring), <<http://download.portalgaruda.org/article.php?article=311366&val=7385&title=HUKUM%20INTERNASIONAL%20SEBAGAI%20INSTRUMEN%20POLITIK:%20BEBERAPA%20PENGALAMAN%20INDONESIA%20SEBAGAI%20STUDI%20OKASUS>>, diakses pada 13 April 2016.
- M. Samaruga, 'The Influence of Confucianism in Chinese Foreign Policy (1971-2013), *Research Gate* (daring), December, 2013, <[https://www.researchgate.net/publication/262103770\\_The\\_influence\\_of\\_Confucianism\\_in\\_Chinese\\_Foreign\\_Policy\\_1971-2013](https://www.researchgate.net/publication/262103770_The_influence_of_Confucianism_in_Chinese_Foreign_Policy_1971-2013)>, diakses pada 23 April 2019.
- Massey, S.A., *Maritime Security Cooperation in the Strait of Malacca*, tesis Master of Arts in Security Studies, Naval Postgraduate School, Monterey, California, 2008, <<http://calhoun.nps.edu/bitstream/handle/10945/4113/ADA483524.pdf?sequence=5>>, diakses pada 15 Desember 2015.
- Mueller, J., 'War Has Almost Ceased to Exist: An Assessment,' *Political Science Quarterly*, vol. 124, no. 2, 2009, <[polisci.osu.edu/faculty/jmueller/THISPSQ.pdf](http://polisci.osu.edu/faculty/jmueller/THISPSQ.pdf)>, diakses pada 8 Juni 2015.



- Mukhlisun, 'Filipina-AS Tandatangani Kesepakatan Pertahanan,' *Sumbar - AntaraNews.Com* (daring), 28 April 2014, <<http://www.antarasumbar.com/berita/95465/filipina-as-tandatangani-kesepakatan-pertahanan.html>>, diakses pada 23 Maret 2016.
- Shangri-La Dialogue The IISS Asia Security Summit*, <<https://www.iiss.org/en/about-s-us>>, diakses pada 15 Desember 2015.
- State Council Information Office of China, *White Paper: China's Peaceful Development Road* (daring), <<http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/document/s/APCITY/UNPAN023152.pdf>>, diakses pada 24 April 2019.
- The New York Times, *China's leaders rediscover Confucianism - Editorials & Commentary - International Herald Tribune* (daring), 14 September 2006, <<https://www.nytimes.com/2006/09/14/opinion/14iht-edbell.2807200.html>>, diakses pada 20 April 2019.
- U.S. Marine Corps Warfighting*, Cosimo, New York, 2007, <<https://books.google.co.id/books?isbn=1602060592>>, diakses pada 8 Juni 2015.
- U.S. Marine Corps Warfighting*, Cosimo, New York, 2007. <<https://books.google.co.id/books?isbn=1602060592>>, diakses pada 15 April 2018.
- Z. Bijian. *China's Peaceful Rise: Speeches of Zheng Bijian 1997-2004*, <<https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2012/04/20050616bijianlunch.pdf>>, diakses pada 20 April 2019.
- Z. Cheng, 'The Root of Chinese Culture from the Common Fate Community for All Mankind' (daring, Dec, 2017,

<<https://www.atlantispress.com/proceedings/icelaic-17/25886367>>, diakses pada 24 April 2019.

- Z. Lihua, 'China's Tradition Cultural Value and National Identity,' *Center for Global Policy* (Daring), November, 21, 2013, <<https://carnegietsinghua.org/2013/11/21/china-s-traditional-cultural-values-and-national-identity-pub-53613>>, diakses pada 20 April 2019.

## PROFIL PENULIS



Arthuur Jeverson Maya (AJM) adalah dosen tetap program studi Hubungan Internasional Universitas Kristen Indonesia (UKI). Menempu pendidikan S1 Hubungan Internasional di Universitas Kristen Indonesia dan S2 Hubungan Internasional di Universitas Gadjah Mada. Pernah menjadi direktur *Institute of ASEAN Studies* (IAS) UKI sejak 2017 sampai 2022, direktur *Center for Social Justice and Global Responsibility* (CSJGR) UKI sejak 2019 hingga sekarang. Jabatan struktural lainnya adalah sebagai Ketua Program Studi Hubungan Internasional UKI periode 2022-2026. Sebagai akademisi, AJM mengajar beberapa matakuliah seperti MK Pengantar Ilmu Hubungan Internasional, Teori Hubungan Internasional, Ekonomi Politik Global, Globalisasi, Pembangunan Berkelanjutan Dalam Sosial Ekonomi Global, Komunikasi Lintas Batas & Kolaborasi Berbagai Pemangku Kepentingan, dan beberapa matakuliah lainnya. Sebagai peneliti, AJM berkonsentrasi pada objek penelitian kekuasaan global, seperti kekuasaan kedaulatan, kekuasaan kelas, kekuasaan hegemoni,

kekuasaan budaya, kekuasaan simulasi, kekuasaan pendisiplinan, dan kekuasaan *governmentality*.

## **Tentang Buku Sistem Intrusif dan Kedaulatan**

Buku ini secara spesifik memperlihatkan mekanisme beroperasinya sistem intrusif. Pembuktian terhadap keterlibatan negara-negara pengganggu diperlihatkan pada kawasan Asia Tenggara. Di mana, sistem intrusif bekerja secara signifikan berdasarkan pengaturan-pengaturan antara negara-negara kuat luar kawasan dan negara-negara kawasan. Pengaturan-pengaturan tersebut antara lain adalah pengaturan multilateral, bilateral, intervensi militer, dan pengaturan ekonomi. Selain itu, ada beberapa pengaturan lainnya, namun pada konteks politik kawasan tidak signifikan, sehingga keempat pengaturan di atas dijadikan sebagai mekanisme sistem intrusif yang signifikan dalam menunjukkan konstelasi politik kawasan Asia Tenggara. Negara-negara kuat luar kawasan yang menjadi aktor sistem intrusif di kawasan Asia Tenggara adalah Amerika Serikat, Cina, dan Australia. Ketiga negara tersebut melalui pengaturan-pengaturan sistem intrusif berusaha memperebutkan kekuasaan “tahta suci” di Asia Tenggara. Sehingga sejarah kekuasaan Asia Tenggara adalah sejarah sistem intrusif.

Buku ini juga menyajikan pembacaan ganda terhadap diskursus kedaulatan Westphalia 1648 yang beroperasi dalam tubuh negara bangsa sehingga berperilaku konflik. Ini diperlihatkan pada konflik di Laut Cina Selatan (LCS). Konflik tanpa solusi tersebut menguatkan pernyataan bahwa sistem intrusif di LCS menambah konstelasi konflik kedaulatan teritorial. Rezim kedaulatan berusaha memproduksi “negara idola” untuk membangun semangat nasionalisme negara-negara berkonflik di LCS. Sehingga rezim kedaulatan versi Westphalia menjadi akar konflik sepanjang sejarah peradaban negara modern, melalui perebutan kekuasaan teritorial.

Buku ini memberikan sedikit diskusi dari sekian banyak diskusi, bahwa skema pemikiran lokal bisa berdampak signifikan dalam meminimalisir ketegangan yang diakibatkan kekuasaan kedaulatan dan keterlibatan sistem intrusif. Di mana, skema konfusianisme Cina, Vietnam, dan Malaysia dapat didorong sebagai diskursus tandingan kekuasaan kedaulatan, sehingga dapat mempertahankan LCS tanpa deklarasi perang terbuka antar negara.



## SISTEM INTRUSIF DAN KEDAULATAN

Buku ini secara spesifik memperlihatkan mekanisme beroperasinya sistem intrusif. Pembuktian terhadap keterlibatan negara-negara pengganggu diperlihatkan pada kawasan Asia Tenggara. Di mana, sistem intrusif bekerja secara signifikan berdasarkan pengaturan-pengaturan antara negara-negara kuat luar kawasan dan negara-negara kawasan. Pengaturan-pengaturan tersebut antara lain adalah pengaturan multilateral, bilateral, intervensi militer, dan pengaturan ekonomi. Selain itu, ada beberapa pengaturan lainnya,

namun pada konteks politik kawasan tidak signifikan, sehingga keempat pengaturan di atas dijadikan sebagai mekanisme sistem yang signifikan dalam menunjukkan konstelasi politik kawasan Asia Tenggara. Negara-negara kuat luar kawasan yang menjadi aktor sistem intrusif di kawasan Asia Tenggara adalah Amerika Serikat, Cina, dan Australia. Ketiga negara tersebut melalui pengaturan-pengaturan sistem intrusif berusaha memperebutkan kekuasaan “tahta suci” di Asia Tenggara. Sehingga sejarah kekuasaan Asia Tenggara adalah sejarah sistem intrusif.

Buku ini juga menyajikan pembacaan ganda terhadap diskursus kedaulatan Westphalia 1648 yang beroperasi dalam tubuh negara bangsa sehingga berperilaku konflik. Ini diperlihatkan pada konflik di Laut Cina Selatan (LCS). Konflik tanpa solusi tersebut menguatkan pernyataan bahwa sistem intrusif di LCS menambah konstelasi konflik kedaulatan teritorial. Rezim kedaulatan berusaha memproduksi “negara idola” untuk membangun semangat nasionalisme negara-negara berkonflik di LCS. Sehingga rezim kedaulatan versi Westphalia menjadi akar konflik sepanjang sejarah peradaban negara modern, melalui perebutan kekuasaan teritorial.

Buku ini memberikan sedikit diskusi dari sekian banyak diskusi, bahwa skema pemikiran lokal bisa berdampak signifikan dalam meminimalisir ketegangan yang diakibatkan kekuasaan kedaulatan dan keterlibatan sistem intrusif. Di mana, skema konfusianisme Cina, Vietnam, dan Malaysia dapat didorong sebagai diskursus tandingan kekuasaan kedaulatan, sehingga dapat mempertahankan LCS tanpa deklarasi perang terbuka antarnegara.



### UKI PRESS

Pusat Penerbit dan Percetakan  
Universitas Kristen Indonesia  
Jl. Mayjen Sutoyo No.02 Cawang  
Jakarta Timur 13630

ISBN 978-623-8012-82-4

